MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Buku Bahan Pengajaran ASEAN

Bagi Pendidikan Menengah



BACAAN UNTUK JENJANG SMA

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Buku Bahan Pengajaran

ASEAN

Bagi Pendidikan Menengah

Tim Penyusun
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
dan
Tim Penyusun
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kemendikbudristek
Gedung C, Lantai 6, Senayan, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10270

Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah

Penulis : Tim Penyusun Kementerian Luar Negeri RI & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.
Ilustrator : Lisa
Penata Letak : Tim SGP dan Media Grafika
Penyunting : Tim SGP dan Media Grafika

Diterbitkan pada tahun 2021 oleh
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Gedung C, Lantai 6, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270

Bekerjasama dengan
Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
Gedung Utama, Lantai 9, Jl. Taman Pejambon No. 6, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210

Buku ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam menyebarkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membangun perilaku positif siswa tentang ASEAN. Buku ini juga bermaksud untuk mendorong guru agar memahami secara utuh pengetahuan mengenai ASEAN, seraya mengenalkan manfaat dan arti penting ASEAN sejak dini kepada siswa di jenjang Pendidikan Menengah. Berikut adalah Tim Penyusun Buku Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah (SMA).

Pelindung : Joko Widodo
Pengarah 1 : Nadiem Anwar Makarim
Pengarah 2 : Retno L.P. Marsudi
Penanggung Jawab 1 : Ainun Na'im
Penanggung Jawab 2 : Sidharto Reza Suryodipuro
Ketua Pelaksana : Vedi Kurnia Buana
Wakil Ketua 1 : Faizal Chery Sidharta
Wakil Ketua 2 : Berlianto P.H. Situngkir
Wakil Ketua 3 : Riaz Januar Putra Saehu
Wakil Ketua 4 : Carolina Tinangon
Sekretaris 1 : Avi Dewani Sari Harahap
Sekretaris 2 : Janita Jaya
Anggota :

1. Julianty Dwieliza
2. Eddy Mulya
3. Hengki Andhika Pinandito
4. Annisa Amrih Sophiany
5. Endy Kami Imanuel Ginting
6. Ivorry Chaka Nathara Pranashanti
7. Emil Harry Dewantara
8. Vicky Nidya Putri
9. Febi Anria Putra
10. Singgih Yuwono
11. Audy Akbar Hasibuan
12. Lauti Nia
13. Ibrahim Caraka Debe
14. Rakainta Madaniya
15. I Made Diangga Karang
16. Arinta Puspitasari
17. Hosea Richardo Bokkak Manurung
18. Dian Nirmala Sari
19. Candra Wiguna Alisufi
20. Nelson Simorangkir
21. P.L.E. Priatna
22. Muhammad Aris Yunandar
23. Arfiendi Juni Jahja
24. Wihdiasmara Lia Farhati
25. Syifa Fauzi Almushally
26. Ir. Hendarman, MSc. PhD
27. Evy Mulyani
28. Adi Nuryanto
29. Efrini
30. Dony Setiawan
31. Tengku Syarfina
32. Lambas
33. Mariati Purba
34. E Oos M Anwas
35. Suprananto
36. Hastuti Mustikaningsih

Guru Kontributor SMA : Marlina, SMA Negeri 68 Jakarta
Warsono, SMA Negeri 44 Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan menengah. -- Jakarta : Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.

176 hlm. ; 29 cm.

Diterbitkan atas kerja sama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
ISBN 978-623-92944-1-0

1. Association of Southeast Asian Nations. I. Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. II. Indonesia. Kementerian Luar Negeri. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.

352.115 9

Kata Pengantar

ASEAN adalah saka guru politik luar negeri Indonesia. Sejak didirikan tahun 1967, ASEAN telah banyak memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera.

ASEAN telah berhasil mengembangkan budaya dialog dan kerja sama. ASEAN juga terus memajukan prinsip-prinsip multilateralisme dan integrasi ekonomi, di tengah munculnya kecenderungan meningkatnya unilateralisme dan proteksionisme dari beberapa negara dunia.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Indonesia akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi bagi pemajuan ASEAN, termasuk upaya untuk meningkatkan visibilitas ASEAN bagi rakyat ASEAN serta manfaat ASEAN bagi masyarakat secara luas.

Dengan latar belakang ini, menjadi sangat penting artinya, informasi mengenai ASEAN dapat diberikan melalui sistem pendidikan baku, termasuk bagi pendidikan menengah. Pemahaman sejarah dan perkembangan situasi ASEAN, apalagi terkait kepentingan utama Indonesia, dinilai sangat strategis dan bermanfaat.

Saya harap *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* ini akan bermanfaat bagi generasi penerus Indonesia. Bersama Indonesia, ASEAN kuat. Bersama ASEAN, Indonesia maju.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Kata Pengantar

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah berkembang menjadi kekuatan regional yang cukup disegani di level global pada usianya yang menginjak 52 tahun pada tahun 2019. Demi mewujudkan cita-cita untuk membentuk Masyarakat ASEAN tahun 2025, negara anggota ASEAN bersama-sama berkomitmen untuk mendorong penguatan ASEAN yang dituangkan dalam Cetak Biru ASEAN 2025 yang meliputi tiga pilar utama, yakni Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Melalui *Cetak Biru ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* seluruh pihak terkait terus mendorong penguatan identitas bersama ASEAN. Salah satunya dicapai melalui pendidikan dan kebudayaan yang merupakan salah satu instrumen diplomasi lunak (*soft diplomacy*) yang sangat strategis.

Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI telah menyusun *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* yang diharapkan menjadi panduan bagi guru pendidikan menengah di Indonesia untuk mengenalkan ASEAN secara lebih mendalam kepada peserta didik. Penyusunan buku tersebut merujuk pada ASEAN *Curriculum Sourcebook* yang menekankan pada lima tema utama, yakni mengenal ASEAN, menghargai identitas dan keberagaman, mengaitkan isu global dan lokal, mendorong persamaan dan keadilan, serta bekerja bersama untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Melalui buku ini, guru dan peserta didik didorong untuk memperbarui pemahaman mengenai ASEAN dan arti pentingnya ASEAN bagi Indonesia juga pemahaman bahwa masyarakat di negara ASEAN telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Bagi para guru, buku ini diharapkan dapat mendorong peningkatan keterampilan guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran mengenai ASEAN yang inovatif, interaktif, dan mengaplikasikan beragam strategi dan metode penyajian pembelajaran.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat berkontribusi pada pengembangan Masyarakat ASEAN. Cita-cita tersebut berada di tangan generasi muda yang diharapkan dapat terus memacu semangat untuk mengembangkan diri, masyarakat, dan juga negaranya. Saya berharap *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* ini menjadi langkah awal menuju cita-cita luhur tersebut.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NADIEM ANWAR MAKARIM

Daftar Isi

KATA PENGANTAR DARI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI iv

KATA PENGANTAR DARI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 3
D. Ruang Lingkup Materi 3

BAB II PENGEMBANGAN MATERI ASEAN 9

A. Sejarah ASEAN 10
1. Gambaran Umum ASEAN 10
2. Negara Pendiri ASEAN 13
3. Tujuan Pembentukan ASEAN 13
4. Perkembangan Keanggotaan ASEAN 16
5. Perkembangan Kerja Sama ASEAN 17
6. Struktur Organisasi ASEAN 22
7. Sekretaris Jenderal ASEAN 23
8. Sekretariat ASEAN 28
9. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia 31
B. Arah dan Tujuan ASEAN 32
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN 32
2. Prinsip ASEAN 34
3. Visi ASEAN 36
C. Profil Negara-Negara Anggota ASEAN 37
1. Profil Umum Kawasan ASEAN 37
2. Profil Negara Anggota ASEAN 40
a. Brunei Darussalam 40
b. Kamboja 44
c. Indonesia 48
d. Laos 53
e. Malaysia 56

f. Myanmar 60
g. Filipina 64
h. Singapura 67
i. Thailand 71
j. Vietnam 75
D. Masyarakat ASEAN 79
1. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 80
2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 86
3. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 95
E. Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional 115
1. Prinsip Umum 115
2. Bentuk Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional 115
3. Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dan Pertemuan ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional 120
4. Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara (*Dialogue Partner*) 121

BAB III IMPLEMENTASI KURIKULUM ASEAN DI PENDIDIKAN MENENGAH 133

1. Kompetensi Dasar Muatan ASEAN 133
2. Pemetaan Integrasi Kurikulum 134
3. Daftar Tugas Kokurikuler 135
4. Kegiatan Ekstrakurikuler 138
5. Gerakan Literasi Sekolah 139
6. Lembar Aktivitas Siswa 141

PENUTUP 153

GLOSARIUM 154

DAFTAR SINGKATAN 157

DAFTAR PUSTAKA 162

Bab I Pendahuluan

Penyusunan *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* merefleksikan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menghadirkan diplomasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang akan mengemban amanah dan penggiat diplomasi negeri ini di masa mendatang. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai bidang kerja sama di forum regional, termasuk salah satunya melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*The Association of Southeast Asian Nations*) atau yang sering kita dengar dengan sebutan ASEAN. Kontribusi Indonesia di ASEAN merupakan upaya untuk menunjang kepentingan nasional di berbagai bidang dan sebagai upaya untuk turut menciptakan perdamaian dan keamanan dunia.

Seluruh siswa Indonesia sebagai generasi muda negeri ini harus memahami arti penting dan hasil kerja sama ASEAN agar mampu memanfaatkan peluang yang ada di era Masyarakat ASEAN. Pendidikan yang komprehensif mengenai ASEAN bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi generasi penerus dalam membangun kerja sama dengan menitikberatkan pada rasa kesatuan dan saling menghormati, tanpa memandang perbedaan ras, gender, kepercayaan, serta latar belakang negara dan budaya. Tujuan paling utamanya tentu agar seluruh elemen masyarakat Indonesia memiliki kapabilitas untuk membangun persepsi, strategi, dan daya saing agar dapat turut berkontribusi dalam pembangunan nasional dan membawa citra positif Indonesia di mata dunia.

Penyusunan *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* ini merujuk pada ASEAN *Curriculum Sourcebook* yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN sebagai salah satu hasil kerja sama ASEAN di bidang pendidikan. ASEAN *Curriculum Sourcebook* menjadi panduan bersama di ASEAN untuk mengenali hubungan antarnegara dan mengembangkan materi serta strategi dalam memperdalam pengetahuan mengenai ASEAN. Melalui survei kurikulum yang dilakukan di berbagai negara anggota ASEAN, materi mengenai ASEAN disarankan untuk mengandung lima tema utama, yaitu (i) mengenal ASEAN; (ii) menghargai identitas dan keberagaman; (iii) mengaitkan isu-isu global dan lokal; (iv) mendorong persamaan dan keadilan; dan (v) bekerja bersama menuju masa depan yang berkelanjutan. Kelima tema utama ini kemudian dituangkan kembali dalam empat jalur (*pathways*) untuk mengidentifikasi pembagian substansi materi ke aspek masyarakat, tempat, material, dan ide.

A. Latar Belakang

Indonesia bersama negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) lainnya telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *Cetak Biru ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* sebagai rujukan untuk mengonsolidasikan arah strategis dan pembangunan Masyarakat ASEAN dalam satu dekade (2016–2025). Dokumen ini merupakan capaian ASEAN yang sangat penting dan menjadi pedoman penguatan dan pembangunan Masyarakat ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara

anggota ASEAN memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan *Cetak Biru ASEAN 2025* yang menjadi bagian dari kepentingan nasional dan kepentingan bersama ASEAN.

Cetak Biru ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama menetapkan berbagai elemen dan langkah strategis, termasuk memasukkan studi tentang ASEAN dalam kurikulum lembaga pendidikan di setiap negara anggota ASEAN. *Cetak Biru ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama* mendorong dimasukkannya studi politik, sistem hukum, serta budaya dan sejarah negara anggota ASEAN ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penguatan identitas serta penghormatan terhadap keberagaman ASEAN.

Secara lebih spesifik *Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025* digunakan pula sebagai rujukan untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan ASEAN untuk membangun masyarakat yang inklusif. Salah satu upayanya adalah melalui diseminasi informasi mengenai berbagai instrumen penting, studi politik, sistem hukum, serta budaya dan sejarah ASEAN dan negara anggota ASEAN melalui kurikulum sekolah. Selain itu, dokumen tersebut juga mendorong setiap negara anggota ASEAN untuk melakukan berbagai upaya berikut, yaitu

1. mendiseminasikan informasi mengenai Piagam ASEAN, *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan instrumen penting ASEAN lainnya kepada masyarakat umum serta berupaya untuk memasukkan pengetahuan tersebut dalam kurikulum sekolah (A.1.4.iii);
2. memasukkan studi ASEAN dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan negara anggota ASEAN melalui koordinasi dengan Badan ASEAN terkait (A.1.5.ii); dan
3. mendorong dimasukkannya studi politik, sistem hukum, serta budaya dan sejarah negara anggota ASEAN ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap identitas bersama dan keanekaragaman ASEAN (A.1.6.i).

Hasil survei oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ASEAN masih rendah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk melakukan pengembangan bahan pengajaran ASEAN agar lebih dinamis dan selaras dengan perkembangan isu-isu kerja sama ASEAN. Pengembangan bahan pengajaran ASEAN ini dituangkan dalam *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah*.

Sejalan dengan semangat memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional, buku ini diharapkan dapat melengkapi bahan ajar tentang ASEAN agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 di Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

B. Tujuan

Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah ini secara umum bertujuan memandu guru dalam menyebarluaskan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membangun sikap dan perilaku positif siswa tentang ASEAN. Melalui buku ini, guru diharapkan dapat memahami secara utuh pengetahuan mengenai ASEAN seraya memperkenalkan manfaat dan arti penting ASEAN sejak dini kepada siswa di jenjang pendidikan menengah. Melalui upaya tersebut, siswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ASEAN agar dapat mengimplementasikan

pengetahuan tentang ASEAN bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa dalam menghadapi era Masyarakat ASEAN yang kompetitif.

C. Manfaat

Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah ini merupakan panduan bagi seluruh guru pendidikan menengah di Indonesia untuk turut memutakhirkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai arti penting dan manfaat ASEAN bagi masyarakat Indonesia. Bagi guru, diharapkan buku ini dapat

1. membekali guru dengan informasi dasar mengenai ASEAN;
2. mendorong guru untuk terus mengikuti perkembangan kerja sama ASEAN;
3. mendorong pemahaman guru bahwa Masyarakat ASEAN telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara;
4. mendorong peran guru sebagai pendidik dalam rangka memajukan identitas dan kesadaran ASEAN kepada siswa; serta
5. meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran mengenai ASEAN yang berpusat pada siswa melalui belajar aktif dengan menerapkan beragam strategi dan metode penyajian.

Selain itu, buku ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai ASEAN sehingga siswa akan

1. memiliki pengetahuan dasar yang utuh dan pemahaman yang positif mengenai ASEAN;
2. menyadari bahwa Masyarakat ASEAN telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara; dan
3. memahami hasil kerja sama ASEAN dan mampu menarik manfaatnya bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Materi

Salah satu rujukan penyusunan *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* ini adalah *ASEAN Curriculum Sourcebook* yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN. Lima tema utama yang diangkat dalam *ASEAN Curriculum Sourcebook* adalah sebagai berikut.

1. Mengenal ASEAN (*Knowing ASEAN*)

   Tema ini berkaitan dengan mempelajari ASEAN (struktur, keanggotaan, tujuan, dan pendekatan) serta memahami signifikansi, capaian, dan tantangan-tantangan masa depan ASEAN.

2. Menghargai Identitas dan Keberagaman *(Valuing Identity and Diversity)*

   Tema ini berkaitan dengan mempelajari kaitan dan pengaruh yang membentuk kebudayaan dan

kepercayaan serta mengakui dan menghargai kekuatan, baik yang melekat pada kesamaan di antara masyarakat ASEAN maupun yang ada dalam karakteristik khasnya masing-masing.

3. Mengaitkan Isu-Isu Global dan Lokal *(Connecting Global and Local)*

   Tema ini berkaitan dengan mempelajari bagaimana isu-isu lokal dibentuk oleh perkembangan dan tren global serta bagaimana peristiwa lokal di ASEAN memengaruhi realitas global.

4. Mendorong Persamaan dan Keadilan *(Promoting Equity and Justice)*

   Tema ini berkaitan dengan memupuk prinsip keadilan dan persamaan serta menyediakan sarana dan referensi bagi pihak yang ingin belajar (secara ilmiah dan politis serta filosofis) guna menganalisis situasi kompleks dan menanggapinya secara tepat.

5. Bekerja Bersama Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan *(Working Together for a Sustainable Future)*

   Tema ini berkaitan dengan mengakui adanya tekanan akibat keterbatasan sumber daya dan pertumbuhan penduduk serta dampaknya terhadap kesinambungan pembangunan seraya memberi inspirasi untuk bekerja sama, baik di dalam maupun di luar masyarakat setempat, yang bertujuan membentuk ASEAN yang sejahtera, damai, dan memiliki masa depan yang berkesinambungan.

Kelima tema utama tersebut kemudian dituangkan dalam empat jalur yang saling berkaitan satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk menjembatani guru dan siswa agar dapat mengeksplorasi isi dan menganalisis isu-isu kompleks melalui berbagai perspektif seraya memastikan keberlanjutan penyampaian bahan pengajaran di setiap jenjang pendidikan. Empat jalur tersebut meliputi masyarakat, tempat, material, dan ide.

1. Masyarakat meliputi individu, kelompok etnis, warisan budaya, pemerintah dan warga negara, kesehatan, keamanan, serta peran gender dan peran setiap generasi dalam keluarga dan dalam cakupan budaya yang lebih luas.
2. Tempat mencakup ciri-ciri fisik, pola spasial, ekosistem, iklim, serta dinamika dan berbagai interaksi kekuatan alam.
3. Material meliputi berbagai objek yang dapat diukur, termasuk barang-barang manufaktur, sumber daya alam, seni dan kerajinan, serta artefak arkeologis.
4. Ide meliputi agama, sistem kepercayaan, filosofi, nilai, pandangan terhadap dunia, bentuk pemerintahan, teknologi, adopsi, dan adaptasi.

Tabel 1.1 Tinjauan Kerangka *Buku Bahan Pengajaran ASEAN*

Tema/Jalur	Mengenal ASEAN	Menghargai Identitas dan Keberagaman	Mengaitkan Isu-Isu Global dan Lokal	Mendorong Persamaan dan Keadilan	Bekerja Bersama Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan
Masyarakat	1. Menerima bahwa masyarakat di kawasan ASEAN memiliki kesamaan masa lalu dan takdir 2. Menerima bahwa masyarakat di kawasan ASEAN dapat bekerja sama untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama	1. Menghargai kesamaan masyarakat (individu ataupun kelompok) dan perbedaan karakteristiknya 2. Menghargai bagaimana kedua aspek tersebut terbagi di masyarakat 3. Menghargai identitas individu	Memahami bahwa suatu budaya, masyarakat, dan bangsa merupakan hasil pengaruh dari budaya, masyarakat, dan bangsa lain	Memberikan rasa tanggung jawab terhadap kesetaraan dan keadilan, konsekuensi perilaku dan pilihan yang diambil terhadap anggota masyarakat lain, serta tanggung jawab bersama antara individu dan kelompok	Mengakui pentingnya menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberlanjutan berbagai sistem secara jangka panjang, termasuk dalam aspek sosial, politik, dan lingkungan
Tempat	1. Melihat cara setiap Negara Anggota ASEAN menghadapi tantangan dan peluang yang sama 2. Melihat bahwa ASEAN menyediakan suatu mekanisme dan kebijakan untuk menyatukan kawasan	Mengakui bahwa perbedaan geografis dan sumber daya di tingkat lokal ditengarai menjadi faktor yang menghasilkan perspektif dan cara hidup yang berbeda	1. Memahami berbagai perbedaan cara yang membuat suatu tempat terhubung atau terisolasi 2. Memahami bagaimana faktor tersebut memengaruhi sejarah dan kehidupan masyarakat pada masa sekarang dalam berbagai cara	1. Mengakui ketergantungan (interdependensi) antara wilayah perkotaan dan perdesaan 2. Mengakui kekuatan dan kelemahan di setiap wilayah yang berbeda	1. Mengakui bahwa interaksi individu dan kelompok dengan lingkungan sekitarnya dapat memiliki konsekuensi penting atau memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat lain 2. Mengakui bahwa upaya untuk membantu pihak lain pada saat dibutuhkan dapat membangun ketangguhan kawasan

Material	Memahami bahwa kebijakan kawasan di ASEAN yang berkenaan dengan pertukaran teknologi, energi, dan asistensi terkait isu kesehatan membawa manfaat yang luas dalam aspek ekonomi, budaya, dan fisik	1. Mengakui bahwa seluruh budaya berupaya untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia yang sama 2. Mengakui bahwa ketersediaan sumber daya sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain	1. Memiliki kesadaran bahwa sumber daya, barang, uang, dan jasa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain 2. Memiliki kesadaran bahwa skema perpindahan sumber daya, barang, uang, dan jasa berubah dari waktu ke waktu 3. Memiliki kesadaran tentang bagaimana perubahan perpindahan sumber daya, barang, uang, dan jasa memengaruhi kehidupan masyarakat	1. Menghargai bagaimana akses terhadap material, sumber daya, teknologi, dan jasa memengaruhi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga negara secara individu 2. Menghargai bagaimana akses terhadap material, sumber daya, teknologi, dan jasa memengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu masyarakat	1. Memahami bagaimana ekonomi, kebijakan terkait sumber daya, dan praktiknya memengaruhi kesejahteraan masyarakat 2. Memahami bahwa ekonomi, kebijakan terkait sumber daya, dan praktiknya harus dipertimbangkan manfaat dan kekurangannya dalam jangka pendek dan jangka panjang
Ide	Memahami betul bahwa pertukaran ide antarnegara ASEAN mendorong kesejahteraan individu dan bangsa	1. Memahami bahwa manusia selalu mengembangkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu dan mengekspresikan dirinya 2. Memahami bahwa pada saat yang sama manusia pun masih mempertahankan dan mewariskan budaya, tradisi, dan sejarahnya	Memiliki kesadaran tentang pengaruh pertukaran ideologi, teknologi, informasi, dan estetik terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat yang berbeda	1. Memahami bagaimana kesetaraan dan keadilan selama ini didefinisikan dalam kelompok yang berbeda dan pada waktu yang berbeda 2. Memahami bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi cara suatu masyarakat berpikir atau mempraktikkan kesetaraan dan keadilan pada masa sekarang ini	Menjadi lebih sadar tentang cara suatu kelompok masyarakat menghadapi berbagai isu yang kompleks serta berupaya mencari ide dan perspektif baru dapat mendorong hasil yang stabil dan berkesinambungan

Materi ASEAN dalam *Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Pendidikan Menengah* terdiri atas lima ruang lingkup, yaitu sejarah ASEAN, arah dan tujuan ASEAN, profil dan keanggotaan ASEAN, masyarakat ASEAN, serta kerja sama ASEAN dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Ruang lingkup materi tersebut dijabarkan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Sejarah ASEAN

Materi sejarah ASEAN berkaitan dengan latar belakang sejarah pembentukan ASEAN. Materi tersebut diuraikan dengan menekankan pembahasan tentang tujuh hal berikut.

a. Lima negara pendiri ASEAN

b. Tujuan awal pembentukan ASEAN

c. Perkembangan keanggotaan ASEAN

d. Perkembangan kerja sama ASEAN dari awal hingga pada saat ini

e. Struktur organisasi ASEAN

f. Sekretaris Jenderal ASEAN

g. Sekretariat ASEAN

2. Arah dan Tujuan ASEAN

Materi arah dan tujuan ASEAN mencakup penjelasan secara terperinci tentang tiga hal berikut.

a. Dasar hukum pelaksanaan kerja sama ASEAN

b. Prinsip ASEAN

c. Visi ASEAN

3. Profil dan Keanggotaan ASEAN

Materi profil dan keanggotaan ASEAN mencakup pembahasan tentang karakteristik politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya, sistem hukum, dan sejarah setiap negara anggota ASEAN. Pemutakhiran isi *Buku Bahan Pengajaran ASEAN* pada materi ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan keanggotaan ASEAN serta kondisi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya, sistem hukum, dan sejarah di setiap negara anggota ASEAN.

4. Masyarakat ASEAN

Materi Masyarakat ASEAN meliputi pembahasan tentang ruang lingkup kerja sama kawasan yang terbagi dalam tiga pilar Masyarakat ASEAN berikut ini.

a. Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN

c. Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN

Pemutakhiran isi *Buku Bahan Pengajaran ASEAN* pada materi ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan isu dan capaian kerja sama ASEAN dari masa ke masa.

5. Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional

Materi kerja sama ASEAN dengan negara-negara lain dan organisasi internasional mencakup bentuk, pelaksanaan, dan manfaat hubungan kerja sama kemitraan yang dijalankan ASEAN dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Pemutakhiran isi *Buku Bahan Pengajaran ASEAN* pada materi ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan status keanggotaan Mitra Wicara ASEAN dan ruang lingkup kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN.

Bab II Pengembangan Materi ASEAN

Materi yang terangkum dalam Bab II mengenai pengembangan materi ASEAN merupakan materi pengayaan yang tidak ada dalam buku cetak mata pelajaran IPS. Materi tersebut disusun dalam rangka membantu guru di jenjang pendidikan dasar hingga menengah untuk mengembangkan wawasan siswa tentang ASEAN. Materi dalam Bab II secara umum berisi tentang informasi-informasi komprehensif yang terbagi dalam beberapa hal, yaitu sejarah ASEAN, arah dan tujuan ASEAN, profil negara anggota ASEAN, perkembangan isu di tiga pilar Masyarakat ASEAN, serta kerja sama ASEAN dengan negara lain dan organisasi internasional. Pengetahuan yang ada dalam Bab II diharapkan dapat membantu guru untuk menjelaskan arti penting dan capaian kerja sama ASEAN dari masa ke masa.

Pada penjelasan mengenai sejarah ASEAN, guru dapat menemukan informasi mengenai makna dan tata cara penggunaan bendera ASEAN serta lagu ASEAN, faktor kunci keberhasilan ASEAN, tanggal bergabungnya tiap-tiap negara anggota ASEAN, perjalanan kerja sama ASEAN sejak 1967 hingga masa kini, penjelasan mengenai alur koordinasi dan pengambilan keputusan di ASEAN, tata cara pemilihan dan para tokoh yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN, serta fungsi Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. Guru juga dapat memperoleh informasi mengenai landasan hukum pelaksanaan kerja sama ASEAN yang menentukan arah dan tujuan ASEAN.

Subbab tentang profil negara-negara anggota ASEAN menjelaskan profil umum kawasan Asia Tenggara. Selain itu, guru juga dapat memperoleh informasi mengenai kondisi domestik dan karakter dari tiap-tiap negara anggota ASEAN untuk memperkaya wawasan siswa mengenai persamaan dan keragaman di ASEAN. Selain memperoleh gambaran profil umum setiap negara anggota ASEAN, guru dapat menjelaskan kepada siswa mengenai sejarah, sistem politik, kondisi geografis, dan ragam sosial budaya yang dicontohkan dalam bentuk pakaian nasional, penampilan musik dan tari, serta kuliner. Guru juga dapat memperoleh pengetahuan mengenai latar belakang sejarah sejumlah negara anggota ASEAN yang berkaitan erat dengan sejarah sosial politik Indonesia.

Perkembangan kerja sama ASEAN dalam berbagai area kebijakan dijelaskan secara lebih lanjut dalam subbab mengenai Masyarakat ASEAN yang terbagi menjadi Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Guru dapat menemukan sejumlah isu utama yang saat ini menjadi prioritas pembahasan di ASEAN, misalnya pembahasan konsep Indo-Pasifik, penanganan isu Rakhine State di Myanmar, dan penyelesaian *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Guru juga dapat memperoleh wawasan mengenai hasil kerja sama bidang sosial budaya yang meliputi isu pemajuan dan pelindungan hak perempuan dan anak, kepemudaan, kerja sama untuk memajukan kualitas pegawai negeri di ASEAN, kerja sama olahraga, pengendalian penyebaran narkoba, kerja sama pendidikan, kerja sama kebudayaan dan seni, kerja sama informasi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, kerja sama ketenagakerjaan, kerja sama kesehatan, pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial dan pembangunan.

ASEAN juga menjalin kerja sama dengan sejumlah negara yang ada di luar kawasan Asia Tenggara dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE). Negara dan organisasi internasional yang menjalin kerja sama dengan ASEAN dikenal dengan sebutan Mitra Wicara (*Dialogue Partner*) ASEAN. Guru dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang menjadi prinsip umum serta pertimbangan ASEAN ketika membangun kerja sama dengan Mitra Wicara ASEAN. Guru juga dapat memahami bahwa kerja sama ASEAN dengan para pihak eksternal ini terbagi menjadi lima tingkatan dengan kriteria masing-masing yang berbeda, yaitu (i) kerja sama sebagai mitra wicara; (ii) kerja sama sebagai mitra wicara sektoral; (iii) kerja sama sebagai mitra pembangunan; (iv) kerja sama sebagai pengamat khusus; dan (v) kerja sama sebagai tamu. Setiap tingkatan kerja sama ini memiliki cakupan yang berbeda yang digunakan sebagai rujukan untuk menentukan sejauh mana suatu negara dapat menjalin kerja sama dengan ASEAN.

A. Sejarah ASEAN

1. Gambaran Umum ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama sepuluh negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. ASEAN memiliki semboyan "Satu Visi, Satu Identitas, Satu Masyarakat" *(One Vision, One Identity, One Community)* dan memiliki bendera, lambang, serta lagu untuk menggambarkan kesatuan sepuluh negara anggotanya dalam suatu organisasi kerja sama kawasan.

Sebagai suatu bentuk integrasi di kawasan, ASEAN memiliki mekanisme pembuatan keputusan dan penyelesaian sengketa. Pembuatan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan konsultasi hingga tercapai suatu kesepakatan bersama yang berdasarkan pada prinsip konsensus *(ASEAN Way)*. Penyelesaian sengketa di ASEAN sendiri mengacu pada Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara *(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia)*. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dilakukan sesuai dengan Protokol ASEAN tentang Mekanisme Peningkatan Penyelesaian Sengketa *(ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism)*. Apabila seluruh upaya penyelesaian sengketa belum berhasil, sengketa tersebut dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebagai forum pembuat keputusan tertinggi di ASEAN.

ASEAN juga memiliki mekanisme untuk memilih Ketua ASEAN yang akan menjabat dalam periode satu tahun. Ketua ASEAN berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pertemuan, antara lain KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Masyarakat ASEAN, dan Badan Sektoral ASEAN. Berdasarkan Piagam ASEAN, Ketua ASEAN dipilih dari negara anggota ASEAN setiap tahunnya dengan menggilir nama negara anggota ASEAN sesuai dengan urutan abjad dalam bahasa Inggris. Pada tahun 2020, Vietnam menduduki posisi sebagai ketua ASEAN dengan mengusung tema *"Cohesive and Responsive"*. Untuk selanjutnya, ketua ASEAN akan dipegang oleh Brunei Darussalam pada tahun 2021, dan oleh Kamboja pada tahun 2022.

Penggunaan Bendera dan Lambang ASEAN

Bendera dan lambang ASEAN harus digunakan untuk mempromosikan ASEAN dan tidak dapat digunakan untuk tujuan politik yang merusak martabat ASEAN dan tujuan komersial, kecuali telah mendapat persetujuan resmi sesuai dengan prosedur. Negara anggota ASEAN dapat menggunakan bendera dan lambang ASEAN pada acara resmi yang berhubungan dengan ASEAN. Lambang ASEAN diletakkan di sebelah kanan simbol nasional negara anggota ASEAN.



Gambar 2.1. Makna Bendera dan Lambang ASEAN
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

Lagu ASEAN

Lagu ASEAN *(ASEAN Anthem)* ialah "*The ASEAN Way*" yang diciptakan oleh Payom Valaiphatchra dengan aransemen musik oleh Kittikhun Sodpraset dan Sampow Triudom. Lagu ini dipilih melalui kompetisi yang diikuti oleh peserta dari 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2008. Lagu ASEAN dapat digunakan pada pertemuan resmi dan aktivitas terkait ASEAN, termasuk dengan Mitra Wicara ASEAN, yang dimaksudkan untuk mempromosikan kepentingan ASEAN. [1]

[1] Lagu "*The ASEAN Way*" dapat diunduh di situs Sekretariat ASEAN melalui sumber www.ASEAN.org/ASEAN/about-ASEAN/ASEAN- anthem.

LAGU RESMI ASEAN

THE ASEAN WAY



Copyright © ASEAN 2551

2. Negara Pendiri ASEAN

Ada lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Lima orang wakil negara/pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso R. Ramos), Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman), Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia (Tun Abdul Razak), dan Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam).



Gambar 2.2 Lima Wakil Negara/Pemerintahan Negara-Negara di Asia Tenggara yang Menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu Narciso R. Ramos (Filipina), Adam Malik (Indonesia), Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan S. Rajaratnam (Singapura)

Sumber Foto: Arsip Nasional RI

3. Tujuan Pembentukan ASEAN

Pembentukan ASEAN dilatarbelakangi keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi antarkekuatan militer negara-negara besar dan konflik antarnegara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga mempersulit pelaksanaan pembangunan. Menteri Luar Negeri RI, Adam Malik, menjelaskan sikap politik luar negeri Indonesia di depan sidang pleno DPR Gotong Royong yang berlangsung di Jakarta pada 24 Juli 1967. Indonesia mengajukan gagasan perlunya pembentukan kerja sama regional antarnegara di Asia Tenggara sebagai jawaban bagi kontestasi kekuatan dan konflik yang tak berkesudahan antarnegara di Asia Tenggara.

ASEAN telah melalui perjalanan panjang sejak pembentukannya pada 1967, mulai dari dinamika Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika, konflik bersenjata di Indo-China di 1970-an, dan krisis ekonomi pada 1997. Dalam perkembangannya, ASEAN telah berhasil menjadi platform diplomasi regional yang strategis. Hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara dan sejumlah negara atau organisasi internasional di luar kawasan berhimpun secara reguler melalui kerangka kerja sama ASEAN untuk menggapai kepentingan dan mengelola tantangan bersama di tingkat regional maupun internasional secara kolektif. Berbagai hasil kesepakatan dalam kerja sama ASEAN bukan hanya menciptakan fondasi untuk memajukan kerja sama dalam bidang perdamaian dan stabilitas, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN juga menghasilkan seperangkat nilai dan norma tata perilaku damai dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Perdamaian dan stabilitas kawasan yang merupakan capaian utama ASEAN sering kali terabaikan dan seolah tercipta dengan sendirinya. Pada kenyataannya, perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara merupakan hasil upaya yang gigih dan berkesinambungan. Perdamaian dan stabilitas merupakan modal utama bagi pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini merefleksikan keberhasilan ASEAN dalam mengikis pandangan tradisional yang melihat hubungan antarnegara yang didominasi kepentingan jangka pendek dan dalam kerangka hubungan *zero-sum game*. ASEAN terbukti berhasil melakukan rekayasa sosial-politik untuk mengubah kawasan Asia Tenggara menjadi suatu kawasan yang produktif dan saling menguntungkan.

GAMBARAN KONSTELASI GLOBAL DI ABAD KE-21

1. Kemajuan kawasan Asia Tenggara sangat kontras jika kita bandingkan dengan kawasan berkembang lain di dunia. Kondisi Amerika Latin dan Karibia, misalnya, mengalami masa sulit dalam beberapa tahun terakhir yang menurut Dana Moneter Internasional (IMF) mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar minus 0,3 persen pada kuartal IV/2016. Kondisi Timur Tengah juga mengalami tekanan berat dengan adanya konflik diplomatik dan konflik bersenjata yang tidak kunjung selesai.

2. Uni Eropa (UE), kiblat organisasi regional dunia, juga mengalami kendala. Munculnya sentimen antiregionalisme mengancam integrasi Eropa, ditandai oleh Brexit yang berpotensi diikuti negara anggota UE lain. Walaupun secara ekonomi UE masih merupakan organisasi terbesar, guliran kondisi keamanan, migrasi, dan ekonomi dunia menjadi ancaman yang tidak bisa dipandang remeh oleh UE.

Faktor
yang Menjadi Kunci Utama Keberhasilan ASEAN



ASEAN berhasil menanamkan budaya dialog dan konsultasi untuk menghasilkan penyelesaian damai bagi berbagai sengketa antarnegara.

Sengketa teritorial yang semula dianggap batu sandungan bagi kerja sama regional dapat diselesaikan melalui proses diplomasi dan hukum untuk mencapai tujuan lebih besar. Pembangunan identitas sebagai satu kawasan menjadi sangat penting mengingat kesatuan antarnegara di kawasan akan menciptakan profil kawasan yang lebih signifikan.





Equal footing melalui konsensus memberikan rasa percaya kepada seluruh anggota bahwa perbedaan yang ada dapat dibicarakan secara baik-baik.

Konsensus juga menjamin isu-isu sensitif di kawasan, seperti HAM dan demokrasi, tetap punya tempat di ASEAN. Di sisi lain, konsensus memberikan ruang bagi tiap negara untuk bergabung, berkembang, dan bertransformasi bersama ASEAN. Prinsip pengambilan keputusan ini telah memberikan kesatuan pada ASEAN yang terbentuk dari beragam budaya, agama, sejarah, taraf ekonomi, dan sistem pemerintahan.

Kerja sama ekonomi ASEAN mampu menciptakan pertumbuhan stabil dan berkelanjutan.

Krisis ekonomi di Asia pada penghujung 1990-an telah mendorong model kerja sama ekonomi yang lebih baik di ASEAN. Perdagangan dan investasi intra-ASEAN terbukti menjadi salah satu penopang pemajuan ekonomi ASEAN di tengah laju perlambatan ekonomi dunia.



Gambar 2.3 Faktor Keberhasilan ASEAN

4. Perkembangan Keanggotaan ASEAN

NEGARA ANGGOTA ASEAN	TANGGAL BERGABUNG
 Indonesia	8 Agustus 1967
 Malaysia	8 Agustus 1967
 Thailand	8 Agustus 1967
 Filipina	8 Agustus 1967
 Singapura	8 Agustus 1967
 Brunei Darussalam	7 Januari 1984

 Vietnam	28 Juli 1995
 Laos	23 Juli 1997
 Myanmar	23 Juli 1997
 Kamboja	30 April 1999

5. Perkembangan Kerja Sama ASEAN

Kerja sama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan Masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal.

Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat (*people-centered and people-oriented*). Demi melanjutkan upaya integrasi ASEAN pasca-2015, dalam KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur pada 22 November 2015, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengesahkan dua kesepakatan utama, yaitu:

a. *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community* yang secara resmi mencanangkan pembentukan Masyarakat ASEAN 2025; dan

b. *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. ASEAN 2025: Forging Ahead Together merupakan dokumen pengganti Peta Jalan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009--2015 atau yang dikenal sebagai Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015. Dokumen ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.



Gambar 2.4 Lima Dokumen Cetak Biru ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama

[2] Naskah *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diunduh melalui sumber http://setnas-ASEAN.id/site/uploads/document/book/599e3d513d507-ASEAN-2025-melangkah-maju-bersama.pdf

Lini Masa Peristiwa Penting ASEAN 1967-2020

8 Agustus 1967

Penandatangan Deklarasi Bangkok menandai pembentukan ASEAN

23-25 Februari 1976

Bali Concord I: Treaty of Amity and Cooperation (TAC).

Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama ASEAN di Bali, 23-25 Februari 1976. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bali Concord I serta Traktat Persahabatan dan Kerja Sama/*Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*

8 Januari 1984

Brunei Darussalam bergabung menjadi negara anggota ASEAN.

28 Juli 1995

Vietnam bergabung menjadi negara anggota ASEAN.

23 Juli 1997

Laos dan Myanmar bergabung menjadi negara anggota ASEAN.

15 Desember 1997

ASEAN Vision 2020

Pada KTT Informal ASEAN yang berlangsung pada 14-16 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, para kepala negara/pemerintahan ASEAN menyepakati ASEAN Vision 2020 untuk membentuk suatu Masyarakat ASEAN yang akan dicapai pada tahun 2020.

30 April 1999

Kamboja bergabung menjadi negara anggota ASEAN.

7 Oktober 2003

Bali Concord II: Masyarakat ASEAN

Pada KTT ASEAN ke-9, para Pemimpin ASEAN mengesahkan Bali Concord II untuk mendeklarasikan tiga pilar Masyarakat ASEAN, yang terdiri atas: Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

2004

Vientiane Action Programme (VAP)

KTT ke-10 ASEAN yang berlangsung di Vientiane pada 29–30 November 2004 menyepakati untuk mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Masyarakat ASEAN dari setiap pilar ke dalam *Vientiane Action Programme* (VAP) untuk mempertegas keinginan pembentukan Masyarakat ASEAN.

13 Januari 2007

Deklarasi Cebu

Para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya *Cebu Delaration on the Acceleration of the Establishement of an ASEAN Community by 2015* pada KTT ke-12 ASEAN.

20 November 2007

Penandatangan Piagam ASEAN

Piagam ASEAN ditandatangani oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan negara ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN yang berlangsung di Singapura. Piagam ASEAN merupakan kerangka hukum dan kelembagaan yang mengikat untuk seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum (*legal personality*).

15 Desember 2008

Pemberlakuan Piagam ASEAN

Piagam ASEAN mulai berlaku efektif setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

1 Maret 2009

Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015

Pada KTT ke-14 ASEAN yang berlangsung di Cha-Am Hua Hin, Thailand, para pemimpin ASEAN menandatangani Deklarasi Cha-Am Hua Hin mengenai Peta Jalan Pembentukan Masyarakat ASEAN 2009–2015 (*Cha-Am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community 2009–2015*) yang juga dikenal sebagai Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2015. Peta jalan ini berfungsi sebagai pedoman pembentukan Masyarakat ASEAN dengan ketiga pilarnya.

2011

Bali Concord III

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ke-19 ASEAN di Bali, 14–19 November 2011. Pada kesempatan tersebut, para pemimpin negara anggota ASEAN mengesahkan *Bali Declaration on ASEAN Community is a Global Community of Nations* atau yang dikenal sebagai Bali Concord III. Deklarasi ini mengukuhkan posisi ASEAN dalam masyarakat global sebagai entitas yang bersifat *outward looking* dan aktif memberikan solusi tentang permasalahan global.

22 November 2015

Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia menghasilkan dua kesepakatan utama, yaitu:

1. ***Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community***
2. ***ASEAN 2025: Forging Ahead Together***

Pengesahan kedua kesepakatan ini sekaligus menegaskan bahwa pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses berkelanjutan guna mewujudkan ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada rakyat (*people-centered and people-oriented*).

31 Desember 2015

Masyarakat ASEAN secara resmi diberlakukan.

8 Agustus 2017

50 tahun ASEAN.

2017

Beberapa hasil kesepakatan pada 2017, yaitu:

- *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers*
- Inisiasi *EAS Leaders Statement on Combating Marine Plastic Debris*
- *Framework for the Code of Conduct in the South China Sea*
- ADMM meluncurkan *ASEAN Direct Communications Infrastructure*
- *ASEAN Declaration on 'Cultural of Prevention' for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society*
- Ratifikasi *the Establishment Agreement of the ASEAN Centre for Biodiversity*
- *ASEAN Tourism Marketing Strategy 2017–2020*

2018

Beberapa hasil kesepakatan pada 2018, yaitu:

- Adopsi *ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018–2025)*
- Rencana Kerja 2 Tahunan: *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2018–2019*
- *ASEAN Declaration on Cruise Tourism*
- Pengesahan *ASEAN Small and Medium Enterprise Policy Index 2018*
- Penandatanganan *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*
- Penyelesaian *the Assessment of ASEAN's Readiness for the Fourth Industrial Revolution*
- 27 mitra eksternal di luar kawasan Asia Tenggara mengaksesi TAC

2019

Beberapa hasil kesepakatan pada 2019, yaitu:

- *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)
- Target Penyelesaian *Regional Comprehensive Economic Partnership*

2020

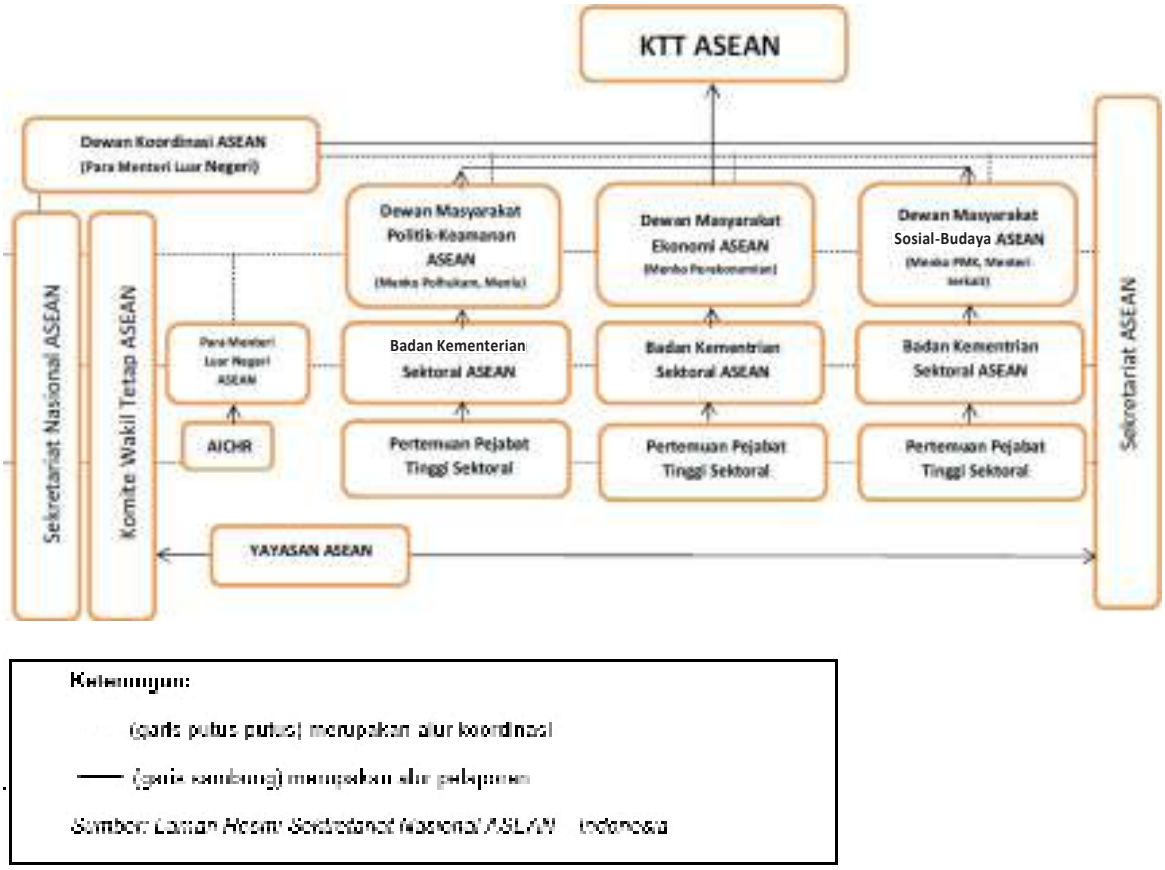
Beberapa hasil kesepakatan pada 2020, yaitu:

- *COVID-19 ASEAN Response Fund*
- *ASEAN Regional Reserve on Medical Supplies for Public Health Emergencies*
- *ASEAN Travel Corridor Arrangement*

Gambar 2.5 Lini Masa Peristiwa Penting ASEAN 1967-2020
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

6. Struktur Organisasi ASEAN

Struktur organisasi ASEAN adalah rujukan alur koordinasi dan pengambilan keputusan yang berlaku di ASEAN. Struktur ini juga mencerminkan sejumlah pertemuan ASEAN. Bahasa yang digunakan dalam pertemuan ASEAN adalah bahasa Inggris. Berikut adalah gambar struktur organisasi ASEAN:



Keterangan:

(garis putus putus) merupakan alur koordinasi

(garis sambung) merupakan alur pelaporan

Sumber: Laman Resmi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia

Gambar 2.6 Struktur Organisasi ASEAN

a. **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN** adalah pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/ pemerintahan negara anggota.

b. **Dewan Koordinasi ASEAN** *(ASEAN Coordinating Council)* adalah pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN yang bertindak sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN.

c. **Dewan Masyarakat ASEAN** *(ASEAN Community Councils)* adalah pertemuan para menteri yang membidangi tiga pilar Masyarakat ASEAN, yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya.

d. Pertemuan **Badan-Badan Sektoral Tingkat Menteri** *(ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)* adalah pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

e. Pertemuan tingkat **Pejabat Tinggi ASEAN** *(ASEAN Senior Officials' Meeting)* adalah pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN.

f. **Sekretariat ASEAN** adalah organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antarbadan ASEAN dan implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerja sama ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jenderal.

g. **Komite Wakil Tetap ASEAN** adalah forum para duta besar/wakil tetap negara anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

h. **Sekretariat Nasional** adalah pumpunan kegiatan *(focal point)* tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyimpan informasi mengenai urusan ASEAN, mengoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN.

i. **Komisi Antarpemerintah untuk HAM ASEAN** *(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/*AICHR*)* adalah badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN.

7. Sekretaris Jenderal ASEAN

Sekretaris Jenderal ASEAN adalah kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode lima tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan/keputusan ASEAN serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selain itu, Sekretaris Jenderal ASEAN juga memiliki tugas menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN Kepada pihak eksternal sesuai dengan pedoman kebijakan mandatnya. Sekretaris Jenderal ASEAN untuk periode Januari 2018 hingga Desember 2022 adalah Dato Lim Jock Hoi yang berasal dari Brunei Darussalam. Foto Sekretaris Jenderal ASEAN yang masih menjabat tertera di bawah ini:



Gambar 2.7 Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi
Sumber Foto: Sekretariat ASEAN

Tabel 2.1 Sekretaris Jenderal ASEAN

Berikut ini adalah daftar tokoh yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN. [3]

Nama	Periode Jabatan	Negara Asal
 **H.R Dharsono** **Sumber Foto:** **Kementerian Luar Negeri RI**	**7 Juni 1976 hingga** **18 Februari 1978**	**Indonesia**
 **Umarjadi Notowijono** **Sumber Foto:** **Kementerian Luar Negeri RI**	**19 Februari 1978 hingga** **30 Juni 1978**	**Indonesia**

[3] Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, https://kemlu.go.id/ptri-ASEAN/id/pages/sekretaris_jenderal_ASEAN_dan_sekretariat_ASEAN/966/etc-menu

 **Datuk Ali Bin Abdullah** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	10 Juli 1978 hingga 30 Juni 1980	Malaysia
 **Narciso G. Reyes** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	1 Juli 1980 hingga 1 Juli 1982	Filipina
 **Chan Kai Yau** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	18 Juli 1982 hingga 15 Juli 1984	Singapura

 **Phan Wannamethee** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**16 Juli 1984 hingga** **15 Juli 1986**	**Thailand**
 **Roderick Yong** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**16 Juli 1986 hingga** **16 Juli 1989**	**Brunei Darussalam**
 **Rusli Noor** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**17 Juli 1989 hingga** **1 Januari 1993**	**Indonesia**

 **Dato Ajit Singh** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**1 Januari 1993 hingga** **31 Desember 1997**	**Malaysia**
 **Rodolfo C. Severino Jr**. Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**1 Januari 1998 hingga** **31 Desember 2002**	**Filipina**
 **Ong Keng Yong** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**1 Januari 2003 hingga** **31 Desember 2007**	**Singapura**

 **Dr. Surin Pitsuwan** Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI	**1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2012**	**Thailand**
 **Le Luong Minh** Sumber Foto: Sekretariat ASEAN	**1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2017**	**Vietnam**

8. Sekretariat ASEAN

Sekretariat ASEAN dibentuk pada bulan Februari 1976 oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN. Sekretariat ASEAN kemudian bertempat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Kantor Sekretariat ASEAN yang pertama kemudian dibangun di Jalan Sisingamangaraja Nomor 70 A, Jakarta dan diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto.

Fungsi dasar Sekretariat ASEAN adalah membantu koordinasi antarorgan ASEAN yang lebih efisien dan agar implementasi berbagai proyek dan prakarsa ASEAN dapat berjalan lebih efektif. Sekretariat ASEAN memiliki misi untuk memprakarsai, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kolaborasi para pemangku kepentingan ASEAN untuk mewujudkan tujuan dan prinsip ASEAN yang terefleksikan dalam Piagam ASEAN. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagaimana tergambar pada gambar berikut.



Gambar 2.8 Fungsi Sekretariat ASEAN

Pembangunan Gedung Sekretariat ASEAN

Agar pelaksanaan tugas Sekretariat ASEAN dan berbagai pertemuan ASEAN dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Indonesia telah membangun gedung baru untuk Sekretariat ASEAN. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN pada 8 Agustus 2019, bertepatan dengan hari jadi ASEAN yang ke-52. Kegiatan dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) dari negara anggota ASEAN dan berbagai perwakilan asing di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di tengah perubahan global yang berlangsung sangat cepat, ASEAN harus mampu



Gambar 2.9 Presiden Joko Widodo Meresmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN pada 8 Agustus 2019 Disaksikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi

Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI

bergerak cepat dan solid untuk merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN berupaya keras untuk memfasilitasi ASEAN agar dapat membangun kerja sama secara lebih cepat, tepat, efektif, dan efisien. Presiden RI mengharapkan ASEAN dapat memusatkan seluruh kegiatannya di Gedung Baru Sekretariat ASEAN agar lebih mengefisienkan pengeluaran yang dibutuhkan untuk melangsungkan suatu kegiatan dan mengalihkannya untuk kegiatan-kegiatan ASEAN lain yang lebih strategis.



Gambar 2.10 Rancangan Gedung Baru Sekretariat ASEAN
Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI



Gambar 2.11 Gedung Baru Sekretariat ASEAN setelah diresmikan
Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI

JAKARTA
SEBAGAI IBU KOTA DIPLOMATIK ASEAN

Saat ini terdapat 10 duta besar atau wakil tetap negara anggota ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, beserta duta besar dari negara Mitra Wicara.

Selain itu, terdapat lebih dari 93 duta besar negara dan organisasi internasional yang terakreditasi ke ASEAN.

Hal ini mempertegas kedudukan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik ASEAN.



Gambar 2.12 Jakarta Ibu Kota Diplomatik ASEAN

9. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia (Setnas ASEAN-Indonesia) dibentuk berdasarkan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara *(the Association of Southeast Asian Nations)* yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Berdasarkan Piagam ASEAN, Sekretariat Nasional ASEAN di tiap-tiap negara anggota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.



Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah merumuskan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara *(the Association of Southeast Asian Nations)* selama tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan kelembagaan di tingkat nasional.

Gambar 2.13 Tugas dan Fungsi Sekretariat Nasional ASEAN

B. Arah dan Tujuan ASEAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN

Deklarasi Bangkok [4]

Awal pembentukan ASEAN diawali oleh penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima Menteri Luar Negeri negara pendiri ASEAN pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok menjadi landasan kesepakatan untuk mengadakan kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Tujuh arah dan tujuan ASEAN yang termaktub dalam Deklarasi Bangkok, yaitu

a. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan guna memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang damai dan makmur;

b. mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan dan sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

c. mendorong kolaborasi aktif dan saling membantu dalam berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama pada bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, saintifik, dan administratif;

d. menyediakan asistensi untuk satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas penelitian di area pendidikan, profesional, teknis, dan administratif;

e. bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian dan industri, pengembangan dagang, termasuk studi dalam isu perdagangan komoditas internasional, perbaikan transportasi dan fasilitas komunikasi, serta peningkatan taraf hidup masyarakatnya;

f. mendorong kajian Asia Tenggara; dan

g. memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai arah dan tujuan yang sama, serta mencari seluruh kesempatan untuk saling mempererat kerja sama.

Piagam ASEAN [5]

Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum *(legal personality)*. Piagam ASEAN ditandatangani saat KTT ke-13 ASEAN pada 20 November 2007 di Singapura oleh sepuluh kepala negara/pemerintahan dari negara anggota ASEAN. Piagam ASEAN mulai berlaku efektif pada 15 Desember 2008 setelah semua negara anggota ASEAN menyampaikan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan ***Charter of the Association of Southeast Asian Nations*** (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Piagam ASEAN dapat ditinjau kembali setelah lima tahun terhitung sejak Piagam ASEAN resmi diberlakukan.

---

4 Naskah Deklarasi Bangkok dapat diunduh di tautan http://agreement.ASEAN.org/media/download/20140117154159.pdf

5 Naskah Piagam ASEAN dapat diunduh di tautan https://www.ASEAN.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf

Piagam ASEAN memuat tujuan dan prinsip ASEAN, struktur ASEAN, hak dan kewajiban negara anggota ASEAN, mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa di ASEAN, serta aturan administrasi dan keuangan. Piagam ASEAN terdiri atas pembukaan, 13 bab, 55 pasal, dan 4 lampiran. Piagam ASEAN berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur kerja sama negara anggota ASEAN agar menjadi lebih jelas dan terarah sehingga diharapkan dapat menjawab segala permasalahan ASEAN secara efektif dan efisien.

Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC)

Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara *(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*/TAC) merupakan salah satu traktat yang paling penting di ASEAN sebagai sebuah *code of conduct* yang mengatur hubungan antarnegara di Asia Tenggara dan berperan sebagai fondasi perdamaian serta stabilitas di kawasan. TAC menjadi prinsip dalam pengaturan penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai. TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1976. Pada tahun 1987, TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi negara-negara di kawasan lain. Hingga September 2016, telah terdapat 35 *High Contracting Parties* (HCP) atau negara yang melakukan aksesi terhadap TAC. Dalam membangun hubungan dengan satu sama lain, negara anggota ASEAN mengesahkan prinsip fundamental yang ada dalam TAC, yaitu

a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional dari semua bangsa;
b. Hak setiap negara untuk melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau tekanan dari luar;
c. Tidak campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain;
d. Penyelesaian perselisihan atau persengketaan dengan cara-cara damai;
e. Penolakan pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan; dan
f. Kerja sama yang efektif antara satu sama lain.

2. Prinsip ASEAN

a

Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN

b

Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan

Menolak agresi dan a
penggunaan kekuatar
tindakan-tindakan lain
apa pun yang bertent
hukum internasional

n

Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar



m

Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan nondiskriminatif

l

Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman

k

Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek nonnegara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara Anggota ASEAN

Menjunjung tinggi Pia
Bangsa-Bangsa dan
termasuk hukum hum
yang disetujui oleh ne
ASEAN

Gambar 2.14 Prinsip ASEAN

c

ncaman atau
n atau
nya dalam bentuk
angan dengan

d

Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai

e

Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN

NSIP
EAN



f

Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, dan tekanan dari luar

g

Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN

j

gam Perserikatan
hukum internasional,
aniter internasional,
egara anggota

i

Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial

h

Berpegang teguh pada aturan hukum, tata kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional

3. Visi ASEAN

Dengan mengingat bahwa isu-isu yang berkembang dalam kerja sama ASEAN sangat dinamis, ASEAN terus memperbarui visinya. ASEAN saat ini memiliki Visi Masyarakat ASEAN 2025 sebagai rujukan pelaksanaan kerja sama, yang secara umum memuat cita-cita para negara anggotanya untuk

a. menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama, yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, Visi ASEAN 2020, Deklarasi *ASEAN Concord II*, Piagam ASEAN, Peta Jalan Masyarakat ASEAN (2009--2015), dan Deklarasi Bali tentang Masyarakat ASEAN dalam Masyarakat Global Bangsa Bangsa;

b. mengonsolidasikan masyarakat di tiap negara anggota ASEAN dengan membangun dan memperdalam proses integrasi untuk mewujudkan suatu Masyarakat ASEAN yang berdasarkan pada aturan, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat yang di dalamnya rakyat menikmati hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan yang mendasar, kualitas hidup yang lebih baik serta memperoleh manfaat dari upaya pembentukan masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama, yang berpedoman pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN;

c. mencita-citakan suatu masyarakat yang damai, stabil, dan tangguh dengan kapasitas yang tinggi untuk merespon tantangan secara efektif;

d. menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berorientasi ke luar dalam masyarakat global bangsa-bangsa, seraya mempertahankan sentralitas ASEAN;

e. mencita-citakan ekonomi yang bergairah, berkelanjutan, dan terintegrasi penuh;

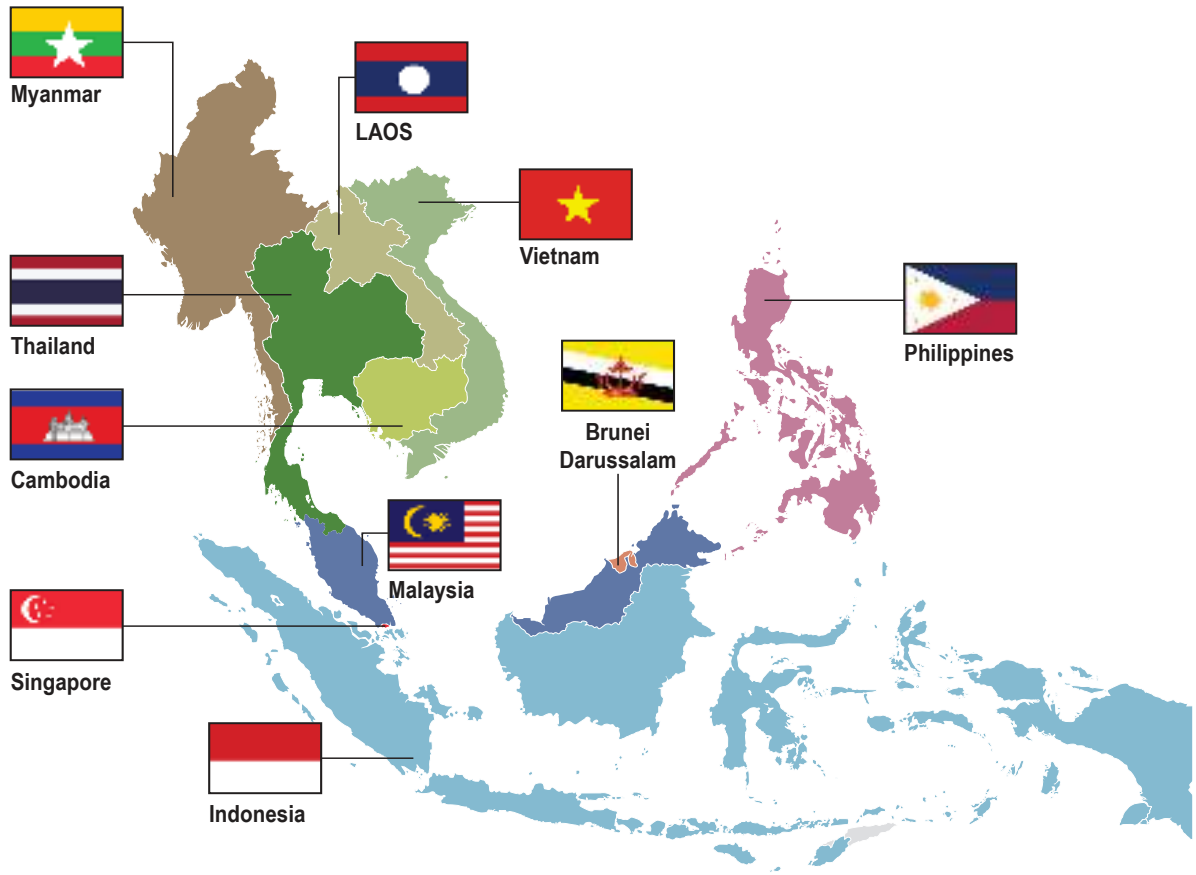
f. meningkatkan konektivitas ASEAN dan memperkuat berbagai upaya untuk menutup kesenjangan pembangunan, termasuk melalui IAI;

g. mencita-citakan ASEAN yang mampu meraih peluang dan mengatasi tantangan di masa mendatang;

h. menggarisbawahi bahwa Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan saling melengkapi dengan pembangunan Masyarakat ASEAN untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di kawasan.

C. Profil Negara-Negara Anggota ASEAN

1. Profil Umum Kawasan ASEAN



Gambar 2.15 Wilayah Negara-Negara Anggota ASEAN
Sumber Foto: World Economic Forum

ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara yang berada di antara kawasan Asia Selatan dan Asia Timur. ASEAN memiliki luas wilayah laut sekitar 5.060.100 km^2 dan wilayah daratan sekitar 4.817.000 km^2. Sebagian besar negara anggota ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati atau berdekatan dengan garis khatulistiwa. ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki karakteristik geografis yang unik, yaitu

a. *compact*, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya Kamboja;
b. *fragmented*, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia;
c. *elongated*, yaitu bentuk memanjang, contohnya Vietnam; dan
d. *protruded*, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar.

Kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi dua subkawasan yang memiliki karakteristik geografis yang serupa. Subkawasan pertama adalah Asia Tenggara Daratan *(Mainland Southeast Asia)* yang meliputi negara Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Subkawasan kedua adalah Asia Tenggara Kepulauan atau Kemaritiman *(Islands or Maritime Southeast Asia)* yang meliputi negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Terdapat perbedaan karakteristik lingkungan di kedua subkawasan tersebut. Wilayah Asia Tenggara Daratan memiliki sungai yang memanjang, mulai dari pegunungan yang memisahkan Asia Tenggara dari Republik Rakyat Tiongkok dan barat laut India. Karakteristik kedua dari kawasan Asia Tenggara Daratan adalah adanya daratan yang begitu luas dan dipisahkan oleh hutan-hutan di wilayah perbukitan dan pegunungan. Tanah di wilayah ini sangat subur dan sangat cocok bagi kelompok-kelompok etnis yang memiliki kebiasaan bercocok tanam, terutama produk pertanian berupa beras/nasi. Karakteristik ketiga dari subkawasan ini adalah garis pantainya yang panjang. Meskipun wilayah Asia Tenggara Daratan memiliki basis agraris yang kuat, masyarakat yang hidup di kawasan pesisir juga menjalin hubungan dagang melalui laut yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Di sisi lain, wilayah subkawasan Asia Tenggara Kepulauan atau Kemaritiman sangat beragam, mulai dari pulau-pulau besar (seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Luzon) hingga ke pulau-pulau kecil yang tersebar di sejumlah negara, misalnya Indonesia dan Filipina. Sebagian besar wilayah subkawasan Asia Tenggara Kepulauan atau Kemaritiman terdiri atas hutan-hutan yang membentang hingga ke dataran tinggi. Masyarakat di subkawasan ini lebih terbiasa menggunakan transportasi air atau laut karena lebih mudah. Laut yang menghubungkan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdekat mendorong adanya karakteristik budaya khusus, terbukti misalnya dengan adanya kemiripan bahasa. Masyarakat di wilayah ini biasanya juga memperoleh pengaruh agama dan budaya yang sama. Laut di wilayah subkawasan Asia Tenggara Kepulauan atau Kemaritiman yang tergolong dangkal dan hangat membuat wilayah ini menjadi lingkungan yang ideal bagi ikan, terumbu karang, rumput laut, dan berbagai hasil laut lainnya. Wilayah ini juga memiliki banyak gunung-gunung berapi dan rentan mengalami gempa bumi.

Masyarakat Asia Tenggara memiliki berbagai cara untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa pramodern, terdapat banyak kelompok nomaden (kelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, biasanya mereka berpindah pada musim tertentu ke tempat tertentu, sesuai dengan keperluan untuk bertahan hidup) yang tinggal di perahu-perahu kecil dan biasanya dikenal dengan sebutan “orang laut”. Wilayah hutan-hutan lebat menjadi rumah bagi sejumlah masyarakat adat yang sebagian memiliki kebiasan berpindah tempat juga. Meskipun sebagian besar mengonsumsi nasi, masih ada sejumlah kelompok masyarakat yang mengonsumsi sagu, jagung, dan umbi-umbian sebagai makanan pokoknya.

Sekretariat ASEAN [6] melaporkan bahwa jumlah total populasi di kawasan ASEAN pada tahun 2018 sekitar 649.071.500 jiwa, yang merupakan 8,5% dari total penduduk dunia. Indonesia masih menempati posisi sebagai negara dengan jumlah populasi tertinggi (265.015.300 jiwa) dan diikuti oleh Filipina (105.598.600 jiwa), Vietnam (94.666.000 jiwa), Thailand (67.831.600), Myanmar (53.625.000 jiwa), Malaysia (32.385.000 jiwa), Kamboja (15.981.800 jiwa), Laos (6.887.100 jiwa), Singapura (5.638.700 jiwa), serta Brunei Darussalam (442.400 jiwa). ASEAN merupakan kawasan yang dinamis karena tingginya jumlah populasi masyarakat yang ada dalam kelompok usia produktif. Persentase demografi di ASEAN berdasarkan usia adalah sebagai berikut.

a. Usia 0–4 tahun sebesar 8,8%
b. Usia 5–19 tahun sebesar 25,7%

---

6 Data statistik lengkap mengenai ASEAN oleh Sekretariat ASEAN dapat diunduh melalui sumber https://www.ASEANstats.org/wp-content/uploads/2019/01/asyb-2018.pdf dan https://www.ASEANstats.org/wp-content/uploads/2018/12/ASEAN-Key-Figures-2018.pdf https://www.ASEANstats.org/wp-content/uploads/2019/11/ASEAN_Stats_Leaflet_2019.pdf

c. Usia 20–54 tahun sebesar 50,4%
d. Usia 55–64 tahun sebesar 8,5%
e. Usia 65 tahun lebih sebesar 6,7%

Salah satu karakteristik khusus kawasan Asia Tenggara adalah keragaman budayanya. Terdapat ribuan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di kawasan ini dan memperoleh pengaruh dari sejumlah negara di luar kawasan Asia Tenggara, seperti Arab, Tiongkok, Eropa, dan India. Akulturasi budaya yang terjadi di Asia Tenggara telah berlangsung selama ratusan tahun sehingga melahirkan kekhasan tersendiri. Asia Tenggara juga memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. Negara seperti Indonesia dan Malaysia didominasi oleh populasi beragama Islam, sementara Filipina didominasi oleh masyarakat yang beragama Katolik. Di sisi lain, Thailand menjadi salah satu perkembangan Theravada Buddha dan Vietnam menganut kepercayaan Buddha dengan tradisi Mahayana.

Kemampuan ASEAN untuk mengelola iklim perdamaian di tengah berbagai perbedaan dan keragaman masyarakatnya mendorong kemakmuran kawasan ini. Sekitar 82,7% populasi ASEAN telah memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sekitar 76,2% memiliki akses terhadap peningkatan sanitasi pada tahun 2017. ASEAN pun berhasil menekan tingkat pengangguran hingga 3,8% (2018). ASEAN juga memiliki tingkat literasi yang cukup tinggi dengan total tingkat literasi di seluruh kawasan pada tahun 2016 mencapai 94,9%.

Pada tahun 2018, pertumbuhan PDB ASEAN telah mencapai 3 triliun USD dengan rata-rata PDB per kapita mencapai 4,601.0 USD dan pertumbuhan PDB mencapai 5,2%, lebih tinggi daripada rata-rata PDB secara global yang berada pada kisaran angka 3,3%. Pada periode yang sama, total perdagangan kawasan mencapai 2.816,7 miliar USD dengan nilai perdagangan intra-ASEAN sebesar 590,4 miliar USD (23% dari total perdagangan). Nilai perdagangan intra ASEAN masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai perdagangan ASEAN dengan sejumlah negara mitra utama seperti RRT (441,6 miliar USD), Uni Eropa (261,3 miliar USD), Amerika Serikat (235,2 miliar USD), Jepang (219 miliar USD), Korea Selatan (153 miliar USD), India (73,6 miliar USD), serta Australia dan Selandia Baru (68,7 miliar USD). Hal ini menjadikan ASEAN sebagai ekonomi ke-6 terbesar dunia dan ke-3 terbesar di Asia. ASEAN bahkan diprediksi akan menjadi ekonomi ke-4 terbesar dunia pada tahun 2050.[7] Rata-rata pertumbuhan ekonomi ASEAN pada tahun 2007–2015 mencapai angka 5,2% yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. [8]

[7] Sumber: Sekretariat ASEAN, *ASEAN Economic Integration Brief*, No.1/June 2017 Edition, diunduh dari https://ASEAN.org/storage/2019/06/AEIB_5th_Issue_Released.pdf

[8] Sumber: Sekretariat ASEAN, *ASEAN Statistical Leaflet: Selected Key Indicators* 2016, diunduh dari http://en.aecvcci.vn/Uploaded/Users/Admin/files/2018/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

2. Profil Negara Anggota ASEAN

a. Brunei Darussalam *(Brunei Darussalam)*





Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Sumber Foto: https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/brunei-celebrates-golden-jubilee-what-to-know-about-sultan-hassanal-bolkiah

Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	7 Januari 1984
Kepala Negara	:	Sultan Haji Hassanal Bolkiah Sultan dan Perdana Menteri Brunei Darussalam (sejak 5 Oktober 1967 – sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana menteri Haji Hassanal Bolkiah Sultan dan Perdana Menteri Brunei Darussalam (sejak 1 Januari 1984 – sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Sistem monarki/kesultanan
Bentuk Negara	:	Monarki absolut
Ibu Kota	:	Bandar Seri Begawan
Bahasa	:	Melayu (bahasa resmi), Inggris, dan Mandarin
Mata Uang	:	Dolar Brunei (BND)
Hari Nasional	:	23 Februari (hari kebangsaan) 15 Juli (hari lahir Sultan Brunei Darussalam)
Lagu Kebangsaan	:	Allah Peliharakan Sultan (*God Bless His Majesty*)
Letak Astronomis	:	4°LU–6°LU dan 114°BT–115°BT
Luas Wilayah	:	5.765 km2 dengan garis pantai sepanjang 161 km menghadap Laut China Selatan dan Teluk Brunei
Jumlah penduduk	:	442.400 (2018) [9]
Suku Bangsa/Etnis	:	Melayu 65,7%, Tionghoa 10,3%, etnis lainnya 24% (2018)[10]
Agama	:	Islam 78,8%, Kristen 8,7%, Buddha 7,8%, agama lainnya 4,7%
Iklim	:	Tropis khatulistiwa
Produk Ekspor	:	Bahan bakar mineral, mesin, dan peralatan transportasi, bahan kimia, produk manufaktur[11]

9 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam, http://www.depd.gov.bn/SitePages/Population.aspx

10 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam,http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/POP/2018/Rep_MidYr_2018.pdf

11 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam,http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/IMTS/2019/IMTS_Jun2019.pdf

Produk Impor	:	Mesin dan peralatan transportasi, bahan bakar mineral, produk manufaktur, makanan[12]
Tujuan Ekspor	:	Jepang (36,7%), Singapura (15,3%), Australia (10,6%), Thailand (9,8%), Filipina (8,6%), Malaysia (8,4%), RRT (6,4%)[13]
Asal Impor	:	Kazakhstan (15,9%), Iraq (13,6%), Singapura (11,5%), Malaysia (10,1%), RRT (8,4%), Jepang (5%), Jerman (5%), Amerika Serikat (4,3%), India (4,2%), Italia (3,7%)[14]
PDB	:	US$ 13.557 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 30.645
Destinasi Wisata	:	Brunei Muara, Tutong, Beliat, Temburong, Taman Jerudong, Tasik Merimbun[15]
Kode Domain Internet	:	.bn
Kode Telepon	:	673

Sejarah Singkat Brunei Darussalam

Sultan Brunei yang pertama, Awang Alak Betatar, memeluk agama Islam pada abad ke-14 yang kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Pada abad ke-15 dan ke-16, Kesultanan Brunei memiliki wilayah luas yang mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan hingga sebagian Filipina. Sejak 1847, Brunei Darussalam menandatangani kerja sama perdagangan dengan Inggris. Pada 1888, Brunei Darussalam secara resmi menjadi negara di bawah perlindungan Kerajaan Inggris. Namun, luas wilayah Kesultananan Brunei Darussalam semakin menyusut. Brunei Darussalam baru memiliki konstitusi pertama pada tahun 1959. Pada tahun 1971, Brunei Darussalam dan Inggris Raya mengamandemen Konstitusi 1959 yang memberikan kekuasaan kesultanan dalam memerintah di dalam negeri, sedangkan untuk hubungan luar negeri dan pertahanan masih dipegang oleh Kerajaan Inggris.

Pada tahun 1979, Brunei Darussalam menandatangani Perjanjian Persabahatan dan Kerja Sama yang membuka jalan menjadi negara yang independen. Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan sebagai negara independen dan berdaulat dari Kerajaan Inggris pada 1 Januari 1984. Sultan Brunei Darussalam memegang kewenangan tertinggi otoritas eksekutif.

Sistem Politik

Pada tahun 1959 Brunei Darussalam memperoleh kewenangan untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri dan mengadopsi konstitusi, meskipun Inggris mempertahankan yurisdiksi atas kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Upaya terbatas pada pemerintah perwakilan terpilih di bawah konstitusi ini ditinggalkan pada tahun 1970. Setelah Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan penuh pada 1 Januari 1984, sebuah kesultanan Islam didirikan, dan konstitusi mengalami amandemen yang signifikan.

---

12 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam,http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/IMTS/2019/IMTS_Jun2019.pdf

13 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam,http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/IMTS/2019/IMTS_Jun2019.pdf

14 Sumber: Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam,http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/IMTS/2019/IMTS_Jun2019.pdf

15 Sumber: Pusat Informasi Pariwisata Brunei Darussalam, https://bruneitourism.com/places-to-go/

Kewenangan tertinggi ada pada sultan yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai perdana menteri, ia memimpin dewan menteri (kabinet) dan memiliki dewan penasihat yang terdiri atas dewan keagamaan, dewan penasihat khusus, dewan suksesi, dan dewan legislatif. Para anggota dewan ini ditunjuk oleh sultan.

Kondisi Geografis

Brunei Darussalam terdiri atas dataran pantai sempit di utara yang memberi jalan ke perbukitan terjal di selatan. Titik tertinggi negara ini adalah Puncak Pagon (1.850 meter) di tenggara. Belait adalah sungai terbesar di negara ini. Tanah Brunei Darussalam sangat lapuk, sangat lindi, dan umumnya tidak subur. Tanah aluvial yang lebih kaya ditemukan di sepanjang sungai dan di beberapa bagian dataran banjir pantai dan ini menawarkan potensi pertanian terbaik.

Markah*/Landmark*

Istana Nurul Iman merupakan kediaman resmi Sultan Brunei Darussalam. Markah lainnya di Brunei Darussalam yang penting adalah Dewan Majlis dan Lapau yang menggabungkan arsitektur budaya Barat dan Melayu.[16]



Gambar 2.16 Istana Nurul Iman yang Terletak di Bandar Sri Begawan
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Sosial Budaya

Salah satu contoh cerita rakyat dari Brunei Darussalam adalah Nakhoda Manis. Kisah ini merupakan cerita rakyat yang sama dengan Si Tanggang dari Malaysia dan Malin Kundang dari Indonesia. Cerita rakyat ini bercerita tentang seorang anak yang durhaka terhadap ibunya sehingga ibunya mengutuknya menjadi sosok batu Nakhoda Manis yang terletak di tepi laut Jong Batu.

16 Sumber: Information Department, Prime Minister's Office Brunei Darussalam, http://www.information.gov.bn/Media%20Document%20Library/Brunei%20Today/brunei%20in%20brief_FINAL%202.pdf

Biro Bahasa dan Sastra di Brunei Darussalam mempromosikan pengembangan sastra dan cerita rakyat serta menerbitkan buku teks dalam bahasa Melayu dan Inggris untuk digunakan di sekolah dasar dan menengah. Karya tulis berupa sajak sangat populer di kalangan anak sekolah. Karya sastra tradisional yang paling terkenal adalah puisi epik Sya'ir Awang Simaun, yang menceritakan seorang pahlawan budaya.

Brunei Darussalam memiliki pakaian tradisional yang serupa dengan wanita Melayu di Malaysia, yaitu baju kurung dan baju Melayu. Baju kurung adalah blus longgar selutut yang biasanya dikenakan di atas rok panjang dengan lipatan di samping. Baju kurung biasanya dipadankan pula dengan kain tradisional seperti songket atau batik. Biasanya, pakaian tradisional ini dilengkapi dengan selendang atau tudung. Pakaian tradisional untuk pria Brunei Darussalam adalah baju Melayu. Baju Melayu adalah tunik longgar yang dikenakan di atas celana panjang dan biasanya dilengkapi dengan sampin (sarung pendek yang melilit pinggul).

Brunei Darussalam sangat terkenal dengan kerajinan logamnya, khususnya selama puncak kekuasaan Kesultanan Brunei Darussalam pada abad ke-16 dan ke-17. Para perajin kuningan dan perak sangat dihargai karena keahlian mereka. Mereka menghasilkan gong, meriam, dan barang-barang lainnya yang sering kali diembos dengan desain ular dan binatang lain. Pekerjaan logam Brunei Darussalam telah lama menjadi barang penting dalam perdagangan, baik di dalam maupun di luar batas kesultanan.

Gong merupakan alat musik tradisional yang digunakan dalam berbagai acara. Ansambel bangsawan kerajaan menggabungkan seperangkat gong yang dikenal dengan sebutan serunai dan drum untuk menandai acara-acara penting istana, misalnya saja acara penobatan, pernikahan, kematian, dan penerimaan tamu terhormat. Para bangsawan juga terkadang menggunakan alat musik ini untuk mengumumkan waktu ibadah masyarakat muslim. Sebuah ansambel yang disebut *gulintangan* digunakan dalam pagelaran musik dalam bahasa Melayu dan berbagai komunitas adat lainnya. Alat musik yang disebut hadrah sering dimainkan di pernikahan atau untuk menerima anggota keluarga kerajaan dalam acara-acara resmi. Tarian sosial Melayu populer dilakukan dengan iringan kendang besar, yang disebut gendang, yang sering dimainkan oleh perempuan.

Beberapa kuliner yang terkenal dari Brunei Darussalam adalah *ambuyat* (makanan pokok berasal dari olahan tepung sagu dan air), *nasi katok* (nasi dengan lauk ayam goreng dan sambal), *kelupis* (kue beras ketan yang berisi udang kering atau ikan teri), *pulut panggang*, *ayam bamboo*, *selurut* (jajanan terbuat dari sagu dan beras yang direndam dengan air garam dan disajikan dengan kuah santan), *penyaram*, dan *tapai.*

b. Kamboja *(Kingdom of Cambodia)*



Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	30 April 1999
Kepala Negara	:	Raja Norodom Sihamoni-Raja Kamboja (sejak 14 Oktober 2004 – sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana menteri Hun Sen-Perdana Menteri Kamboja (sejak 26 Desember 1984– sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Monarki konstitusional
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Phnom Penh
Bahasa	:	Khmer (bahasa resmi)
Mata Uang	:	Riel (KHR)
Hari Nasional	:	9 November
Lagu Kebangsaan	:	Nokoreach (*Royal Kingdom*)
Letak Astronomis	:	10°LU–15°LU dan 102°BT–108°BT
Luas Wilayah	:	181.040 km^2
Jumlah penduduk	:	16,24 juta jiwa[17]
Suku Bangsa/Etnis	:	Khmer 97,6%, Cham 1,2%, Tionghoa 0,1%, Vietnam 0,1%, lain-lain 0,9%(2018)
Agama	:	Buddha (resmi) 96,9%, Islam 1,9%, Kristen 0,4%, lain-lain 0,8% (2018)
Iklim	:	Tropis basah dan kering
Produk Ekspor	:	Garmen, alas kaki, karet, tekstil, produk ikan, beras
Produk Impor	:	Kendaraan, minyak tanah, emas, bahan konstruksi, sepeda motor, rokok, baja, pakaian, semen
Tujuan Ekspor	:	Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, RRT, Thailand, Vietnam, Hongkong, Korea Selatan (2017)[18]
Asal Impor	:	RRT, Thailand, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Indonesia (2017)
PDB	:	US$ 24.634 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 1.541
Destinasi Wisata	:	Siem Reap (Candi Angkor Wat), Phnom Penh, Sihanoukville
Kode Domain Internet	:	.kh
Kode Telepon	:	855



Kepala Negara
Sumber Foto: https://www.norodomsihamoni.org/



Kepala Pemerintahan
Sumber Foto: https://pressocm.gov.kh/en/archives/5901

[17] Sumber: Bank Dunia, https://data.worldbank.org/country/cambodia
[18] Sumber: Kementerian Perdagangan Kamboja

Sejarah Singkat Kamboja

Kerajaan Kamboja merdeka pada 9 November 1953 setelah sebelumnya pernah dijajah Prancis dalam kurun waktu 90 tahun lamanya. Raja Norodom Sihanouk memimpin Kamboja setelah merdeka dari Prancis. Kerajaan Kamboja dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan sebelumnya, yaitu Kekaisaran Khmer yang dulunya pernah menguasai daerah semenanjung Indochina pada abad ke-11 hingga abad ke-14.

Sejarah kelam bangsa Kamboja terjadi pada tahun 1975 sampai 1979 ketika Kamboja dikuasai rezim komunis Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot. Rezim ini melakukan pengusiran penduduk dari kota-kota, penghapusan agama, penghapusan kepemilikan pribadi, uang, dan pasar. Selain itu, terjadi genosida yang menyebabkan pembantaian sekitar 25% atau sekitar 2 juta penduduk Kamboja pada masa itu. Target pembunuhan adalah kapitalis kaya, profesional, intelektual, pegawai pemerintahan, termasuk sebagian besar anggota rezim Lon Nol, bersama dengan etnis minoritas seperti Tionghoa, Vietnam, Lao, dan Cham. Pada lokasi ladang pembantaian atau *Killing Fields* yang berada di Desa Cheoung Ek bagian selatan Kota Phnom Penh didirikan tugu peringatan yang disebut *Cheoung Ek Genocidal Center.*

Genosida akhirnya berhenti pada tahun 1979 setelah invasi Vietnam ke Kamboja pada 25 Desember 1978. Vietnam kemudian menarik tentaranya dari Kamboja pada September 1989. Selama periode itu negara ini terlibat dalam konflik politik yang berkepanjangan antarberbagai faksi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prancis, Indonesia, Jepang, Australia, ASEAN, dan berbagai negara lain berperan penting dalam proses perdamaian, rekonsiliasi, dan penegakan kedaulatan di Kamboja. Pada 23 Oktober 1991, seluruh faksi yang bertikai menandatangai *Peace Paris Agreement* pada *Paris Conference on Cambodia.* Pada konferensi tersebut, Prancis dan Indonesia bersama-sama menjadi ketua *(co-chair).* Pemilihan umum di Kamboja diselenggarakan untuk pertama kali dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 1993 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC).

Sistem Politik

Bentuk pemerintahan Kamboja adalah monarki konstitusional. Kepala negara dijabat oleh raja, sementara kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri. Pada 29 Oktober 2004, Raja Norodom Sihamoni naik tahta dan sejak itu menggantikan ayahnya, Raja Norodom Sihanouk.

Kepala pemerintahan saat ini dijabat oleh Perdana Menteri Hun Sen yang terpilih kembali sebagai perdana menteri pada periode 2018-2023 melalui pemilihan umum yang diselenggarakan pada 29 September 2018. Hun Sen telah menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja sejak 14 Januari 1985 dan ia merupakan perdana menteri terlama di Kamboja dan di dunia.

Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan dibantu dewan menteri (menu) yang terdiri atas wakil perdana menteri, menteri senior, menteri dan *secretary of state*.

Sistem parlemen Kamboja adalah bikameral yang anggotanya terdiri atas *national assembly* (125 orang) dan senat (62 orang).

Kondisi Geografis

Negara Kamboja memiliki wilayah perbatasan darat dengan Thailand di sebelah barat, Vietnam di sebelah timur, Laos di sebelah utara, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Kamboja merupakan satu di antara negara lain yang wilayahnya dilewati aliran Sungai Mekong yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia.

Markah/*Landmark*



Gambar 2.17 Monumen Kemerdekaan (Vimean Ekareach) di Phnom Penh, Kamboja
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Kemenangan Kamboja melawan penjajah Prancis ditandai dengan Monumen Kemerdekaan (*Vimean Ekareach*/*Independence Monument*) yang mulai dibangun pada tahun 1958 dan diinaugurasikan pada 9 November 1962, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Kamboja. Monumen ini menjadi markah yang terletak di jantung ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

Sosial Budaya [19]

Salah satu festival budaya yang ada di Kamboja adalah Festival Air *(Bon Om Touk)*. Festival Air merupakan lomba perahu di Sungai Tonle Sap pada setiap November. Festival yang berlangsung 3 hari ini diselenggarakan di ibu kota Phnom Penh dan biasanya dibuka/ditutup secara resmi oleh raja. Rakyat dari seluruh provinsi berkumpul di bantaran sungai untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada tim perahu dari daerahnya. Festival ini juga menjadi tontonan yang menarik bagi turis mancanegara.

[19] Sumber: Cambodian Community Day, http://www.cambodiancommunityday.org/

KAMBOJA TRIVIA

a) **Kamboja memiliki tarian yang masuk sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO sejak 2008, yaitu *royal ballet of Cambodia* yang merupakan tarian klasik Khmer. Tarian ini lekat dengan Kerajaan Khmer selama ratusan tahun dan biasanya dipertunjukkan pada saat upacara-upacara kerajaan seperti penobatan raja, pernikahan, pemakaman, atau hari-hari nasional. Tarian yang penuh makna ini menceritakan legenda yang berhubungan dengan asal mula bangsa Khmer sehingga rakyat Kamboja merasakan tarian ini sebagai lambang budaya Khmer.**

   Empat karakter yang ada dalam tarian klasik ini adalah Neang atau perempuan, Neayrong atau laki- laki, Yeak atau raksasa, dan Sva atau kera. Tiap karakter memiliki warna, kostum, rias wajah, dan topeng yang berbeda-beda. Orkestra yang mengiringi tarian ini serta paduan suara perempuan yang menceritakan plot tarian dan menonjolkan emosi para penari yang dianggap sebagai para pembawa pesan raja kepada dewa-dewa dan para leluhur.

   Saat pemerintahan Khmer Merah pada era 70-an, tarian ini hampir mengalami kepunahan karena banyak penarinya yang menjadi korban pembantaian. Namun, seiring dengan jatuhnya rezim Khmer Merah, *royal ballet of Cambodia* kembali hidup dan menjadi identitas pemersatu bangsa Kamboja.

b) **Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di Kamboja setelah rezim Khmer Merah berakhir dan masuknya militer Vietnam pada 25 Desember 1978. Indonesia aktif memediasi konflik politik yang terjadi di antara empat faksi di Kamboja melalui serangkaian pertemuan, di antaranya *Jakarta Informal Meeting (JIM) I* tanggal 25–28 Juli 1988 dan JIM II tanggal 16–18 Februari 1989. Dari berbagai proses perundingan tersebut dan atas desakan internasional, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja pada akhir September 1989. Puncak dari proses perdamaian ini, Indonesia dan Prancis berperan sebagai *co-chair* pada Konferensi Paris pada 23 Oktober 1991 yang menghasilkan *Paris Peace Agreement* yang menandai berakhirnya konflik politik di Kamboja secara komperehensif. Pada tahun 1992–1993 Indonesia juga berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian dalam menegakkan kedaulatan Kamboja sebagai bagian misi Perserikatan Bangsa-Bangsa.**

Selain itu, Kamboja juga memiliki beberapa tari tradisional yang terkenal, yaitu *robam tep apsara, robam choun por (blessing dance),* dan *Khmer folk dance.* Musik tradisional masyarakat Khmer biasanya terbagi menjadi tiga kategori: (1) *pin peat* yang merupakan musik seremonial yang pada zaman dahulu dimainkan di lingkungan kerajaan; (2) *phleng kar* yang biasanya dimainkan di acara pernikahan; dan (3) *mohori* yang biasanya dimainkan melalui ansambel dari berbagai alat musik yang menggunakan senar. Pada zaman dahulu *mohori* dimainkan di kalangan kerajaan yang kemudian berkembang menjadi musik populer di masyarakat.

Sebagian besar cerita rakyat Kamboja menggunakan tokoh-tokoh hewan untuk menggambarkan nilai dan kearifan lokal. Salah satu cerita rakyat Kamboja yang paling terkenal adalah kumpulan cerita klasik “Kisah si Kelinci”.

Beberapa kuliner yang berasal dari Kamboja adalah *fish amok, nom banh chok*, dan *lap khmer* (salad daging sapi yang dibumbui dengan racikan jeruk nipis). Kamboja memiliki pakaian nasional yang serupa dengan sejumlah negara di Asia Tenggara yang disebut dengan *sampot* atau *sarong*.

c. Indonesia (*Republic of Indonesia*)





Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Sumber Foto: https://setneg.go.id/

Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	8 Agustus 1967
Kepala Negara	:	Presiden Joko Widodo Presiden Republik Indonesia (sejak 20 Oktober 2014 – sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Presiden Joko Widodo Presiden Republik Indonesia (sejak 20 Oktober 2014 – sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Presidensial
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Jakarta
Bahasa	:	Bahasa Indonesia
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Hari Nasional	:	17 Agustus (Hari Kemerdekaan)
Lagu Kebangsaan	:	Indonesia Raya
Letak Astronomis	:	6°LU–11°LS dan 95°BT–141°BT
Luas Wilayah	:	1.904.569 km^2
Jumlah Penduduk	:	267.663.435 jiwa[20]
Suku Bangsa/Etnis	:	Jawa 40,2%, Sunda 15,5%, Batak 3,6%, Betawi 2,9%, Madura 3%, Minangkabau 2,7%, Bugis 2,7% Melayu 2,3% (Hasil sensus penduduk 2010)[21]
Agama	:	Islam 87,2%, Kristen 7%, Katolik 2,9%, Hindu 1,7%, agama lainnya 0,9% (Termasuk di dalamnya Buddha dan Kong Hu Cu), (Hasil sensus penduduk 2010)[22]
Iklim	:	Tropis
Produk Ekspor	:	Udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet dan produk karet, TPT, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan bermotor, furnitur, kerajinan, produk perikanan, obat herbal, produk kulit, makanan kemasan, perhiasan, minyak nabati, rempah, alat tulis nonkertas, peralatan medis[23]
Produk Impor	:	Produk batu bara dan pengilangan minyak bumi, pencetakan dan reproduksi media rekaman, minuman, barang kayu/gabus/anyaman, furnitur, pakaian jadi, pengolahan tembakau, kulit dan alas kaki, barang galian bukan logam, produk obat kimia dan tradisional, kertas, alat angkutan, karet barang logam bukan mesin, kendaraan bermotor,

[20] Sumber: The World Bank https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=ID
[21] Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010
[22] Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk 2010
[23] Sumber: Kementerian Perdagangan RI, http://ppei.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/

		peralatan listrik, tekstil, makanan, logam dasar, barang elektronik dan optik, mesin, bahan kimia[24]
Tujuan Ekspor	:	Amerika Serikat, RRT, Jepang, Singapura, India, Malaysia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Belanda, Vietnam, Australia, Jerman, Swiss, Pakistan, Uni Emirat Arab, Inggris, Italia, Saudi Arabia, Spanyol, Rusia, Bangladesh, Brazil, Belgia, Mesir, Turki, Prancis, Meksiko[25]
Asal Impor	:	Brazil, RRT, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, India, Italia, Australia, Kanada, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Argentina, Inggris, Belgia, Austria, Selandia Baru, Swiss, Belanda, Rusia, Filipina[26]
PDB	:	US$ 1.042.173,30 juta[27]
PDB Per Kapita	:	US$ 3.927[28]
Destinasi Wisata	:	Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Taman Wisata Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai[29]
Kode Domain Internet	:	.id
Kode Telepon	:	62

Sejarah Singkat Indonesia

Sebelum dikenal dengan nama Indonesia, Indonesia yang dikenal dengan sebutan Nusantara mengalami masa penjajahan yang ditandai dengan kolonisasi oleh Portugis (1511–1659), Spanyol (1521–1646), Belanda (1602–1942), dan Jepang (1942–1945). Wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda pada masa pendudukan Kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Semenjak masa penjajahan oleh Belanda, berbagai pergerakan nasional muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan nasional tersebut bermunculan di seluruh penjuru negeri, lahir dari berbagai latar belakang dan usia, hingga terus berlanjut sampai pada masa pendudukan oleh Jepang, sampai pada akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden Indonesia yang pertama dengan Moh. Hatta sebagai wakilnya.

Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat, tidak terkecuali golongan muda. Datang dari berbagai macam suku dan golongan, para pemuda menyadari mereka butuh bersatu untuk bisa memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun sempat sulit melunturkan ego kedaerahan masing-masing, para pemuda ini menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ada di atas segalanya. Pada 28 Oktober 1928 pemuda dari berbagai macam suku dan golongan berkumpul di dalam Kongres Pemuda II. Pada hari itu Sumpah Pemuda lahir dan menjadi momentum awal pentingnya peranan dan persatuan pemuda dalam perjuangan kemerdekan.

---

24 Sumber: Kementerian Perindustrian RI, https://kemenperin.go.id/statistik/peran.php
25 Sumber: Kementerian Perindustrian RI, https://kemenperin.go.id/statistik/negara.php?ekspor=1
26 Sumber: Kementerian Perindustrian RI, https://kemenperin.go.id/statistik/negara.php
27 Sumber: Bank Dunia, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID&view=chart
28 Sumber: Badan Pusat Statistik RI, Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018, diunduh dari file:///C:/Users/KEMENLU2019-248/Downloads/BRSbrsInd-20190206115050.pdf
29 Sumber: Kementerian Pariwisata RI, http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-desain-arsitektur-tic-promosikan-10-destinasi-pariwisata-prioritas-dan-kek-likupang

Indonesia juga terus mengalami tantangan dalam menjaga kedaulatannya sebagai negara yang merdeka pada masa pasca kemerdekaan. Selain itu, Indonesia mengalami perubahan dalam bentuk demokrasi dan konstitusi dasarnya dari tahun 1945–1959, sampai Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 8 Agustus 1967, dengan tumbuh sebagai bangsa yang semakin besar dan terus menunjukkan kontribusinya di panggung internasional, Indonesia bersama dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand mendirikan organisasi ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya di lingkup regional Asia Tenggara.

Sistem Politik

Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional dan sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, didampingi oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali. Presiden Joko Widodo berhasil memenangkan pemilihan umum pada April 2019 silam untuk memastikan berlanjutnya masa pemerintahan ke periode II. Pada periode ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh K.H. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Jusuf Kalla sejak 2014–2019. Dalam menjalankan tugasnya, presiden mengangkat jajaran menteri yang akan membantu menjalankan pemerintahan. Presiden, wakil presiden, serta menteri yang menjadi badan eksekutif negara diawasi oleh parlemen selaku badan legislatif dalam menunaikan tugasnya.

Parlemen Indonesia terdiri atas dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seluruh anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga tinggi negara. Anggota DPR dan DPD juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum berupa kontestasi multipartai. Tahun 2019 merupakan tahun bersejarah dalam politik Indonesia. Saat itu pemilihan umum diselenggarakan dengan proses pemilihan umum serentak dalam menentukan presiden dan wakil presiden serta memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang akan menjabat pada periode 2020–2024.

Kondisi Geografis

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan luas 1.916.862,20 km² dan jumlah pulau sebanyak 16.506 pulau pada tahun 2018. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Benua Asia, Benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Brunei Darussalam. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan negara Australia dan Timor Leste, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini.

Letak Indonesia yang dilintasi oleh garis khatulistiwa membuat Indonesia memiliki iklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan suhu yang relatif hangat sepanjang tahun sehingga ideal bagi vegetasi hutan hujan tropis. Indonesia menempati urutan ketiga negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia dan memiliki keberagaman flora dan fauna yang cukup tinggi. Selain itu, sejumlah wilayah Indonesia merupakan daerah Cincin Api Pasifik *(ring of fire)* dan merupakan negara ketiga dengan jumlah gunung berapi terbanyak di dunia, serta dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Keadaan geografis Indonesia yang demikian membuat Indonesia cukup rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.

Markah/*Landmark*

Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang dibangun antara tahun 780–840 Masehi oleh Kerajaan Sailendra, dan merupakan salah satu dari banyaknya peninggalan dari masa persebaran Kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Candi Borobudur merupakan candi atau kuil terbesar di dunia dengan luas sekitar 2.500 m² dan sekaligus merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang dilindungi dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia sejak tahun 1991 karena mengandung nilai sejarah yang tinggi dan memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Ada 2.672 panel relief, 72 stupa, dan 504 arca patung Buddha yang terdapat di sekeliling dan di dalam Candi Borobudur. Candi Borobudur masih kerap digunakan sampai kini untuk kegiatan keagamaan Buddha, khususnya untuk memperingati Trisuci Waisak oleh umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara.



Gambar 2.18 Salah Satu Arca Patung Buddha dengan Sikap Meditasi yang Terdapat di Candi Borobudur
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Sosial Budaya

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Penduduknya yang datang dari berbagai macam etnis dan latar belakang memberikan corak dan warna berbeda pada negeri ini. Ragam budaya yang lahir di tanah air hadir dengan pesan dan kisahnya masing-masing. Salah satu kisah atau cerita rakyat yang paling terkenal dan diceritakan turun-temurun di Indonesia adalah kisah Malin Kundang dari Sumatra Barat. Kisah Malin Kundang menceritakan seorang anak yang hidup miskin bersama ibunya. Saat beranjak dewasa, Malin Kundang pergi mengarungi laut meninggalkan kampungnya bersama seorang saudagar kaya untuk mencari peruntungan di tempat lain. Nasib baik datang kepada Malin sampai akhirnya ia menjadi

saudagar kaya dari usahanya yang dijalankannya. Hidupnya berbalik. Ia menjadi seorang saudagar kaya raya dan menikahi putri saudagar kaya lainnya, sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehnya. Karena malu akan masa lalunya, ia mengingkari ibunya yang menunggu kepulangannya di kampung dan berkata bahwa ibunya telah meninggal saat melahirkan dirinya. Namun, nasiblah yang membawa Malin pulang ke kampungnya. Takdir mempertemukan istrinya dengan ibunya saat mereka berkunjung dan ketika ibunya datang memeluk Malin dengan penuh rindu. Malin Kundang mengingkari bahwa itu adalah ibunya dan mengatakan juga bahwa ibunya telah meninggal. Karena begitu sedih mendengar anaknya, sang ibu tanpa menyadari berdoa, "Ya Tuhan, sadarkan anak hamba. Ia telah mengingkariku sebagai ibu yang pernah melahirkan dan menyusuinya." Tiba-tiba, petir menyambar tepat di depan kaki Malin. Tubuh Malin langsung kaku. Konon kabarnya, batu yang menyerupai Malin Kundang masih dapat ditemui di Pantai Air Manis, di sebelah selatan Kota Padang, Sumatra Barat.

Masih dari tanah Sumatra, kuliner Indonesia mendunia. Masakan rendang menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal akan empuknya daging dan rasa yang meresap. Proses memasak rendang yang membutuhkan waktu lama juga menambah nilai keunikan pada kuliner ini. Namun, dalam hal kuliner, Indonesia tidaklah kekurangan. Setiap wilayah memiliki masakan dengan cita rasa unik satu yang berbeda dengan masakan dari wilayah lainnya yang dituangkan dalam kreativitas kuliner masing-masing. Misalnya, Yogyakarta dengan gudeg, masakan khas Manado seperti masak cakalang dan dabu-dabu, atau masakan Sunda seperti empal gentong dan mie kocok. Dalam hal ini, sungguh budaya Indonesia tecermin dalam kuliner.

Layaknya kuliner, pakaian tiap-tiap wilayah di Indonesia pun beragam. Baik dari bahan, cara mengenakan, maupun waktu mengenakan, pakaian tradisional Indonesia berhasil menuangkan kekayaan budaya Indonesia dalam bentuk busana. Salah satu budaya pakaian tradisional Indonesia adalah batik. Proses membatik, yaitu melukis menggunakan malam di atas kain katun dan sutra, membentuk pola yang menceritakan kisah dan budaya tiap-tiap wilayah. Batik sebagai pakaian tradisional merambah hampir seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Pola dan motif yang umum seperti parang dan megamendung sering digunakan untuk pakaian sehari-hari. Eksplorasi pola juga sering digunakan pada kegiatan formal dan acara seperti pernikahan dan atau ritual adat lainnya.

d. Laos (*Lao People's Democratic Republic*)



Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	23 Juli 1997
Kepala Negara	:	Presiden Bounnhang Vorachith Presiden Laos (sejak 20 April 2016 – sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana menteri Thongloun Sisoulith Perdana Menteri Laos (sejak 20 April 2016 - sekarang)



Kepala Negara
Sumber Foto: http://kpl.gov.la/En/Page/Politic/governmentVIII.aspx



Kepala Pemerintahan
Sumber Foto: http://kpl.gov.la/En/Page/Politic/governmentVIII.aspx

Sistem Pemerintahan	:	Parlementer (dengan sistem satu partai)
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Vientiane
Bahasa	:	Lao (bahasa resmi), Prancis, dan Inggris
Mata Uang	:	Kip (LAK) (1 LAK = ± Rp1,6)
Hari Nasional	:	2 Desember 1975 (Hari Republik) 19 Juli 1949 (Hari Kemerdekaan dari Prancis)
Lagu Kebangsaan	:	Pheng Xat Lao (*Hymn of the Lao People*)
Letak Astronomis	:	14°LU–22°LU dan 100°BT–108°BT
Luas Wilayah	:	236.800 km^2
Jumlah Penduduk	:	6.758. 353 jiwa
Suku Bangsa/Etnis	:	Laos 53,2%, Khmou 11%, Hmong 9,2%, Phouthay 3,4%, Tai 3,1%, Makong 2,5%, Katong 2,2%, Lue 2%, Akha 1,8%, etnis lainnya 11,6%
Agama	:	Buddha 64,7%, Kristen 1,7%, tidak beragama 31,4%, agama lainnya 2,1% (estimasi tahun 2015)
Iklim	:	Tropis
Produk Ekspor	:	Hasil tambang, energi listrik, industri garmen, kayu dan produk pertanian
Produk Impor	:	Produk petroleum, gas, kendaraan dan suku cadang, peralatan konstruksi, makanan dan elektronik
Tujuan Ekspor	:	Thailand, RRT, Vietnam, Jepang, Korea, India, Prancis, Jerman dan Amerika Serikat
Asal Impor	:	Thailand, RRT, Vietnam, Jepang dan Korea Selatan
PDB	:	US$ 18.096 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 2.627
Destinasi Wisata	:	Luang Prabang
Kode Domain Internet	:	.la
Kode Telepon	:	856

Sejarah Singkat Laos

Setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953, Kerajaan Laos menemukan dirinya terlibat dalam konflik regional yang dihasilkan dari perjuangan untuk menguasai Vietnam Selatan. Sementara itu, Vietnam Utara mendukung Pathet Lao, sebuah organisasi nasionalis depan dikendalikan oleh Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP).

Pada 2 Desember 1975, rezim komunis Pathet Lao memenangkan perang saudara dan mengakhiri 600 tahun masa kekuasaan Kerajaan Laos. Republik Demokratik Rakyat Laos diproklamirkan, dengan partai tunggal resmi adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) yang berhaluan komunis. LPRP memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos.

Sistem Politik

Sistem pemerintahan Laos adalah kabinet parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Adapun presiden dan wakil presiden dipilih oleh *national assembly* (NA) untuk masa bakti lima tahun, sedangkan perdana menteri dan anggota kabinet ditunjuk oleh presiden atas persetujuan NA yang merupakan majelis tipe Uni-Kameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos.

Kondisi Geografis

Laos merupakan satu-satunya negara yang terkurung daratan *(land-lock country)* di Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan Myanmar, RRT, Kamboja, Thailand, dan Vietnam.

Markah/*Landmark*

Pha That Luang adalah salah satu markah tertua di Laos. Bangunan ini berupa stupa setinggi 44 meter dibagi menjadi tiga tingkat yang setiap tingkatnya menggambarkan setiap ajaran Buddha. Di sekeliling dinding stupa juga dipahatkan patung Lao dan Khmer, termasuk King Jayavarman VII. Stupa ini sejak pendiriannya pada abad ke-3 telah mengalami beberapa kali restorasi.



Gambar 2.19 Pha That Luang (the Great Stupa) Terletak di Ibukota Laos, Vientiane
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Sosial Budaya

Agama Theravada telah banyak memengaruhi kebudayaan Laos. Pengaruhnya dapat terlihat pada bahasa, seni, sastra, seni tari, dan sebagainya. Musik Laos didominasi oleh alat musik nasionalnya, disebut *khaen* (sejenis pipa bambu). Sebuah kelompok musik umumnya terdiri atas penyanyi *(mor lam)* dan seorang pemain *khaen (mor khaen)* bersama pemain rebab dan pemain instrumen lain. *Lam saravane* adalah jenis musik terpopuler di antara musik-musik Laos, tetapi etnis Lao di Thailand telah mengembangkannya menjadi *mor lam sing* yang menjadi salah satu musik tradisional yang paling laku di kancah internasional.

Salah satu contoh cerita rakyat dari Laos adalah "Dua Pemburu yang Beruntung". Kisah ini menceritakan hidup dua kakak beradik yang selalu beruntung saat berburu dan selalu membagikan hasil buruannya kepada penduduk desa. Cerita rakyat ini mengandung pesan moral bahwa kebaikan sering kali akan mendatangkan keberuntungan dalam hidup.

Sebagian besar seni rupa, drama, musikal, dan sastra Laos berasal dari sumber-sumber tradisional keagamaan dan lokal. Namun, di zaman modern, banyak kota — terutama di sepanjang Sungai Mekong — telah terpapar dengan budaya dan tradisi lain, sebagian besar melalui media massa Thailand. Di selatan, pengaruh Khmer pada rakyat Laos sangat kuat; di utara, pengaruh Myanmar dan Thailand sudah jelas terlihat. Instrumen ansambel klasik Laos pada umumnya terdiri atas seperangkat gong bundar yang disetel *(khong vong), xylophone (lanat),* dan instrumen tiupan buluh empat *(pi kaeo).*

Pada tahun 1990-an, pemerintah Laos menghidupkan kembali pertunjukan Ramayana. Para aktor dan penari dilatih di sekolah untuk seni rupa di Vientiane dan sekolah serupa telah didirikan di Luang Prabang. Laos juga memiliki pagelaran budaya tradisional dalam bentuk nyanyian yang menceritakan kisah-kisah lokal. Pertunjukan dengan penyanyi pria atau wanita berimprovisasi atau menyanyikan lagu-lagu standar disertai dengan orkestra instrumental masih diselenggarakan di berbagai perayaan lokal.

Pakaian tradisional wanita Laos adalah gaun yang terbuat dari sutra, katun atau tenunan dengan pola halus serta bordir yang rumit. Pakaian yang dikenal dengan sebutan *sinh* ini biasanya ditenun dengan pola yang rumit di bagian bawah. *Sinh* terdiri atas tiga bagian utama: *hua sinh* di bagian pinggang, *phuen sinh* tubuh rok yang biasanya kosong dan tidak memiliki banyak hiasan, dan *timah sinh* dan batas bawah yang berisi hiasan emas. Ketika wanita Laos memakai *sinh*, mereka akan memadukannya dengan syal yang melingkar di bagian dada.

Salong adalah kostum tradisional untuk pria Laos. *Salong* biasanya dikenakan di pinggang dan diikat dengan berbagai metode. Desain *salong* tradisional biasanya memiliki pola, simbol, dan warna kotak-kotak yang ditenun dengan metode tenun tradisional sejak berabad-abad lalu. Selama bertahun-tahun, semakin banyak variasi desain *salong* yang mencakup tanaman, hewan, dan simbol budaya.

Laos pun mempunyai makanan tradisional. Beberapa di antaranya adalah *khaipen* (rumput laut goreng yang dikonsumsi dengan bumbu lokal bernama *jaew bong*); roti isi *khao jee* yang berisi selada, tomat, wortel, bawang bombay, keju, dan irisan daging babi; *khao piak sien* (mie dengan kuah kaldu babi atau ayam); dan *laap* (potongan daging ayam atau bebek yang dicampur dengan tumbukan beras).[30]

---

[30] Sumber: Pusat Informasi Resmi Pariwisata Laos, http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=9

e. Malaysia (*Malaysia*)



Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	8 Agustus 1967
Kepala Negara	:	Sultan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Sultan Malaysia (sejak 15 Januari 2019-sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana menteri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri Malaysia (sejak 1 Maret 2020 – sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Demokrasi parlementer dengan sistem monarki konstitusional
Bentuk Negara	:	Federasi [31]
Ibu Kota	:	Kuala Lumpur
Bahasa	:	Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil
Mata Uang	:	Ringgit (MYR) – (RM 1 = ± Rp. 3.300)
Hari Nasional	:	31 Agustus (Hari Kemerdekaan) 16 September (Hari Malaysia)
Lagu Kebangsaan	:	Negaraku (My Country)
Letak Astronomis	:	1°LU–7°LS dan 100°BT–120°BT
Luas Wilayah	:	330.000 km^2
Jumlah Penduduk	:	32,6 juta jiwa[32]
Suku Bangsa/Etnis	:	Bumiputera 62,1%, Tionghoa 20,5%, India 6,18%, etnis lainnya 0,92%, bukan warga negara 10,26%[33]
Agama	:	Islam (61, 3%), Buddha (19, 8%), Kristen (9, 2%), Hindu (6, 3%) dan agama lainnya (3,4%)
Iklim	:	Tropis khatulistiwa



Kepala Negara
Sumber Foto:
https://www.parlimen.gov.my/yda-senarai-yang-di-pertu-an-agong.html?uweb=yg&



Kepala Pemerintahan
sumber:
Twitter @Muhyiddin Yassin

[31] Sumber: Attorney General Chamber Malaysia, http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf
[32] Sumber: Department of Statistics Malaysia, https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearc seam?cid=54916
[33] Sumber: Department of Statistics Malaysia, https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916

Produk Ekspor	:	Produk elektronik dan elektrik, kelapa sawit, kayu dan produk kayu, LNG, tekstil dan produk tekstil, karet, minyak mentah[34]
Produk Impor	:	Makanan dan minuman, bahan bakar minyak dan pelumas, komponen dan aksesoris kendaraan[35]
Tujuan Ekspor	:	Singapura, RRT, Uni Eropa, Jepang, Thailand (2018)[36]
Asal Impor	:	RRT, Singapura, Uni Eropa, Taiwan, Jepang (2018)[37]
PDB	:	US$ 358.412 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 11.067
Destinasi Wisata	:	Pulau Sipadan, Pulau Redang, Pulau Rawa, Taman Negara Gunung Strong, Wetland Park, Taman Nasional Penang, Kek Lok Si, Langkawi, Gunung Jerai, Bukit Keteri, Gunung Kinabalu[38]
Kode Domain Internet	:	.my
Kode Telepon	:	60

Sejarah Singkat Malaysia

Sejarah Malaysia ditandai dengan Kesultanan Malaka sekitar 1400 Masehi. Wilayah kekuasaannya mencapai sebagian wilayah pantai timur semenanjung Malaysia dan Sumatra, Indonesia. Islam merupakan agama utama yang dianut kesultanan dan masyarakat. Pada 1511, Malaka jatuh ke Portugis dan kemudian dikuasai oleh Belanda pada 1641. Inggris kemudian mengambil alih dari Belanda pada 1824 melalui *Anglo-Dutch Treaty*. Kolonialisasi Inggris berpengaruh besar terhadap Malaysia. Pada abad ke-18, *British East India Company* memperoleh Pulau Pinang dari Sultan Kedah yang kemudian menjadi pintu masuk perdagangan utama. Sir Stamford Raffles kemudian menduduki Singapura pada 1819 dan memperoleh hak dagang pada 1824. Selain itu, Inggris memperoleh Malaka dari Belanda pada 1824. Dengan demikian, Inggris menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka.

Pada abad ke-19, gelombang migrasi dari Tiongkok masuk ke wilayah semenanjung dan umumnya bekerja untuk menambang timah. Tambang timah menjadi sumber konflik di masyarakat, baik bagi Melayu dan Tiongkok. Inggris tertarik dengan potensi mineral dan kemudian membentuk sistem kependudukan Inggris di semenanjung sejak 1870-an. Sejak itu, Inggris membentuk Federasi Malaysia yang terdiri atas Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, serta Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Inggris membantu Kesultanan Melayu untuk memperoleh wilayah Kedah, Trengganu, Kelantan, dan Perlis dari Siam pada 1909. Pada abad ke-19, Inggris juga mulai menduduki wilayah Serawak dan Borneo bagian utara (Sabah).[39]

Intervensi Inggris telah menimbulkan ketidakpuasan di antara penduduk setempat dan menimbulkan perlawanan, misalnya Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Dato Maharajalela, dan Rosli Dobi. Pada era 1920 hingga 1930-an, masyarakat Melayu yang berpendidikan membentuk Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia ke-2, pemerintah Inggris membentuk *Malayan Union* pada 1 April 1946. Namun,

---

34 Sumber: Department of Statistics Malaysia, https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916
35 Sumber: Department of Statistics Malaysia, https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916
36 Sumber: Department of Statistics Malaysia,https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916
37 Sumber: Department of Statistics Malaysia,https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916
38 Sumber: Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB),http://ebrochures.malaysia.travel/
39 Sumber: Ensiklopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Malaysia/Malaya-and-northern-Borneo-under-British-control
40 Sumber: Ensiklopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Malaysia/Malaya-and-northern-Borneo-under-British-control

hal itu mendapatkan perlawanan akibat upaya Inggris untuk menghapus kesultanan dan keistimewaan masyarakat Melayu.

Tunku Abdul Rahman membentuk partai aliansi yang terdiri dari tiga etnis utama, yaitu Tionghoa, Melayu, dan India sebagai upaya politik untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini mendorong disepakatinya London Agreement pada 8 Februari 1956 dengan kemerdekaan yang diperoleh pada 31 Agustus 1957. Pada 20 Februari 1956, Tunku mendeklarasikan kemerdekaan Malaya di Padang Bandar Hilir, Melaka.

Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengusulkan penggabungan lima daerah, yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam untuk membentuk negara baru. Namun, hanya pemerintah Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak yang menerima usulan tersebut pada 9 Juli 1963 yang kemudian pada 16 September 1963 dideklarasikan nama negara, yaitu Malaysia. Pada tahun 1965 Singapura mendeklarasikan kemerdekaannya dan tidak menjadi bagian Malaysia.

Sistem Politik

Sesuai Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan pada 1957, Malaysia dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala negara. Yang di-Pertuan Agong dipilih secara bergantian dari pemimpun 9 kerajaan/ kesultanan yang ada di Malaysia. Adapun kepala pemerintahan ditunjuk dari anggota parlemen sebagai perdana menteri. Pemilu dilakukan setiap lima tahun untuk memilih anggota parlemen.

Putrajaya merupakan pusat administrasi pemerintahan Malaysia. Perdana Menteri berkantor di Perdana Putra. Dataran Merdeka merupakan lokasi bersejarah di Kuala Lumpur yang menandai kemerdekaan dengan pengibaran bendera Malaysia menggantikan bendera Inggris..[40]

Kondisi Geografis

Malaysia berbatasan darat dengan Thailand, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Adapun batas laut dengan Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia.

Markah/*Landmark*



Gambar 2.20 Pemandangan ke Arah Menara Kembar Petronas di Kala Senja
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Menara Kembar Petronas adalah bangunan yang berfungsi sebagai kompleks perkantoran, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur. Menara Kembar Petronas sebagian besar dibangun dari beton yang kokoh dengan eksterior bangunan dari baja dan kaca yang dirancang dengan motif kesenian Islam yang mencerminkan mayoritas agama Islam di Malaysia.

Sosial Budaya

Salah satu contoh cerita rakyat dari Malaysia berjudul *Putri Bidadari Penghuni Gunung Ledang*. Kisah ini berawal dari seorang putri bidadari yang bertekad tidak akan menikah seumur hidup. Sayangnya, keinginannya malah membuat banyak laki-laki berkuasa tertarik meminangnya, termasuk Raja Melaka yang sudah beristri dua. Supaya tetap tidak menikah sang putri pun mengajukan permintaan yang tidak bisa dipenuhi sang raja. Dengan cara ini sang putri menghindari pinangan sang raja dan melarikan diri ke Gunung Ledang.

Musik tradisional negara ini didasarkan pada instrumen perkusi. Drum merupakan alat yang paling sering digunakan dalam berbagai pagelaran musik tradisional Malaysia. Alat musik tradisional lainnya termasuk rebab, gong, terompet, dan seruling. Musik adalah bagian integral dari acara pernikahan, upacara kelahiran, festival panen, dan acara mendongeng di Malaysia.

Sebelum abad ke-20, wanita Melayu di Malaysia masih mengenakan *kemban* (sarung yang diikat di atas dada). Ketika Islam menjadi lebih luas dianut oleh masyarakat Malaysia, mereka mulai mengenakan baju kurung. Baju kurung adalah blus longgar selutut yang biasanya dikenakan di atas rok panjang dengan lipatan di samping. Baju kurung biasanya dipadankan pula dengan kain tradisional seperti songket atau batik. Biasanya, pakaian tradisional ini dilengkapi dengan selendang atau tudung. Pakaian tradisional untuk pria Melayu di Malaysia adalah baju Melayu. Baju Melayu adalah tunik longgar yang dikenakan di atas celana panjang dan biasanya dilengkapi dengan *sampin* (sarung pendek yang melilit pinggul). Etnis Tionghoa dan India yang tinggal di Malaysia memiliki pakaian tradisional yang berbeda, mirip dengan pakaian *cheongsam* yang digunakan di RRT dan *saree* yang digunakan di India.

Masakan Malaysia mencerminkan campuran kelompok etnis negara ini. Tiga masakan paling menonjol adalah Cina, India, dan Melayu. Makanan Cina yang populer termasuk hidangan Kanton asam manis dan nasi ayam Hainan. Masakan India berkisar dari hidangan vegetarian pedas yang berasal dari India selatan hingga makanan muslim India dengan bumbu yang lebih ringan, dan daging *tandoori* yang dimasak dengan yogurt dari India utara. Masakan tradisional Melayu terdiri atas nasi putih yang disajikan dengan berbagai kari dan hidangan. Salah satu yang paling terkenal adalah nasi lemak, yaitu nasi kelapa yang disajikan dengan teri goreng, kacang tanah, dan hidangan kari.

f. Myanmar (*Republic of the Union of Myanmar*)





Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Sumber Foto
https://www.moi.gov.mm/moi:eng/news/139

Tanggal Bergabung dengan ASEAN	:	23 Juli 1997
Kepala Negara	:	Presiden Win Myint Presiden Myanmar (sejak 30 Maret 2018 - Januari 2021)*
Kepala Pemerintahan	:	Presiden Win Myint Presiden Myanmar (sejak 30 Maret 2018 - Januari 2021)*
Sistem Pemerintahan	:	Republik konstitusional
Bentuk Negara	:	Republik
Ibu Kota	:	Nay Pyi Taw
Bahasa	:	Burma
Mata Uang	:	Kyat (MMK)
Hari Nasional	:	4 Januari 1948 (Hari Kemerdekaan) 12 Februari 1947 (Hari Persatuan/Union Day)
Lagu Kebangsaan	:	Kaba Makyay Bama Pyay
Letak Astronomis	:	11°LU–28°LU dan 92°BT–101°BT
Luas Wilayah	:	676.577 km^2 14 wilayah daerah setingkat provinsi, yaitu 7 *state* (berdasarkan mayoritas kelompok etnis) dan 7 region (berdasarkan heterogenitas kelompok etnik)
Jumlah Penduduk	:	53,37 juta jiwa
Suku Bangsa/Etnis	:	Burma (Bamar) 68%, Shan 9%, Karen 7%, Rakhine 4%, Tionghoa 3%, India 2%, Mon 2%, etnis lainnya 5%
Agama	:	Buddha 87,9%, Kristen 6,2%, Islam 4,3%, Animisme 0,8%, Hindu 0,5%, agama lainnya 0,2%, tidak beragama 0,1%
Iklim	:	Tropis
Produk Ekspor	:	Bahan bakar minyak, aksesoris pakaian, biji-bijian, batu mulia, mutiara, tembaga, gula[41]
Produk Impor	:	Bahan bakar, minyak dan produk penyulingan, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, besi, baja[42]
Tujuan Ekspor	:	RRT, Thailand, Jepang, India, dan Hong Kong[43]
Asal Impor	:	RRT, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia[44]
PDB	:	US$ 77.264 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 1.441

* Data ketika buku disusun di Januari 2021

41 Sumber: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/myanmar

42 Sumber: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/myanmar

43 Sumber: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/myanmar

44 Sumber: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/myanmar

Destinasi Wisata : Shwedagon Pagoda, Gems Museum, Bagan
Kode Domain Internet : .mm
Kode Telepon : 95

Sejarah Singkat Myanmar[45]

Raja Anawrahta pertama kali membentuk negara Myanmar di Pagan dan mengadopsi Theravada Budha pada tahun 1057. Pembentukan negara Myanmar modern dimulai dengan perluasan/ penambahan Inggris ke Burma, termasuk Rangoon setelah perang kedua Anglo Burma pada tahun 1852. Kekuasaan Inggris meluas hingga ke Mandalay dan menjadikan Burma sebagai satu provinsi di India.

Inggris memisahkan Burma dari India pada tahun 1937 dan menjadikannya sebagai koloni tersendiri. Pada tahun 1942, Jepang menguasai Burma dengan bantuan dari Burma Independence Army yang dilatih oleh Jepang kemudian bertransformasi menjadi *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL) yang melawan Jepang.

Inggris membantu membebaskan Burma dari pendudukan Jepang pada tahun 1945 dengan bantuan AFPFL dipimpin oleh Aung San. Burma memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948 dengan U Nu sebagai perdana menteri pertama.

Pada pertengahan tahun 1950-an U Nu bersama PM India, Jawaharlal Nehru; Presiden Soekarno dari Indonesia; Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito; dan Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser membentuk Gerakan Non Blok (GNB).

Sistem Politik[46]

Bentuk pemerintahan Myanmar adalah republik konstitusional dengan dua kamar legislatif *(House of Nationalities* dan *House of Representatives).* Pemerintahan Myanmar dipimpin oleh presiden. Konstitusi pertama Myanmar mulai berlaku pada 4 Januari 1974 dan ditangguhkan setelah kudeta militer pada 18 September 1988. Negara ini kemudian diperintah oleh junta militer, yang dikenal pertama sebagai Dewan Restorasi Hukum dan Ketertiban (SLORC) dan antara 1997 dan 2011, sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC). Di bawah konstitusi 1974, kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Rakyat Unikameral *(Pyithu Hluttaw),* sebuah badan yang beranggotakan 485 orang yang dipilih dan menjalankan wewenang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di bawah kepemimpinan militer, Partai Program Sosialis Burma (BSPP) adalah satu-satunya partai politik resmi dari tahun 1964 hingga 1988.

Setelah kembali ke pemerintah sipil, dikeluarkan konstitusi 2008. Di bawah konstitusi 2008, otoritas legislatif berada di tangan Majelis Bikameral Uni *(Pyidaungsu Hluttaw)* yang terdiri atas *House of Nationalities* dengan 224 kursi *(Amyotha Hluttaw)* dan *House of Representative* 440 kursi *(Pyithu Hluttaw).* Anggota dari tiap-tiap kamar dipilih langsung dan seperempat sisanya ditunjuk oleh militer. Seluruh anggota ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun. Sesuai konstitusi, otoritas eksekutif berada pada presiden yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Presiden dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mengepalai 11 anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (kabinet).

---

45 Sumber: BBC, https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific dan Ensiklopedia Britannica, www.britannica.com/place/Myanmar/Demographic-trends

46 Sumber: BBC, https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific dan Ensiklopedia Britannicawww.britannica.com/place/Myanmar/Demographic-trends

Kondisi Geografis[47]

Myanmar adalah negara paling utara di Asia Tenggara dan berbentuk menyerupai layang-layang dengan ekor panjang yang membentang ke selatan di sepanjang Semenanjung Melayu. Negara ini berbatasan dengan RRT di utara dan timur laut, Laos di timur, Thailand di tenggara, Laut Andaman dan Teluk Benggala di selatan dan barat daya, Bangladesh di barat, dan India di barat laut. Panjang totalnya dari utara ke selatan sekitar 1.275 mil (2.050 km) dan lebarnya di bagian terlebar, melintasi pusat negara di sekitar garis lintang Kota Mandalay, sekitar 580 mil (930 km) dari timur ke barat.

Topografis Myanmar secara keseluruhan dapat dibagi menjadi lima wilayah pegunungan utara, pegunungan barat, dataran tinggi timur, lembah tengah dan dataran rendah, dan dataran pantai. Daerah dataran tinggi Myanmar dari utara ke selatan, dari ketinggian 19.296 kaki (5.881 meter) di Gunung Hkakabo (puncak tertinggi negara itu) di ketinggian ekstrim utara ke permukaan laut di delta Sungai Irrawaddy *(*Ayeyarwady*)* dan Sittang (Sittoung*).* Sungai-sungai utama Myanmar juga mengalir dari utara ke selatan. Sekitar tiga perlima permukaan Myanmar dilewati oleh Sungai Irrawaddy dan anak-anak sungainya. Di puncak delta, Irrawaddy terpecah menjadi jaringan besar sungai dan bermuara di Laut Andaman. Anak sungainya yang besar, *Chindwin,* mengalir ke wilayah barat.

Myanmar memiliki danau yang terkenal, Danau Indawgyi di perbukitan utara yang membentang sekitar 15 mil (24 km) dari utara ke selatan dan 8 mil (13 km) dari timur ke barat. Danau Indawgyi adalah salah satu danau pedalaman alami terbesar di Asia Tenggara.



Gambar 2.21. Pemandangan Pagoda Shwedagon saat senja di Yangon, Myanmar
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Markah/*Landmark*

Pagoda Shwedagon yang berumur 2.500 tahun terletak di sebelah barat Danau Royal di Yangon. Shwedagon Pagoda merupakan situs Buddha yang paling suci bagi masyarakat Myanmar. Kompleks pagoda ini mulai dibangun dengan stupa setinggi 8,2 meter dan sampai saat ini Pagoda Shwedagon berdiri dengan ketinggian mencapai 110 meter. Pagoda Shwedagon ditutupi dengan ratusan lempengan emas dan bagian atas stupa dilapisi dengan 4.531 berlian. Berlian yang terbesar di Pagoda Shwedagon mencapai 72 karat.[48]

[47] Sumber: BBC, https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific dan Ensiklopedia Britannica, www.britannica.com/place/Myanmar/Demographic-trends

Sosial Budaya

Salah satu contoh cerita rakyat dari Myanmar adalah “Raja dan Ahli Memuji”. Kisah ini menceritakan sang raja yang sangat pintar dan mempunyai jiwa sombong sehingga pada suatu ketika seorang pemuji datang ke istananya untuk melontarkan pujian-pujian tipu muslihatnya kepada raja, dan akhirnya raja terpengaruh dengan pujiannya.

Bentuk pagelaran budaya Myanmar yang paling populer adalah *pwe* yang dilakukan di luar ruangan. *Pwe* memiliki berbagai genre, termasuk teater manusia dan boneka, dan sebagian besar mengambil materi pelajaran dari kisah Jataka, kisah-kisah kehidupan Buddha sebelumnya.

Berbagai pagelaran *pwe* diiringi oleh musik *hsaing waing* yang merupakan ansambel instrumental perkusif. Instrumen utama dalam *hsaing waing* termasuk *pat waing* (21 drum yang disetel khusus), *oboelike hne* (gong), *kyi waing*, dan satu set gong kecil yang disebut *maung hsaing*. Sebagian gaya tarian yang disertai dengan *hsaing waing* berasal dari India Selatan. Sebagian besar tradisi tarian Myanmar diadaptasi dari gaya Thailand dan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Masyarakat lokal Myanmar baik pria maupun wanita kerap menggunakan *longyi*, yaitu sarung khas negara ini. Sementara itu, untuk wanita, ada juga pakaian *yinzi,* yaitu blus khusus dengan kancing di bagian depan dan *yinbon,* yaitu blus dengan kancing di bagian samping. Beberapa makanan tradisional khas Myanmar adalah *beh-bya hin* (kari tofu); *htamin see san* (nasi dengan campuran sayur dan biji-bijian); *malar hin* (campuran sayur yang dimasak dengan bumbu pedas); *tofu ngwe* (sup tahu yang disajikan dengan mie).

Myanmar Trivia

Tahukah Anda bahwa pesawat terbang pertama milik Indonesia, “Seulawah” RI-001, pernah dioperasikan di Myanmar untuk mendukung kemerdekaan Indonesia?

Pesawat Dakota DC-3 ini dinamakan Dakota RI-001 Seulawah. Arti *Seulawah* adalah gunung emas. Pesawat Seulawah mempunyai panjang 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter. Pesawat ini dimiliki oleh Indonesian Airways, cikal bakal dari Garuda Indonesia saat ini. Pesawat ini merupakan sumbangan sukarela rakyat Aceh. Waktu itu, sumbangan yang terkumpul setara dengan 20 kilogram emas murni dan 120.000 dollar Singapura. Uang ini kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membeli pesawat Dakota. [1]

Pada 1947, Indonesia membuka Indonesian Office atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Rangoon. Kantor ini yang mengurus izin agar pesawat RI-001 Seulawah bisa beroperasi di Burma sebagai penerbangan sipil dengan nama maskapai Indonesia Airways.

Meskipun beroperasi di Burma, Pesawat RI-001 dua kali menerobos blokade udara yang dilakukan oleh Belanda dari Rangoon ke Aceh dengan membawa bantuan persenjataan dan amunisi guna melanjutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penerbangan menerobos blokade ini dipimpin oleh Opsir Udara II Wiweko Soepono.

Dalam mendukung penerbangan di Burma, Indonesia Airways mendirikan Stasiun Radio di Rangoon. Bila semula stasiun radio ini hanya mengadakan hubungan untuk kepentingan intern TNI-AU, belakangan juga menjelma menjadi “jembatan” bagi PDRI dengan para perwakilan RI di luar negeri, termasuk dengan perwakilan RI di PBB, L.N. Palar. Adanya stasiun ini memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan penerobosan blokade ke Aceh.

Pesawat RI-001 ini merupakan pelopor penerbangan sipil nasional karena dengan pesawat inilah didirikan Indonesia Airways yang beroperasi di Burma. Dana yang diperoleh oleh operasi penerbangan di Burma ini digunakan untuk membiayai kadet-kadet udara yang belajar di India dan Filipina.[2]

1. *Sumber: Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/11484411/perkenalkan-dakota-dc-3-ri-001-pesawat-angkut-pertama-di-indonesia-pada-1948?page=all*
2. *Sumber: Website TNI AU, https://tni-au.mil.id/mengenang-pesawat-dakota-ri-001-seulawah/*

48 Sumber: Ministry of Hotels and Tourism, https://tourism.gov.mm

g. Filipina (*Republic of the Philippines*)





Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Sumber Foto https://tokyo.philembassy.net/the-philippine-president/president-rodrigo-roa-duterte/#nav-cat

Tanggal bergabung dengan ASEAN	:	8 Agustus 1967
Kepala Negara	:	Presiden Rodrigo Duterte Presiden Filipina (sejak 30 Juni 2016 - sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Presiden Rodrigo Duterte Presiden Filipina (sejak 30 Juni 2016 - sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Republik Presidensil
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Manila
Bahasa	:	Filipino/Tagalog (bahasa resmi) dan Inggris
Mata Uang	:	Peso (PHP)
Hari Nasional	:	12 Juni
Lagu Kebangsaan	:	"Lupang Hinirang" (Chosen Land)
Letak Astronomis	:	5°LU–21° LU dan 117°BT--121°BT
Luas Wilayah	:	343.448 km^2
Jumlah Penduduk	:	106,6 juta jiwa
Suku Bangsa/Etnis	:	Tagalog 28%, Cebuano 13,1%, Ilocano 9%, Visayan 7,6%, Hiligaynon 7,5%, Bikol 6%, Waray 3,4%, Tionghoa, Filipino 2,5%, lainnya 22,8%
Agama	:	Katolik 82,9% (Katolik Roma 80,9%, Aglipayan 2%), Islam 5%, agama lainnya 12,1%.
Iklim	:	Tropis basah
Produk Ekspor	:	Mesin pengolah data, aksesori kendaraan bermotor, kawat terisolasi dan kabel, hidrokarbon
Produk Impor	:	Biji tembaga dan konsentrat, batu bara, kendaraan bermotor, kopi dan teh, lemak dan minyak nabati
Tujuan Ekspor	:	Jepang, Amerika Serikat, RRT, Singapura, Hong Kong
Asal Impor	:	Korea Selatan, Uni Eropa, Thailand, Taiwan, Malaysia, Jerman
PDB	:	US$ 342.693 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 3.215
Destinasi Wisata	:	Palawan, Cebu, Boracay, Puerto Galera, Museo de Intramuros
Kode Domain Internet	:	.ph
Kode Telepon	:	63

Sejarah Singkat Filipina

Filipina mengambil namanya dari Philip II, yang merupakan Raja Spanyol selama kolonisasi Spanyol di Kepulauan tersebut pada abad ke-16. Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol selama 333 tahun dan di bawah bimbingan AS untuk lebih 48 tahun.

Sistem Politik

Politik Filipina berbentuk sistem presidensial yang memilih presiden melalui pemilu presiden Filipina. Legislatif dipilih secara terpisah melalui pemilu legislatif Filipina. Eksekutif dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bersama dewan menteri. Parlemen berbentuk bikameral, dengan majelis tinggi yang berupa senat yang dipilih dalam pemilihan umum di seluruh negeri yang dapat mengesahkan konstitusi, dan majelis rendah yang berupa dewan perwakilan.

Kondisi Geografis

Republik Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Terletak di barat Samudra Pasifik, terdiri atas sekitar 7.641 pulau yang terbagi menjadi tiga divisi geografis utama dari utara ke selatan: Luzon, Visayas, dan Mindanao. Ibu kota Filipina adalah Manila dan kota terpadat adalah Quezon City, keduanya merupakan bagian dari Metro Manila. Negara ini dibatasi oleh Laut China Selatan di barat, Laut Filipina di timur, dan Laut Sulawesi di barat daya. Filipina berbatasan dengan Taiwan di utara, dengan Jepang di timur laut, dengan Vietnam di barat, dengan Palau di timur, dan dengan Malaysia dan Indonesia di selatan.

Markah/*Landmark*



Gambar 2.22. Monumen salah satu tokoh nasional Republik Filipina, Dr. Jose Rizal yang terletak di area Rizal Park, Manila
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Rizal Park atau dikenal juga sebagai Bagumbayan Field atau Luneta Park merupakan monumen yang dibangun untuk memperingati kepahlawanan Dr. Jose Rizal, pahlawan nasional Filipina. Tempat ini juga merupakan tempat bersejarah, tempat Jose Rizal menjalani hukuman tembak oleh tentara militer Spanyol pada tanggal 30 Desember 1896. Jose Rizal dihukum karena dianggap menyebarkan ide revolusi melawan pendudukan Spanyol.

Sosial Budaya

Bentuk budaya Filipina yang ditampilkan dalam drama sebelum penjajahan Spanyol bersifat religius. Bangsa Spanyol yang datang ke Filipina menggunakan drama untuk memperkenalkan agama Katolik. Tema-tema mengenai identitas sebagai masyarakat Filipina berkembang dalam drama pada akhir abad ke-19 ketika gerakan kemerdekaan berkembang. Tema drama yang saat ini popular bersifat nasionalistis dan mencerminkan kehidupan sehari-hari.

Tarian tradisional Filipina merupakan campuran dari budaya Filipina dan Spanyol. Kelompok tari profesional menampilkan balet, tarian modern, dan tarian rakyat. Tarian rakyat ditampilkan di pertemuan dan konferensi dan mencerminkan pengaruh Spanyol yang kuat, di sisi lain, tarian adat digunakan dalam kontes sejarah. Contohnya adalah tarian bambu yang menceritakan sebuah kisah seekor burung yang bergerak di antara alang-alang. Orang-orang Filipina juga menikmati dansa ballroom sebagai bentuk kegiatan rekreasi. Instruktur tari biasanya tersedia di pesta-pesta untuk mengajarkan waltz dan cha-cha.

Pakaian adat atau pakaian tradisional wanita Filipina adalah *baro at saya* yang terdiri atas blus dan rok panjang. Sementara itu, pakaian khas kaum laki–laki di Filipina disebut *barong tagalog*, berupa kemeja formal. Busana ini sangat populer dipakai untuk upacara pernikahan atau acara-acara resmi kenegaraan.

Salah satu contoh cerita rakyat Filipina berjudul “Kepiting Melawan Ombak”. Kisah ini menceritakan segerombolan kepiting yang terganggu dengan suara ombak, sehingga mereka berniat untuk melawan ombak dengan cara mengumpulkan seluruh kepiting yang ada. Namun, usaha kepiting tersebut tidak membuahkan hasil karena banyak kepiting yang mati, masuk ke dalam lautan terseret ombak.

Kuliner Filipina yang terkenal adalah *léchon* (masakan babi panggang) yang biasanya disajikan pada acara-acara penting. Status tuan rumah dan acara dapat diukur dari jumlah *léchon* yang disajikan. Makanan lainnya adalah jajanan ketan yang dimasak dengan santan dan sirup tebu, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Beberapa kuliner khas Filipina yang terkenal di kancah internasional adalah *adobo* (daging ayam/sapi/hewan laut yang dimasak dengan bumbu cuka, kecap, bawang putih, dan lada hitam), *sinigang* (sup/semur sayuran dan daging yang dibumbui dengan asam, saus ikan, dan bumbu lokal), *halo-halo* (es serut bercampur sirup dan kolang-kaling), dan *kinilaw* (hidangan laut yang disajikan mentah).

h. Singapura (*Republic of Singapore*)



Tanggal bergabung dengan ASEAN : 8 Agustus 1967

Kepala Negara : Presiden
Halimah Yacob
Presiden Singapura
(sejak 14 September 2017-sekarang)



Kepala Negara dan
Sumber Foto
https://www.istana.gov.sg/
The-President/President-In-Office

Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Lee Hsien Loong
Perdana Menteri Singapura
(sejak 12 Agustus 2004-sekarang)



Kepala Pemerintahan
Sumber Foto
https://www.instagram.com/p/
B1VH6wXn_dC/

Sistem Pemerintahan : Republik Konstitusional
Bentuk Negara : Republik
Ibu Kota : Singapura
Bahasa : Inggris, Cina Mandarin, Melayu, dan Tamil
Mata Uang : Dolar Singapura (SGD)
Hari Nasional : 9 Agustus
Lagu Kebangsaan : Majulah Singapura
Letak Astronomis : 1°11'LU–1°28'LU dan 103°38'BT–104°5'BT
Luas Wilayah : 719,1 km^2
Jumlah Penduduk : 5.703,6 juta jiwa[49]
Suku Bangsa/Etnis : Tionghoa (74,4%), Melayu (13,4%), India (9%), dan Etnis Lainnya (3,2%)[50]
Agama : Buddha/Tao 43,2%, Kristen 18,8%, Islam 14%, Hindu 5%, lain-lain 0,6%, dan yang tidak beragama sebanyak 18,5%[51]
Iklim : Tropis
Produk Ekspor : Peralatan transportasi dan mesin, produk kimia, peralatan manufaktur, barang-barang manufaktur, makanan, minuman, dan tembakau, minyak nabati dan hewani[52]
Produk Impor : Peralatan transportasi dan mesin, produk kimia, peralatan manufaktur, barang-barang manufaktur[53]
Tujuan Ekspor : RRT, Uni Eropa, Amerika Serikat, Malaysia, Hongkong[54]

---

49 Sumber: Department of Statistics Singapura, https://www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/population/population-and-population-structure/latest-data
50 Sumber: Department of Statistics Singapura, https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/population/population2019.pdf
51 Sumber: Department of Statistics Singapura, https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/visualising_data/infographics/ghs/highlights-of-ghs2015.pdf
52 Sumber: Department of Statistics Singapura, https://www.singstat.gov.sg/bukues/infographics/singapore-international-trade
53 Sumber: Department of Statistics Singapura, https://www.singstat.gov.sg/bukues/infographics/singapore-international-trade
54 Sumber: Ministry of Trade and Industry Singapura https://www.mti.gov.sg/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2019/Economic-Survey-of-Singapore-Second-Quarter-2019

Asal Impor	:	RRT, Uni Eropa, Malaysia, Amerika Serikat, Taiwan[55]
PDB	:	US$ 364.076 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 64.567
Destinasi Wisata	:	National Museum, Merlion, Gardens By The Bay, National Orchid Park, Jurong Bird Park[56]
Kode Domain Internet	:	.sg
Kode Telepon	:	65

Sejarah Singkat Singapura

Pada abad ke-7 hingga ke-13 Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuasaan di kawasan Selat Malaka. Perdagangan menjadi sumber ekonomi Sriwijaya, salah satunya dengan Tiongkok. Pada masa tersebut dikisahkan, Sang Nila Utama, seorang pangeran dari Palembang (pusat kerajaan Sriwijaya) berlabuh di pantai Singapura dengan penampakan wujud singa dan kemudian mendirikan kerajaan. Sejak itu, Singapura dinamakan dari bahasa Sanskerta, yaitu *simha* yang berarti singa dan *pura* yang berarti kota. Kota ini kemudian diperintah oleh 5 raja.

Sejarah menunjukkan, pada abad ke-14 Singapura merupakan kota pelabuhan yang maju. Catatan sejarah menandai ada hubungan kerja sama antara Singapura dengan Pangeran Vietnam, Nhat Duat. Di tengah kesuksesan, kerajaan dihadapi ancaman Majapahit dan Kerajaan Thai. Pada abad ke-15, kerajaan di Singapura mulai kehilangan kekuasaannya. Pada abad ke-15, Singapura menjadi pelabuhan angkatan laut bagi Kesultanan Melaka.

Pada abad ke-19, Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan *lieutenant-governor* di *Bencoolen* (Bengkulu) tiba di Singapura pada 29 Januari 1819. Setelah mencermati bahwa pulau tersebut strategis dan memiliki potensi untuk perdagangan, Raffles melakukan perjanjian dengan penguasa setempat untuk membangun pusat perdagangan di Singapura. Kota tersebut kemudian menarik banyak imigran dari Tiongkok, India, dan Semenanjung Malaya serta sekitarnya.

Pada tahun 1822, Raffles menerapkan *Raffles Town Plan* atau dikenal dengan *Jackson Plan* untuk mengatur koloni. Wilayah pemukiman dibagi berdasarkan etnis di Singapura seperti komunitas Eropa di European Town, etnis Tionghoa di Chinatown dan tenggara Sungai Singapura. Etnis India menempati wilayah Kampong Chulia, sedangkan Kampong Glam didiami oleh Muslim, etnis Melayu dan Arab. Perkembangan pesat perdagangan di Singapura mendorong berdirinya beberapa bank dan asosiasi pedagang. Pada tahun 1924 jalan lintas yang menghubungkan Johor dan Singapura mulai beroperasi.

Pada era Perang Dunia ke II, Jepang menyerang Singapura pada 8 Desember 1941. Pasukan sekutu menyerah kepada Jepang pada 15 Februari 1942, yang kemudian dikenal sebagai kekalahan terbesar sekutu yang dipimpin Inggris sepanjang sejarah. Singapura kemudian diberi nama Syonanto oleh Jepang yang bermakna cahaya pulau selatan. Karena kekalahan Jepang pada 1945, Singapura kembali diserahkan pada Inggris. Pada 1946 Singapura resmi menjadi koloni kerajaan Inggris *(British Crown Colony*). Pada tahun 1959, rasa nasionalisme yang tumbuh di kalangan masyarakat mendorong upaya kemerdekaan dan pelaksanaan pemilu. *People's Action Party* (PAP) memenangkan pemilu dengan meraih 43 kursi, yang kemudian menjadikan Lee Kuan Yew sebagai perdana menteri pertama Singapura. Pada tahun 1963,Malaysia terbentuk, yang terdiri dari Federasi Malaya, Singapura, Serawak, dan Borneo Utara

55 Sumber: Ministry of Trade and Industry Singapura https://www.mti.gov.sg/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2018/Economic-Survey-of-Singapore-2018

56 Sumber: Association of Singapore Attraction, www.singapore-attractions.org.sg/index.php/directory/nature-parks

(sekarang Sabah). Meskipun demikian, unifikasi Singapura tidak berhasil dalam negara Malaysia. Kondisi ini mendorong kemerdekaan Singapura pada 9 Agustus 1965.[57]

Sistem Politik

Pemerintah Singapura mengadopsi sistem Westminster dengan 3 (tiga) cabang: legislatif yang terdiri atas presiden dan parlemen, eksekutif yang terdiri atas perdana menteri dibantu para menteri, serta lembaga yudikatif. Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Sementara itu, parlemen merupakan *unicameral* dengan satu dewan. Anggota parlemen dipilih melalui pemilu dengan masa jabatan 5 tahun.[58]

Kondisi Geografis

Singapura berada di ujung semenanjung, sekitar 137 km di atas garis ekuator. Di sisi utara berbatasan dengan Selat Johor Malaysia, sedangkan sisi selatan berbatasan laut dengan Indonesia. Sekitar dua pertiga dari pulau utama Singapura berada kurang dari 15 meter di atas permukaan laut. Timah Hill merupakan dataran tertinggi dengan 162 meter di atas permukaan laut.[59]

Markah/*Landmark*

Chijmes saat ini menjadi kompleks pertokoan setelah sebelumnya merupakan bangunan sekolah Katolik pada sekitar tahun 1800. Esplanade adalah bangunan yang digunakan untuk pertujuan seni dan budaya dengan luas sekitar 60 ribu meter persegi dengan bentuk bangunan yang menyerupai durian. Merlion merupakan bangunan ikonik yang menampilkan makhluk mistis dengan gabungan bentuk badan ikan dan kepala singa. Singapore Flyers merupakan wahana dengan tinggi 165 meter yang dibuka sejak tahun 2008. Bangunan *landmark* lainnya adalah Old Parliament House, National Gallery, Istana, Fullerton Hotel, Helix Bridge, Parkview Square, The Cenotaph, dan Marina Bay Sands.[60]



Gambar 2.23. Pemandangan Helix Bridge dan Marina Bay di Singapura pada malam hari
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

---

57 Sumber: Singapore Tourism Board, https://www.visitsingapore.com/travel-guide-tips/about-singapore/
58 Sumber: Parliament of Singapore, https://www.parliament.gov.sg/about-us/structure/system-of-government
59 Sumber: Ensiklopedia Britannica, https://www.britannica.com/place/Singapore
60 Sumber: Singapore Tourism Board, https://www.visitsingapore.com/editorials/singapore-most-iconic-landmarks/#architecture
61 Sumber: Singapore Tourism Board, https://www.visitsingapore.com/dining-drinks-singapore/local-dishes/

Sosial Budaya

Karena posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, Singapura memiliki budaya yang beragam. Pemerintah menyubsidi beberapa lembaga dan acara seni meskipun tidak ada bentuk budaya yang secara khusus merepresentasikan Singapura. Kelompok etnis yang berbeda memiliki tradisi artistik mereka sendiri. Generasi muda Singapura sendiri lebih tertarik pada berbagai bentuk seni kontemporer.

Salah satu contoh cerita rakyat Singapura yang cukup terkenal adalah "Asal Usul Kota Singapura". Cerita pendek ini bercerita tentang seorang raja bernama Sang Nila Utama yang merupakan seorang pemburu hebat. Cerita rakyat ini banyak digemari pembaca karena bercerita tentang sejarah negara Singapura. Diceritakan bahwa Raja tersebut pada saat berburu melihat sebuah pulau yang sangat cantik dan dia berniat akan membuat kota dan tinggal di pulau itu. Di pulau tersebut sang raja bertemu seekor singa dan dia pun memberi nama Kota Singa atau Singapura.

Makanan khas Singapura dipengaruhi oleh makanan India, Tiongkok, dan Melayu. Makanan khasnya seperti *chili krab, fried carrot cake, hokkien prawn mee,* kari kepala ikan Singapura, *kaya toast*, laksa, nasi ayam, nasi lemak, rojak singapura dan roti canai.[61]

[61] Sumber: Singapore Tourism Board, https://www.visitsingapore.com/dining-drinks-singapore/local-dishes/

i. Thailand (*Kingdom of Thailand*)

Tanggal bergabung dengan ASEAN	:	8 Agustus 1967
Kepala Negara	:	Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun atau Rama ke-10 Raja Thailand (sejak 13 Oktober 2016-sekarang)
Kepala Pemerintahan	:	Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-O-Cha Perdana Menteri Thailand (sejak 22 Mei 2014-sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Monarki Konstitusional
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Bangkok
Bahasa	:	Thai
Mata Uang	:	Baht (THB)
Hari Nasional	:	5 Desember
Lagu Kebangsaan	:	Phleng Chat Thai" (National Anthem of Thailand)
Letak Astronomis	:	6°LU–21° LU dan 97°BT–106°BT
Luas Wilayah	:	513.120 km2 (daratan seluas 510.890 km^2, dan perairan 2.230 km^2)
Jumlah Penduduk	:	68.863.514 jiwa
Suku Bangsa/Etnis	:	Thai 97,5%, Myanmar 1,3%, lain-lain 1,1% (2015)
Agama	:	Buddha 94,6%, Islam 4,3%, Kristen 1%, lain-lain <0.1% (2015)
Iklim	:	Tropis
Produk Ekspor	:	Mobil & motor suku cadang otomotif, komputer, peralatan listrik, produk karet, produk kimia, beras, tekstil dan alas kaki, produk perikanan, perhiasan[62]
Produk Impor	:	Suku cadang dan peralatan elektronik, bahan mentah, barang konsumsi, bahan bakar[63]
Tujuan Ekspor	:	Amerika Serikat, RRT, Jepang, Hong Kong, Australia, Malaysia, Vietnam, Singapura, Indonesia
Asal Impor	:	RRT, Jepang, AS, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Indonesia, Arab Saudi, UAE
PDB	:	US$ 505.060 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 7.446
Destinasi Wisata	:	Bang Pa-in Royal Palace, Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Center,



Kepala Negara
Sumber Foto
http://www.thaiembassy.org/amman/en/information/6766



Kepala Pemerintahan
Sumber Foto
http://www.mfa.go.th

62 Sumber: The Customs Department of Thailand
63 Sumber: The Customs Department of Thailand

Koh Kret, Tur Boat Chao Phraya, Provinsi Kanchanaburi, Kota Tua Ayutthaya, Provinsi Prachuap Khiri Khan

Kode Domain Internet : .th

Kode Telepon : 66

Sejarah Singkat Thailand [64]

Pada awal abad kelima atau keenam, orang-orang yang berbahasa Thai mulai bermigrasi dari Vietnam utara dan Yunnan selatan ke daerah-daerah yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Thai di Thailand utara yang berasimilasi dengan kaum Mon kemudian menganut kepercayaan Buddhisme Theravada. Orang-orang yang berbahasa Thai secara bertahap bermigrasi ke selatan dan pada awal abad ke-11 berpindah ke wilayah Mon. Orang-orang Thai yang tinggal di Thailand tengah berada di bawah kendali Khmer ketika Kerajaan Khmer berkembang. Masyarakat Khmer sendiri menyebut orang Thai sebagai Siam. Masyarakat Thai di sekitar Sukhothai memberontak melawan penguasa Khmer pada 1238 dan mendirikan kerajaan yang menjadi landasan pembentukan kerajaan Thailand modern. Setelah kekuasaan Khmer menurun, pusat kekuasaan Thailand bergeser ke selatan ke Ayutthaya, yang didirikan pada tahun 1351. Di utara, Kerajaan Lan Na didirikan pada tahun 1259, sedangkan Kerajaan Lao dari Lan Sang didirikan pada tahun 1353 mengintegrasikan wilayah timur laut Thailand.

Pendiri Kerajaan Ayutthaya, Rama Thibodi, mempromosikan agama Buddha Theravada dan menyusun kode hukum berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat Thailand yang tetap dianggap penting sampai akhir abad ke-19. Ayutthaya merebut sebagian wilayah Khmer dan menyerang ibu kota Angkor dan berkembang menjadi negara yang kuat dan makmur selama akhir abad ke-15. Setelah kematian para penguasanya, kekuasaan Kerajaan Ayutthaya dan Lan Na merosot. Lan Na mengalami sejumlah perang saudara dan pada akhirnya jatuh di bawah kendali Burma. Ayutthaya kemudian mengalami serangan oleh bangsa Khmer dan Burma pada abad ke-16.

Pada 1585, Ayutthaya memulai periode peremajaan untuk meningkatkan hubungan kerja samanya dengan negara lain. Hal ini dimulai dengan membentuk kedutaan besar beberapa negara asing pada tahun 1511, salah satunya Portugis. Sejak saat itu, semakin banyak masyarakat Eropa yang ada di Ayutthaya. Pada 1765, Kerajaan Ayutthaya mengalami penyerbuan kembali dari Burma. Burma berhasil merebut dan menghancurkan Kota Ayutthaya pada 1767. Setelah berhasil mengusir tentara Burma, pemerintah Thai membangun ibu kota baru di Thonburi. Pada tahun 1782 Chao Phraya Chakkri diangkat menjadi raja Thai dan mendirikan Bangkok. Pemimpin Chakkri ke-3 membangun kembali sistem Kerajaan Thai dan menasbihkan dirinya sebagai Rama III. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Thai menandatangani sejumlah perjanjian dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Raja Rama V yang memimpin sejak tahun 1868 hingga 1910 berhasil mencegah kolonisasi Eropa di Kerajaan Thai dan mengenalkan reformasi untuk memodernisasi negaranya.

Sistem Politik

Pemerintah Thailand, atau secara formal, pemerintah Kerajaan Thailand adalah pemerintah kesatuan Kerajaan Thailand. Negara ini muncul sebagai negara modern setelah didirikannya Dinasti Chakri dan Kota Bangkok pada tahun 1782. Revolusi pada 1932 kemudian mengakhiri monarki absolut dan menggantinya dengan monarki konstitusional. Sejak saat itu negara itu diperintah oleh suksesi pemimpin militer. Kudeta terakhir terjadi pada bulan Mei 2014 dan melibatkan beberapa interval demokratis. Konstitusi 2007 yang

---

64 Sumber: Countries and Their Culture Forum, https://www.everyculture.com/Sa-Th/Thailand.html

disusun oleh dewan yang ditunjuk militer dan disetujui melalui referendum, dibatalkan oleh para penggerak kudeta 2014.

Thailand sejauh ini memiliki tujuh belas konstitusi dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem Westminster. Pemerintahan Thailand terbagi menjadi tiga, yaitu: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seluruh lembaga pemerintah terkonsentrasi di Bangkok yang merupakan ibu kota Thailand.

Kondisi Geografis

Thailand, yang memiliki wilayah tanah yang sama dengan Spanyol atau Prancis, terdiri atas dua wilayah geografis yang luas: bagian utama yang lebih besar di utara dan perluasan semenanjung yang lebih kecil di selatan. Badan utama negara ini dikelilingi Myanmar di Barat, Laos di utara dan timur, Kamboja di tenggara, dan Teluk Thailand di selatan. Semenanjung Thailand membentang ke arah selatan dari sudut barat daya negara ini di sepanjang tepi timur Semenanjung Malaya. Myanmar membentang di sepanjang bagian barat semenanjung sampai ke Tanah Genting Kra, setelah itu Thailand menduduki seluruh semenanjung sampai mencapai perbatasan selatan dengan Malaysia di sekitar lintang 6° N.

Negara ini terbagi menjadi lima wilayah *physiographic* yang berbeda: pegunungan terlipat di utara dan barat, dataran tinggi Khorat di timur laut, cekungan Sungai Chao Phraya di tengah, sudut maritim dari wilayah tengah di tenggara, dan panjang, bagian Semenanjung ramping di barat daya. Puncak gunung rata sekitar 5.200 kaki (1585 meter) di atas permukaan laut. Gunung Inthanon adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 8.481 kaki (2.585 meter), berada di barat laut Thailand, dekat kota bersejarah Chiang Mai.

Markah/*Landmark*

Thailand memiliki sejumlah tempat bersejarah yang terkenal di khalayak internasional, salah satu di antaranya adalah *Temple of Reclining Buddha* (Wat Pho) yang terletak di Bangkok. Wat Pho yang dibangun untuk memperingati kekuasaan King Rama III (1824--1851) memiliki panjang 46 meter dengan tinggi 15 meter. Patung ini merupakan patung Buddha terbesar dan dilapisi oleh emas. Mata dan alas kaki patung ini terbuat dengan berhiaskan mutiara.



Gambar 2.24. Patung Buddha yang terletak di dalam area Wat Pho, Bangkok
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Sosial Budaya

Tarian klasik berkembang dari tarian rakyat dengan menggunakan gerakan tangan India yang rumit yang dikombinasikan dengan gerakan lengan dan kaki, yang kemungkinan merupakan pengaruh dari budaya Mon dan Khmer. Berbagai bentuk tarian, termasuk drama tari topeng, ditampilkan pada prasasti batu Sukhôtâi. Abad ke-18 dianggap sebagai zaman keemasan tarian dan drama tari klasik. Meskipun banyak musisi dan penari Ayutthaya dibawa secara paksa ke pengadilan kerajaan Burma pada tahun 1767, mereka yang tertinggal mengajarkan tradisi mereka kepada orang lain selama periode Bangkok awal.

Tarian dan drama klasik dicekal oleh kelompok berhaluan kiri pada tahun 1970-an karena kaitannya dengan aristokrasi. Ketika militer kembali berkuasa pada tahun 1976, pemerintah mempromosikan kembali bentuk seni klasik Thailand. Pada tahun 1977, rezim militer mengadakan festival tari dan drama nasional yang mencakup bentuk klasik dan drama patriotik yang mengagungkan masa lalu negara itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tarian dan drama klasik, rakyat, dan modern telah populer. Tarian rakyat amat beragam dan berakar pada budaya berbagai etnis yang tersebar di Thailand. Setiap gaya tarian disertai dengan alat musik yang berbeda. Tarian di wilayah tengah telah dipengaruhi oleh tradisi istana. Tarian selatan telah dipengaruhi oleh gaya Sri Lanka dan India selatan.

Cerita rakyat Thailand banyak dipengaruhi oleh Buddha dan Hindu India. Pada awalnya, cerita rakyat ini disampaikan oleh para biksu dan kemudian berkembang menjadi cerita rakyat. Tokoh-tokoh yang digunakan banyak diadaptasi dari tokoh Jataka dan Ramanaka.

Thailand memiliki Museum Tekstil Ratu Sirikit yang terletak di dalam area Grand Palace di Bangkok, Thailand. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai variasi pakaian tradisional yang ada di Thailand dan mempelajari sejarahnya. Awal mula berdirinya Museum Tekstil ini dilatarbelakangi oleh keinginan Ratu Sirikit untuk memperkenalkan pakaian nasional Thailand ketika mendampingi Raja Bhumibol Adulyadej melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa pada tahun 1960. Ratu Sirikit meneliti dan mengumpulkan arsip-arsip kerajaan mengenai busana kerajaan, dan kemudian mengembangkan hasil penelitian ini menjadi delapan desain pakaian nasional resmi kerajaan Thailand, yaitu: *ruean thon, chit lada, amarin, borom bhiman, chakkri, dusit, chakkrabhat,* dan *siwalai.* Pakaian nasional untuk pria Thailand adalah *suea bhraratcha-than.*

Masakan Thailand mencampurkan empat macam rasa dasar: manis, pedas, asam, dan asin. Beberapa contoh kuliner tradisional yang terkenal misalnya saja, *tom yum goong* (sup udang pedas), *som tum* (salad pepaya hijau pedas), *tom kha kai* (ayam masak kuah santan), *gaeng daeng* (kari merah), *pad thai* (mie goreng khas Thai), *khao niaow ma muang* (ketan mangga), dan *kai med ma muang* (ayam yang dimasak dengan kacang mede). Sebagian besar kuliner tradisional Thailand menggunakan jeruk nipis, daun ketumbar, cabai, bawang putih, dan mangga untuk memperkaya cita rasanya.

j. Vietnam (*Socialist Republic of Vietnam*)



Tanggal bergabung dengan ASEAN	:	28 Juli 1995
Kepala Negara	:	Presiden Presiden Nguyễn Phú Trọng Presiden Vietnam (sejak 23 Oktober 2018-sekarang),
Kepala Pemerintahan	:	Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc Perdana Menteri Vietnam (sejak 7 April 2016-sekarang)
Sistem Pemerintahan	:	Parlementer
Bentuk Negara	:	Kesatuan
Ibu Kota	:	Hanoi
Bahasa	:	Vietnam
Mata Uang	:	Dong (VND)
Hari Nasional	:	2 September
Lagu Kebangsaan	:	"Tien quan ca" (The Song of the Marching Troops)
Letak Astronomis	:	8° LU–22° LU dan 104° BT–108° BT
Luas Wilayah	:	Darat: 331.000 km2; Laut: 1.000.000 km^2
Jumlah Penduduk	:	95,54 juta jiwa (2018)[65]
Suku Bangsa/Etnis	:	Kinh/Viet (85,7%), Tay (1,9%), Thai (1,8%), Muong (1,5%), Khmer (1,5%), Mong (1,2%), Nung (1,1), Hao (1%), etnis lainnya (4,3%)
Agama	:	Tidak beragama (81,8%), Buddha (7,9%), Katolik (6,6%), Hoahaoisme (1,7%), Protestan (0,9%), Islam (0,1%)
Iklim	:	Bagian utara beriklim sedang, bagian selatan beriklim tropis
Produk Ekspor	:	Alat-alat penyiaran, telepon, sirkuit terpadu, tekstil, alas kaki, alas kaki dari bahan kulit.
Produk Impor	:	Sirkuit terpadu, telepon, minyak suling, komponen kelistrikan, karet
Tujuan Ekspor	:	Amerika Serikat, RRT, Jepang, Korea Selatan, Jerman
Asal Impor	:	RRT, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hongkong
PDB	:	US$ 241.039 juta
PDB Per Kapita	:	US$ 2.546
Destinasi Wisata	:	Ha Long Bay, Kota Tua Hoi An, Kompleks Monumen Hue, Ho Chi Minh City, Hanoi
Kode Domain Internet	:	.vn
Kode Telepon	:	84



Kepala Negara
Sumber Foto
http://www.phuthodfa.gov.vn/tin-tuc/5062/tong-bi-thu--chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-chuc-mung-viet-nam-trung-cu-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc.html



Kepala Pemerintahan
Sumber Foto
http://primeminister.chinhphu.vn/

---

[65] Sumber: Bank Dunia, data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl

Sejarah Singkat Vietnam

Pada 2 September 1945, Vietnam merdeka dari Prancis. Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam di Lapangan Ba Dinh, Hanoi dan dia menjabat sebagai presiden pertama. Pada akhir Perang Dunia kedua, Ho Chi Minh memimpin pasukan yang disebut Viet Minh yang bergerilya untuk menguasai kota-kota besar di Vietnam. Tidak lama kemudian, tahun 1946 Prancis berhasil menaklukkan Vietnam Selatan, lalu mengajak kaum komunis Vietnam untuk berunding.[66] Sayangnya, perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Pada tahun yang sama, Prancis menyerang Kota Haiphong di bagian utara Vietnam hingga menewaskan ribuan orang, sedangkan Viet Minh menyerang Prancis di Kota Hanoi yang menandai berawalnya Perang Indochina yang pertama.[67] Ho Chi Minh merupakan pahlawan bagi bangsa Vietnam karena jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan penyatuan Vietnam. Ketika pasukan Vietnam Utara berhasil menaklukkan Saigon pada tahun 1975 dan menandai penyatuan Vietnam, kota tersebut diganti menjadi Ho Chi Minh City.

Sistem Politik

Republik Sosialis Vietnam ini merupakan negara komunis yang hanya mengakui satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam. Sistem politik pemerintahan di Vietnam menganut sistem parlementer. Kepala negara adalah presiden yang juga merupakan panglima tertinggi militer dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara. Kepala pemerintahan di Vietnam adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden atas persetujuan Majelis Nasional atau parlemen. Majelis Nasional memilih presiden dari anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh perdana menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Majelis Nasional adalah badan tertinggi kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Majelis Nasional adalah sebuah badan unikameral beranggotakan 498 orang yang dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun.

Kondisi Geografis

Vietnam yang berada di paling timur semenanjung Indochina Asia Tenggara ini berbatasan dengan RRT di sebelah utaranya dan berbatasan dengan Laos di sebelah barat laut, serta Kamboja di sebelah barat dayanya, sedangkan di timur dan selatan Vietnam adalah Laut China Selatan. Di bagian selatan Vietnam juga dilewati Sungai Mekong yang bermuara di Laut China Selatan. Delta Sungai Mekong, selain digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat, juga merupakan salah satu tujuan wisata di Kota Ho Chi Minh.

Markah/*Landmark*

Kuil Penyu Emas yang terletak di tengah Danau Hoan Kiem terletak di tengah Kota Hanoi. Danau Hoan Kiem yang memiliki arti “pedang yang dikembalikan’ memiliki legenda tentang Raja Le Loi. Legenda menyebutkan bahwa Raja Le Loi memiliki pedang azimat yang ia gunakan untuk mengusir Cina dari kerajaannya. Raja Le Loi kemudian mengembalikan pedang tersebut kepada Dewa Penyu Emas yang bersemayam di dalam Danau Hoan Kiem.

---

66 Sumber: Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Vietnam/The-two-Vietnams-1954-65

67 Sumber: Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/IndoChina-wars



Gambar 2.25. Kuil Penyu Emas terletak di tengah-tengah Danau Hoan Kiem
Sumber Foto: Laman Berbayar Canva (canva.com)

Sosial Budaya

Tet Nguyen Dan atau disingkat Tet, merupakan tahun baru Vietnam. Seperti halnya Imlek di RRT, saat Tet, orang-orang Vietnam akan berkumpul dengan keluarga, saling memberi angpau yang dibungkus dalam amplop merah, orang-orang mengenakan baju baru, serta mengunjungi kuil untuk menghormati leluhur. Makanan khas saat Tet adalah *banh chung*, semacam lemper berisi daging babi yang dibungkus daun pisang. *Xoi gac* (ketan merah) juga menjadi makanan populer saat Tet karena warna merah yang didapat dari pewarna buah nangka melambangkan nasib baik. *Xoi gac* dihidangkan bersama dengan ayam rebus dan *cha lua*. Selama Tet, sakura merah jambu menjadi bunga yang banyak menghiasi rumah-rumah di Vietnam utara, sementara di Vietnam selatan, *hoa mai* (bunga persik) berwarna kuning dan jingga akan banyak ditemukan.

Ao dai merupakan pakaian nasional bagi perempuan Vietnam. Menurut sejumlah sumber, Ao dai banyak dipengaruhi oleh pakaian kerajaan Dinasti Qing di Tiongkok, yaitu cheongsam. Namun, berbeda dengan cheongsam, Ao dai memiliki belahan dari pinggang hingga ke bawah, dan dikenakan dengan celana panjang. Ao dai mengalami banyak perubahan dari bentuk awalnya. Pada bentuk sebelumnya ao dai memiliki lima belahan, dua di belakang, dua di depan, dan satu di bawah bagian depan. Meskipun ao dai tidak lagi menjadi pakaian sehari-hari, tetapi dalam acara-acara khusus, para perempuan Vietnam masih mengenakannya, misalnya saat Tet (tahun baru Vietnam), pernikahan atau wisuda. Bahkan, di beberapa universitas dan sekolah di Vietnam, ao dai berwarna putih dianggap sebagai seragam sekolah untuk para siswinya.

Vietnam memiliki tradisi tarian dan musik yang sangat kaya. Musik Vietnam sangat beragam di berbagai bagian wilayahnya. Masyarakat di bagian utara Vietnam memiliki budaya yang lebih formal dan memperoleh pengaruh dari budaya Champa dalam berbagai bentuk musik klasiknya. Musik di wilayah selatan sendiri lebih populer dan modern. *Ca trù*– cerita dan puisi klasik Vietnam yang disampaikan dalam bentuk nyanyian dan diiringi dengan alat musik tradisional Vietnam–merupakan salah satu bentuk seni musik tradisional Vietnam yang terkenal di kalangan masyarakat internasional dan masuk dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.

Keragaman etnis Vietnam yang luar biasa membuat negara ini memiliki beragam bentuk tarian. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai program budaya dan festival di Vietnam. Beberapa bentuk tarian tradisional Vietnam, antara lain tarian singa, tarian piring, tarian kipas, dan tarian lentera kekaisaran.[68]

Secara umum, kuliner Vietnam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makanan khas wilayah utara dan selatan Vietnam. Kebanyakan kuliner di bagian utara Vietnam telah berusia beratus-ratus tahun dan memiliki keterikatan dengan legenda setempat. Salah satu yang paling terkenal adalah *bánh chưng*, yaitu kue beras yang dikukus dan disajikan khusus pada saat tahun baru Vietnam. Pada zaman dahulu kala diceritakan bahwa seorang pangeran mengolah masakan dari kacang hijau dan nasi yang dibungkus dengan daun pisang karena terinspirasi dengan hasil bumi negerinya. Karena masakan ini sangat merepresentasikan negerinya, raja memberikan tahtanya kepada sang pangeran. Selain *bánh chưng*, Vietnam juga memiliki sejumlah kuliner yang terkenal, misalnya saja, *phở* (mie kuah dengan tambahan berbagai racikan bumbu dan rempah).

VIETNAM TRIVIA

Tahukah Anda jika Ho Chi Minh yang memiliki panggilan akrab "Paman Ho" dan proklamator RI, Bung Karno, bersahabat erat? Pada 4 Maret 1959, Paman Ho mendapatkan gelar *doktor honoris causa* dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Keduanya dikenal sebagai tokoh perjuangan yang antikolonialisme dan imperialisme. Ho bahkan pernah berkirim surat kepada Soekarno pada 19 November 1945. Isinya, mengajak tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama-sama mengusir kolonialis dan imperialis di Asia mulai dari India, Burma, Indonesia, dan Malaya.

68 Sumber: Atlas Dunia, https://www.worldatlas.com/articles/the-culture-of-vietnam.html

D. Masyarakat ASEAN

Masyarakat ASEAN adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada visi untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang terintegrasi, damai, dan stabil dengan kesejahteraan bersama, yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Visi ASEAN 2020, Deklarasi *ASEAN Concord II*, Piagam ASEAN, *Roadmap for an ASEAN Community* (2009–2015), dan Deklarasi Bali tentang *ASEAN Community in the Global Community of Nations*. Hal ini merefleksikan perkembangan kerja sama ASEAN dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan sejahtera. Masyarakat ASEAN secara spesifik kemudian terbagi menjadi tiga bagian: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN; Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Penjelasan mengenai masing-masing bagian dalam Masyarakat ASEAN adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Politik Keamanan ASEAN** adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada visi untuk menjadi masyarakat ASEAN yang bersatu, inklusif, dan tangguh yang hidup dalam lingkungan yang nyaman, harmonis, dan aman dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi dan sikap moderat serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan norma-norma bersama ASEAN.

2. **Masyarakat Ekonomi ASEAN** adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada visi untuk menjadi masyarakat ASEAN yang terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis, melalui peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral serta menjadi suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan norma-norma bersama ASEAN.

3. **Masyarakat Sosial Budaya ASEAN** adalah suatu masyarakat yang berlandaskan pada visi untuk menjadi masyarakat yang melibatkan dan memberikan manfaat bagi rakyat, dan merupakan suatu masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, kokoh, dinamis, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan norma-norma bersama ASEAN.

Pembahasan peran ASEAN menuju terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015 melalui *Bali Concord III: ASEAN Community in the Global Community of Nations* dan menyusun Rencana Aksi *Bali Concord III* (2012–2022) merupakan inisiasi dari Indonesia. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi ASEAN untuk meningkatkan perannya di tingkat global. Hal ini kemudian diwujudkan melalui pembentukan Masyarakat ASEAN secara resmi pada 31 Desember 2015. Tindak lanjut pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 terus bergulir melalui pengesahan *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Community* dan ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* di KTT ke-27 ASEAN pada 22 November 2015. Pengesahan dilakukan oleh para pimpinan tertinggi negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia untuk melanjutkan upaya integrasi ASEAN.

Tujuan pembentukan Masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal. Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat pada kepentingan rakyat *(people-centered and people-oriented).*

1. Masyarakat Politik- Keamanan ASEAN

Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, atau *ASEAN Political-Security Community* (APSC) merupakan pilar yang menjadi prakarsa Indonesia. Pilar ini dibentuk bersamaan dengan deklarasi pembentukan Masyarakat ASEAN yang dikenal sebagai Bali Concord II oleh para pemimpin ASEAN pada Oktober 2003. Karakteristik APSC adalah memiliki kesamaan nilai dan norma; kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi; serta dinamis dan berpandangan keluar. Cetak Biru APSC 2009--2015 berhasil mencapai tujuan pemeliharaan perdamaian dan stabilitas kawasan. Cetak Biru ini juga mengadopsi pendekatan menyeluruh terhadap keamanan dan pendekatan *outward-looking* dalam hubungan eksternal ASEAN.

Setelah sukses dengan Cetak Biru APSC 2009 – 2015, ASEAN meningkatkan kerja sama politik-keamanan melalui Cetak Biru APSC 2025, yang bertujuan untuk mempertahankan capaian-capaian yang telah ada guna meningkatkan kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi. APSC ASEAN bertujuan untuk terus menciptakan masyarakat yang hidup berdasarkan hukum dan bersifat inklusif, setiap orang menikmati hak asasinya, kebebasan dasar, dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN akan hidup dalam lingkungan yang aman dan memiliki kapasitas lebih untuk menanggapi secara efektif munculnya tantangan-tantangan baru dalam sebuah wilayah yang dinamis.

Cetak Biru APSC 2025 ditujukan untuk memajukan ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat *(people-oriented, people-centered)* di semua sektor kemasyarakatan. Terlepas dari gender, ras, agama, bahasa, atau latar belakang sosial budaya, masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan Masyarakat ASEAN.



Gambar 2.26. Karakteristik Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN

Karakteristik dan elemen Cetak Biru APSC 2025 adalah sebagi berikut:

1. Masyarakat yang berdasarkan hukum, berorientasi, dan berpusat kepada rakyat yang disatukan oleh berbagai prinsip dasar, nilai, dan norma yang sama, yaitu rakyat dapat menikmati hak asasi, kebebasan dasar dan keadilan sosialnya, memeluk nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, dan identitas serta takdir yang sama.
2. Masyarakat yang berdaya tahan tinggi dalam kawasan yang damai, aman dan stabil, memiliki kapasitas lebih untuk menanggapi secara efektif dan tepat berbagai tantangan terhadap kebaikan bersama di ASEAN, sejalan dengan prinsip keamanan komprehensif.
3. Masyarakat yang berorientasi ke luar yang memiliki kerja sama eksternal yang kuat, menjaga dan memperkuat sentralitas ASEAN di tengah guliran arsitektur kawasan, dan memainkan peran yang bertanggung jawab dan konstruktif di tataran global berdasarkan suatu platform bersama ASEAN mengenai berbagai isu internasional.
4. Masyarakat dengan kapasitas institusional yang semakin diperkuat melalui perbaikan proses dan koordinasi kerja ASEAN, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja organ dan lembaga ASEAN, termasuk Sekretariat ASEAN yang semakin kuat, dan penguatan kehadiran ASEAN sebagai lembaga pada tingkat nasional, regional, dan internasional.

ISU-ISU POLITIK KEAMANAN

Dalam pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, isu-isu strategis dan kerja sama politik-keamanan yang dipandang strategis oleh Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu isu keamanan kawasan, pemberantasan kejahatan lintas negara, keamanan maritim, serta hukum dan hak asasi manusia.

a. Keamanan Kawasan

Beberapa hal yang mengemuka dalam masalah keamanan kawasan, antara lain adalah penandatanganan Protokol *Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone* (SEANWFZ) oleh *Nuclear Weapon States* (NWS), isu Laut China Selatan (LCS), pembangunan arsitektur kawasan, resolusi dan manajemen konflik serta pertahanan dan stabilitas kawasan.

1. Traktat SEANWFZ merupakan suatu traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Sebagai tindak lanjut, untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah massal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ. Kendati telah ditandatangani sejak 1995, SEANWFZ tidak dapat berlaku secara efektif karena belum diakui oleh negara pemilik senjata nuklir (P5), yaitu Amerika Serikat, Rusia, RRT, Inggris dan Prancis. Kelima negara ini belum menandatangani Protokol Traktat dimaksud kendati telah terdapat berbagai upaya untuk mendorong proses ini. Hal ini menjadikan SEANWFZ sebagai satu-satunya perjanjian kawasan bebas nuklir yang belum diaksesi oleh negara P5 tersebut.

   Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir merupakan salah satu prioritas utama Indonesia di ASEAN. Hal ini mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rawan dilewati dan disinggahi oleh kapal-kapal pengangkut senjata nuklir. Penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ diharapkan dapat mengikat negara pemilik senjata nuklir untuk mematuhi aturan main dan menjamin kawasan Asia Tenggara tidak menjadi sasaran dari senjata nuklir.

Indonesia telah menyusun sebuah *concept paper* untuk mendorong percepatan proses penandatanganan Protokol Traktat SEANWFZ. *Concept paper* ini berisi usulan penandatanganan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, yaitu RRT dan kemudian negara NWS *(Nuclear Weapon State)* yang reservasinya paling bisa diterima. Indonesia akan terus mendorong pembahasan tindak lanjut dari matriks tersebut dan memastikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.

2. Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah laut dan jalur pelayaran strategis dengan negara pantai yang meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi karena adanya klaim yurisdiksi yang tumpang tindih di antara beberapa negara pengklaim, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam dan RRT. Guna menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menlu ASEAN telah mengeluarkan ASEAN *Declaration on the South China Sea* pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2002, ASEAN bersama RRT mengeluarkan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC). DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara-negara ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa, dengan semangat kerja sama dan saling percaya serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

   Sejak tahun 2013, Indonesia mengajukan formula 3+1 yang menjadi cikal bakal pembentukan tata perilaku (*Code of Conduct*/COC) di Laut China Selatan. COC ini bertujuan antara lain untuk: (1) meningkatkan rasa saling percaya antarnegara, (2) mencegah insiden, (3) mengatasi eskalasi insiden sekiranya terjadi, serta menciptakan suasana kondusif demi penyelesaian COC. Indonesia terus mendorong optimalisasi forum ASEAN-*China Senior Officials' Meeting* (SOM) *on DOC* dan ASEAN-*China Joint Working Group* (JWG) *on DOC* untuk memajukan implementasi DOC secara penuh dan efektif. ASEAN dan RRT berhasil menyepakati kerangka COC di Laut China Selatan pada pertemuan ke-14 *SOM on DOC* di Guiyang, RRT, 18 Mei 2017. ASEAN dan RRT juga telah menyepakati bahwa negosiasi dilakukan dalam tiga tahap (*three readings*). Saat ini ASEAN terus berupaya melanjutkan penyusunan dan pembahasan substantif guna mencapai penyelesaian COC tersebut.

   Dalam isu Laut China Selatan, Indonesia senantiasa mendorong penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea* (COC) dan terus berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tengah perkembangan dinamika global. Selain perundingan COC, Indonesia akan terus mendorong peningkatan dan inisiatif kegiatan kerja sama maritim praktis antara ASEAN dan RRT untuk kawasan LCS, dalam rangka terciptanya situasi yang kondusif.

3. ASEAN memegang peran penting dalam pembangunan arsitektur kelembagaan di tingkat kawasan. Negara-negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN menyadari peran penting ASEAN dalam membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai. Dengan pengakuan ini, ASEAN telah mengukuhkan diri sebagai "inti pemersatu kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik".

   Peran ASEAN dalam mencapai stabilitas di kawasan telah memberikan jaminan bagi negara-negara anggota ASEAN serta mitranya di kawasan bahwa ASEAN memiliki karakteristik yang tenang dan ramah serta berkomitmen terhadap prinsip tidak ikut campur tangan *(non-interference)* dalam politik dalam negeri negara lain. Indonesia berkepentingan untuk menciptakan hasil-hasil yang konkret dari berbagai pertemuan dan dapat memberikan ruang bagi penyelesaian berbagai agenda dan tantangan

di kawasan. Kepentingan ini sejalan dengan peran ASEAN dalam pembangunan arsitektur kawasan yang ditujukan untuk menjawab tantangan baru di kawasan, menghilangkan krisis kepercayaan, dan berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa secara damai, serta menghadapi berbagai perubahan geopolitik di kawasan.

KONSEP INDO-PASIFIK

Untuk menyikapi perkembangan dan tantangan di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik termasuk persaingan kekuatan besar di kawasan, sejak tahun 2018 Indonesia menggagas konsep kerja sama Indo-Pasifik. Indonesia berpandangan bahwa Kawasan Samudera Hindia dan Pasifik seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan yang dapat saling bekerja sama dan saling menguntungkan.

2018

Prinsip-prinsip kerja sama Indo-Pasifik yang dikedepankan Indonesia adalah prinsip keterbukaan, inklusivitas, transparansi, penghormatan terhadap hukum internasional, pengarusutamaan kebiasaan berdialog, serta pengutamaan sentralitas ASEAN.

Konsep Indo-Pasifik tersebut intinya juga menekankan pada prinsip-prinsip berinteraksi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan menghindari penggunaan cara-cara kekerasan maupun kekuatan senjata.

Konsep Indo-Pasifik juga dimaksud untuk mempromosikan wawasan baru guna memandu kerja sama yang relevan dalam menghadapi berbagai dinamika di wilayah Indo-Pasifik, yaitu maritim, konektivitas dan SDGs dengan memperkuat mekanisme ASEAN yang ada, khususnya *East Asia Summit* (EAS)

Pada tanggal 21 Juni 2019, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah membahas secara mendalam *Outlook* dimaksud dan menyepakatinya yang kemudian disahkan oleh para Pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN dengan nama dokumen "*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*" (AOIP).

21 Juni 2019

Para Pemimpin ASEAN mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam perumusan dan finalisasi negosiasi AOIP. *Outlook* ini kemudian akan diimplementasikan dalam bentuk kerja sama praktis yang saling menguntungkan berdasarkan 4 bidang kerja sama di bawah payung AOIP.

Gambar 2.27. Konsep Indo-Pasifik

4. Dalam bidang Resolusi dan Manajemen Konflik, Indonesia senantiasa mendukung upaya ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan, termasuk manajemen dan resolusi konflik. Hal tersebut tercermin dengan Indonesia menjadi pemrakarsa pendirian ASEAN *Instititute for Peace and Reconciliation* (AIPR), sebuah lembaga penelitian dan peningkatan kapasitas di bidang promosi perdamaian dan rekonsiliasi konflik di kawasan. Pendirian AIPR disahkan secara resmi oleh Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh bulan November 2012. AIPR memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara penggerak proses perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan.

   Indonesia berkepentingan untuk terus mendorong AIPR agar dapat menjadi lembaga yang berperan aktif dalam mendorong penyelesaian damai dari konflik-konflik yang terjadi di kawasan dan di tingkat global. AIPR juga akan menjadi lembaga yang penting dalam mendorong penyebaran budaya damai melalui penghormatan nilai-nilai toleransi dan moderasi sebagai kekuatan dalam mencapai harmoni, keamanan, dan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan. Dengan telah tersedianya kantor AIPR di Kompleks Pusdiklat Kemlu, Jakarta, beberapa kegiatan awal AIPR telah dapat dilaksanakan meliputi simposium dan seminar serta kegiatan lain terkait penyelesaian konflik dan rekonsiliasi. Selain itu, Indonesia juga membiayai operasionalisasi awal AIPR selama 3 tahun pertama (2017--2020). Direktur Eksekutif AIPR untuk periode 2017--2020 adalah Duta Besar Rezlan Izhar Jenie yang berasal dari Indonesia.

5. Dalam bidang Pertahanan, Perdamaian, dan Stabilitas Kawasan, ASEAN memiliki kerja sama dalam berbagai mekanisme dan forum, yaitu antara lain:

   ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) & ADMM-Plus

   ADMM dan ADMM-Plus adalah forum pertemuan rutin Menteri Pertahanan ASEAN dan Menteri Pertahanan Negara Mitra. Anggota ADMM terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN. Sementara itu, ADMM-Plus terdiri atas 10 negara ASEAN dan 8 (delapan) Mitra Wicara ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, RRT, Korea Selatan, Rusia, dan Selandia Baru.

   Kerja sama di bawah kedua mekanisme tersebut ditujukan untuk meningkatkan rasa saling percaya antarnegara anggota dan negara mitra guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kerja sama di bawah ADMM dan ADMM-Plus difokuskan pada 7 (tujuh) fokus area kerja sama, yakni bantuan kemanusiaan dan bencana, kerja sama medis militer, penanggulangan terorisme, keamanan maritim, operasi penjaga perdamaian, aksi kemanusiaan dalam memberantas ranjau, dan keamanan siber.

   ASEAN Peacekeeping Centers' Network (APCN)

   APCN merupakan wadah kerja sama antar Pusat Misi Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping Centers*/PKC) di negara-negara ASEAN yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pertukaran informasi dan tenaga ahli. Sejak didirikan pada tahun 2011, APCN telah berperan besar dalam peningkatan kapasitas para pasukan penjaga perdamaian di negara-negara ASEAN dan berkontribusi menyukseskan misi-misi penjaga perdamaian PBB di seluruh dunia.

   ASEAN Regional Mine Action Center (ARMAC)

   Guna mewadahi kerja sama penanggulangan ranjau dan bahan peledak sisa perang *(Explosive Remnants of War*/ERW), ASEAN telah menyepakati pembentukan ASEAN *Regional Mine Action Center* (ARMAC). Aktivitas ARMAC dilakukan melalui pertukaran pengalaman, pelatihan, serta peningkatan kapabilitas. Markas ARMAC berlokasi di Kamboja dan telah diresmikan pada tanggal 25 Mei 2016.

b. Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara

Untuk kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN secara rutin menggelar pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). AMMTC adalah forum pertemuan setingkat Menteri atau Kepala Kepolisian jika di Indonesia. Berdasarkan Rencana Aksi ASEAN untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara *(ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime)*, terdapat 10 (sepuluh) fokus area kerja sama yang dilakukan di bawah AMMTC, yaitu: (1) terorisme *(counter terrorism)*, (2) kejahatan siber *(cybercrime)*; (3) perdagangan gelap dan penyelundupan narkoba *(illicit drug trafficking),* (4) perdagangan manusia *(trafficking in persons),* (5) pencucian uang *(money laundering)*, (6) penyelundupan senjata *(arms smuggling)*, (7) perompakan *(sea piracy)*, (8) kejahatan ekonomi internasional *(international economic crime)*, (9) penyelundupan kayu dan satwa liar *(illicit trafficking in wildlife and timber),* dan (10) penyelundupan manusia *(people smuggling).*

c. Kerja Sama Keamanan Maritim

Keamanan maritim sangat krusial bagi terciptanya stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara dan kawasan yang lebih luas. Isu-isu terkait keamanan maritim merupakan salah satu bidang yang paling mendesak dan memiliki peluang kerja sama yang berguna di kawasan. Indonesia merupakan salah satu penggerak utama pemajuan kerja sama dan pembahasan isu-isu maritim dalam berbagai kerja sama baik di ASEAN maupun pada mekanisme ASEAN yang melibatkan negara Mitra Wicara, seperti ASEAN *Maritime Forum* (AMF), *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Foreign Ministers Meeting* (AMM) dan ASEAN *Senior Officials Meeting* (SOM), ASEAN *Defence Ministers' Meeting* (ADMM) *and* ADMM *Plus*, dan ASEAN *Ministers' Meeting on Transnational Crime* (AMMTC).

d. Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada level regional, ASEAN memiliki sebuah komisi bernama ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang diresmikan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-15 ASEAN tanggal 23 Oktober 2009 di Cha-Am Hua Hin, Thailand. AICHR merupakan lembaga HAM yang bersifat menyeluruh dan memiliki mandat pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.

PENANGANAN ISU KEAMANAN DI RAKHINE STATE, MYANMAR

Indonesia telah berperan secara aktif dalam upaya mengembalikan situasi yang kondusif di wilayah Rakhine State, Myanmar, baik secara bilateral maupun regional. Adapun sejumlah inisiatif yang telah dilakukan Indonesia, antara lain:



Atas upaya diplomasi Menlu RI, Myanmar mengundang para Menlu ASEAN dalam *ASEAN Foreign Ministers' Retreat* pada 19 Desember 2016 di Yangon, Myanmar. Pada *Retreat* tersebut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Myanmar atas inisiatif pelaksanaan *Retreat* tersebut, yang ditegaskan oleh Menlu RI sebagai bentuk kedewasaan ASEAN sebagai suatu keluarga dan Masyarakat ASEAN. Indonesia juga mendorong Myanmar untuk memberikan pemutakhiran berkala terkait situasi di Rakhine State. Selain menyampaikan keprihatinan atas kondisi keamanan dan kemanusiaan, Indonesia menegaskan pentingnya memberikan akses bantuan kemanusiaan yang lebih besar salah satunya melalui *existing mechanism* yang ada di ASEAN.



Atas dorongan Indonesia, ASEAN memainkan peran aktif dalam membantu Myanmar menangani masalah Rakhine State. Melalui *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center)*, Indonesia telah mendorong dilakukannya *Needs Assessment* guna mengidentifikasi bantuan yang dapat diberikan ASEAN dalam memfasilitasi repatriasi pengungsi.



Melalui AICHR, Indonesia juga terus mendorong pembahasan isu Rakhine State di ASEAN. Wakil Indonesia untuk AICHR secara konsisten mendorong agar isu Rakhine dibicarakan dalam AICHR.

Gambar 2.28. Penanganan Isu Keamanan di Rakhine State, Myanmar

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bagian utuh dari 3 (tiga) pilar Masyarakat ASEAN yang saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk menjadikan Masyarakat ASEAN yang *people-centered dan people-oriented*, Masyarakat ASEAN harus dibangun secara kohesif dan seimbang di antara ketiga pilar. MEA juga merupakan sebuah proses integrasi ekonomi yang berkesinambungan. Pasca MEA 2015, proses integrasi ekonomi berlanjut dengan tahapan berikutnya yakni MEA 2025 (MEA Fase Kedua). Dokumen ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* yang disahkan pada KTT ke-27 ASEAN (November 2015) menjadi panduan kerja sama ASEAN untuk 10 tahun ke depan. Fokus ASEAN dalam dekade ini adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, *good governance* dan *green technology.*



Gambar 2.29. Pilar MEA 2025

Dari kelima pilar tersebut telah disusun Rencana Aksi Strategis masing-masing sektor. Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Masyarakat Ekonomi ASEAN hingga tahun 2025.

Perkembangan Kerja Sama Ekonomi ASEAN

a. Perdagangan Barang

Sejak tahun 1993 ASEAN telah mewujudkan aliran bebas perdagangan barang dengan mengurangi biaya yang dikenakan atas barang masuk dari negara anggota, melalui kerja sama *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Saat ini, ASEAN telah berhasil menghapus 99,20% dari daftar seluruh barang masuk yang dikenakan biaya di Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand (ASEAN-6), sedangkan di negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV) mencapai 97,81%. Upaya untuk mempermudah aliran bebas perdagangan barang pun berlanjut dengan ditandatanganinya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

Pada tanggal 9 Desember 2009, negara anggota ASEAN menandatangani perjanjian pembentukan ASEAN *Single Window* (ASW). ASW merupakan *platform* yang terintegrasi dengan National *Single Window* masing-masing negara anggota ASEAN guna memperlancar pertukaran data kepabeanan secara elektronik untuk pengurusan dokumen ekspor dan impor. ASW dimaksudkan untuk mendukung integrasi ekonomi kawasan, khususnya dalam fasilitasi perdagangan *(trade facilitation)* dan memperlancar arus pergerakan perdagangan barang.

b. Perdagangan Jasa

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Negara Anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), yaitu sebuah kesepakatan bidang jasa yang memungkinkan para pengusaha atau perusahaan mendapat kemudahan melakukan kegiatan ekonomi bidang jasa di wilayah Negara Anggota ASEAN. Pada pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN bulan Maret 2019 disepakati bahwa seluruh sektor jasa dalam AFAS diintegrasikan ke dalam ASEAN *Trade in Services Agreement* (ATISA). ATISA merupakan perjanjian bidang jasa yang komprehensif, menggunakan pendekatan *negative list,* dan menggunakan AFAS 10 sebagai penyertaan modal asing (FEP).

Sebagai upaya memfasilitasi pergerakan atau perpindahan tenaga kerja profesional, ASEAN juga telah menandatangani *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) sejak tanggal 9 Desember 2005 dan ASEAN *Agreement on the Movement of Natural Persons* (MNP) pada November 2012. Hingga saat ini, ASEAN telah memiliki 8 MRA yakni untuk profesi insinyur, arsitek, *surveyor,* dokter, dokter gigi, perawat kesehatan, jasa pariwisata, dan akuntan. MRA tidak otomatis akan membawa pergerakan tenaga profesional secara bebas di antara negara anggota ASEAN. Hal ini dikarenakan MRA bersifat *voluntary* dan masih harus dikomitmenkan oleh negara ASEAN satu sama lain.

Berbeda dengan MRA, kesepakatan MNP memberikan jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang MNP dan juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan perdagangan dalam jasa dan investasi. Perjanjian MNP hanya mengatur pergerakan tenaga kerja profesional. Pelaksanaan komitmen liberalisasi dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk ASEAN MNP *Agreement* diatur dalam *Schedule of Commitment* (SoC) masing-masing negara. Implementasi dari perjanjian hanya berlaku untuk sektor-sektor pekerjaan yang dikomitmenkan ke dalam SoC dimaksud dan tidak berlaku untuk sektor-sektor yang tidak dikomitmenkan *(positive list).*

c. Investasi

ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) merupakan kerja sama ASEAN sektor investasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Tujuan yang hendak dicapai melalui kerja sama ini adalah terciptanya kawasan investasi ASEAN yang terbuka dan transparan sehingga dapat meningkatkan arus investasi kawasan. Terdapat empat pilar ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Dalam tata kerjanya, kerja sama investasi di ASEAN berjalan di bawah ASEAN *Investment Area* (AIA), dibantu oleh Koordinator Komite untuk Investasi dan bertanggung jawab kepada Menteri Ekonomi di ASEAN. Indonesia telah meratifikasi ACIA melalui Perpres No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA).

d. Keuangan

Dalam kerja sama jasa keuangan, negara ASEAN sepakat untuk menandatangani *Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance* yang ditandatangani di Thailand pada tahun 1997, dan merupakan kerangka dasar peningkatan kerja sama ASEAN di bidang keuangan. Kerja sama bidang keuangan ini dilakukan oleh *Working Committee on ASEAN Financial Service Liberalisation* (WCFSL) AFAS. Tujuan dari kerja sama sektor keuangan ini adalah membangun stabilitas keuangan (*financial stability*), keuangan inklusif *(financial inclusiveness)* dan jaringan keamanan keuangan *(financial safety net)* untuk menopang terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Salah satu bentuk kerja sama jasa keuangan di ASEAN adalah *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) yang terbentuk pada 24 Maret 2010. CMIM adalah inisiatif ASEAN+3 dengan dua tujuan utama, yakni menyediakan bantuan likuiditas jangka pendek melalui *self-managed reserve pooling arrangement (pooling fund)*, dan sebagai suplemen atas mekanisme keuangan internasional yang sudah berjalan. Pada bulan April 2011, ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO) didirikan sebagai *regional monitoring and surveillance* unit yang mendukung implementasi dari CMIM. AMRO juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan institusi keuangan regional dan multilateral, termasuk dengan *Asian Development Bank* (ADB), IMF, dan *Bank for International Settlements* (BIS), khususnya di bidang yang akan meningkatkan kapasitas institusi AMRO. Pertemuan ASEAN+3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada bulan Mei 2014 menegaskan komitmen untuk memperkuat peran CMIM sebagai jaring pengaman keuangan regional.

e. Konektivitas

ASEAN telah mengadopsi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025 pada KTT ke-28 ASEAN pada tanggal 6 September 2016 di Laos. Melalui MPAC, ASEAN berupaya mewujudkan kawasan yang terhubung dan terintegrasi untuk menumbuhkan semangat persaingan, inklusifitas dan membangun rasa memiliki Masyarakat ASEAN.

5 pilar tersebut merupakan kunci bagi ASEAN untuk meningkatkan konektivitas fisik, institusi, dan manusia di kawasan demi mewujudkan visi ASEAN 2025.



Gambar 2.30. Lima pilar utama konektivitas di ASEAN dalam MPAC

f. Kerja Sama Transportasi ASEAN

Kerja sama sektor transportasi di ASEAN bertujuan untuk menyediakan jaringan infrastruktur transportasi yang aman, efisien dan inovatif. Kerja sama di sektor ini didasarkan pada *Kuala Lumpur Transport Strategic Plan* (KLTSP) sebagai lanjutan dari ASEAN *Strategic Transport Plan / Brunei Action Plan* (BAP). KLTSP merupakan dokumen pedoman kebijakan regional berisi 30 target spesifik, 78 aksi, dan 221 titik capaian di bidang transportasi udara, darat, maritim, *sustainable transport,* serta fasilitasi transportasi.

g. Kerja Sama Energi ASEAN

Kerja sama energi di kawasan ASEAN bertujuan untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan pasokan energi melalui diversifikasi, pengembangan dan konservasi sumber daya, penggunaan energi yang efisien, dan penerapan yang lebih luas dari teknologi yang ramah lingkungan. Kerja sama energi tertuang dalam ASEAN *Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC). Tema APAEC 2016-2025 *Phase 1* adalah *Enhancing Energy Connectivity and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy Security, Accessibility, Affordability and Sustainability for All.*

h. Ketahanan Pangan

Pada tahun 2009 para pemimpin ASEAN menyampaikan komitmen untuk menjaga ketahanan pangan kawasan melalui kesepakatan *Strategy on Food Security in the ASEAN Region.* Sebagai implementasi dari pernyataan tersebut, telah disusun kerangka kerja dan Rencana Aksi untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di kawasan ASEAN. Tidak hanya itu, pada tahun 2012, melalui kerja sama dengan RRT, Korea Selatan dan Jepang telah disepakati ASEAN *Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement* (APTERR) dengan tujuan menjaga cadangan beras dalam keadaan darurat seperti bencana alam. Selanjutnya pada pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN tahun 2015 ASEAN menyepakati Rencana Strategis Kerja Sama ASEAN di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan tahun 2016--2025 yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan, nutrisi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN.

i. Perikanan

Kerangka kerja sama perikanan di bawah pilar ekonomi ASEAN diatur dalam tiga instrumen, yaitu:

1. *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC), yang diberikan mandat untuk melakukan riset, mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pertukaran informasi di bidang perikanan untuk mewujudkan pembangunan *aquaculture* yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara
2. *ASEAN Fisheries Consultative Forum* (AFCF), untuk mempromosikan pemanfaatan Sumber Daya Laut secara berkelanjutan melalui manajemen sumber daya yang baik
3. *ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership* (ASSP), yang telah menyepakati *Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation on Fisheries* 2016--2020, yang disusun untuk mendukung implementasi SP-FAF (2016-2025). Rencana strategis ini mengandung tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, meningkatkan fasilitasi perdagangan produk perikanan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, dan memberikan bantuan bagi produsen untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

j. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kerja sama ASEAN di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah dirintis sejak tahun 1985 melalui pembentukan ASEAN *Working Group on Small and Medium Enterprises Agencies*. Selanjutnya, kerja sama diteruskan dalam ASEAN *Strategic Action Plan for SME Development* (SAP SMED) 2012—2015.

Kerja sama di bidang Usaha Kecil dan Menengah sangat penting bagi negara-negara ASEAN karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian mereka. Statistik menunjukkan bahwa (i) jumlah total UMKM di ASEAN mencapai 96% dari seluruh perusahaan; (ii) kontribusi penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 50—97%; (iii) memiliki kontribusi terhadap PDB sekitar 30—60%, dan; (iv) berkontribusi terhadap ekspor sekitar 19—31%.

Walaupun demikian, UMKM selalu dihadapkan pada persoalan seperti akses pada keuangan permodalan, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, pada pertemuan ke-47 ASEAN *Economic Ministers' Meeting* (AEM) bulan Agustus 2015, para Menteri Ekonomi telah mengesahkan ASEAN *Strategic Action Plan for SME Development (*SAP SMED) 2016-2025 (SAP SMED 2025) yang disahkan pada KTT ke-27, November 2015. SAP SMED 2025 ditargetkan pada peningkatan produktivitas, teknologi dan inovasi, akses keuangan, akses pasar dan internasionalisasi, kebijakan dan peraturan, serta wirausaha dan kapasitas SDM.

k. Pariwisata

Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata diatur dalam ASEAN *Tourism Strategic Plan* (ATSP) 2016--2025. ATSP mengusung visi ASEAN *as single tourism destination*, yang akan memberikan kontribusi signifikan pada sosio-ekonomi masyarakat ASEAN dengan tagline *"One Community Towards Sustainability".* Target hasil kerja sama pariwisata ASEAN adalah menjadikan ASEAN sebagai tujuan pariwisata yang berkualitas tinggi yang mampu menawarkan pengalaman ASEAN yang unik, beragam, serta memegang teguh nilai kebudayaan, pembangunan berkelanjutan serta pembangunan sektor pariwisata yang inklusif *(sustainable, balanced and inclusive tourism).* Dalam rangka mendorong upaya memasarkan ASEAN sebagai *single tourism destination*, pada bulan Agustus 2017, ASEAN *National Tourism Organisations* berhasil mengesahkan *the* ASEAN *Tourism Marketing Strategy* (ATMS) 2017--2020.

l. Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi, ASEAN memiliki ASEAN *Information & Communication Technology* (AIM) tahun 2015, yang dikoordinasikan oleh Menteri Teknologi dan Informasi. Dokumen tersebut memuat 6 dorongan strategis, yaitu (i) transformasi ekonomi, (ii) pendekatan dan pemberdayaan masyarakat, (iii) inovasi, (iv) pengembangan infrastruktur, (v) peningkatan SDM, dan (vi) penghubung kesenjangan digital.

Implementasi AIM 2015 dikoordinasikan oleh TELMIN dengan melibatkan ASEAN *Telecommunications and IT Senior Officials Meeting* (TELSOM) dan ASEAN *Telecommunication Regulators' Council* (ATRC) dalam mendukung pembuatan kebijakan. Selain itu, juga dibentuk ASEAN *ICT Center* untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program AIM 2015. Selama periode 2011--2015, terdapat 29 langkah aksi dan 87 proyek AIM 2015 yang telah selesai diimplementasikan. Pada 1st TELSOM-ATRC *Leaders' Retreat* bulan Maret 2017 berhasil disahkan the ASEAN *Cybersecurity Cooperation Strategy,* di antaranya: (i) ASEAN *Personal Data Protection Framework,* (ii) ASEAN *Framework on Security*, dan (iii) *Brunei Darussalam Declaration.*

m. Sains, Teknologi dan Inovasi

Kerja sama ASEAN di bidang sains dan teknologi pertama kali dicetuskan pada pertemuan *Ad-hoc Committee on Science and Technology* di Jakarta tanggal 27--29 April 1970. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa tujuan kerja sama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni:

1. menginisiasi dan mengintensifkan kerja sama regional dalam bidang ilmu pengetahuan;
2. menghasilkan dan mempromosikan pengembangan tenaga ahli dan tenaga kerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan ASEAN;
3. memfasilitasi dan mempercepat transfer perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antarnegara anggota ASEAN serta dari negara industri maju ke kawasan ASEAN;
4. memberikan dukungan dan bantuan dalam aplikasi hasil penelitian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif di kawasan ASEAN; dan
5. memberikan dukungan terhadap implementasi program ASEAN.

ASEAN-Led Mechanism

Selain menjalin kerja sama ekonomi dengan satu sama lain, negara anggota ASEAN juga menjalin kerja sama ekonomi dengan negara–negara di luar kawasan melalui mekanisme yang dibangun dalam ASEAN *(ASEAN-led mechanism)* sebagai upaya untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan ekonomi global. Beberapa bentuk kerja sama ASEAN dalam bentuk FTA+mitra wicara, yaitu:

a. ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)

Kerja sama ekonomi ASEAN-Australia-Selandia Baru dilakukan dalam kerangka ASEAN-*Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement* (AANZFTA). Proses negosiasi AANZFTA dimulai pada tahun 2005 dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. AANZFTA secara signifikan telah meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi para pihak. Manfaat yang diperoleh dari kerja sama melalui kerangka AANZFTA adalah (i) pengurangan dan eliminasi tarif, (ii) peningkatan kesempatan mengenai aturan keterangan asal barang *(rules of origin),* (iii) mendorong kepastian dalam berinvestasi, dan (iv) menyediakan wadah kerja sama yang lebih komprehensif antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Volume perdagangan ASEAN dengan Australia pada tahun 2018 mencapai US$ 68,1 miliar, sedangkan dengan Selandia Baru mencapai US$ 10,5 miliar.

b. ASEAN-China FTA (ACFTA)

Pada Pertemuan ke-16 *ASEAN-China Summit* tanggal 9 Oktober 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, para Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN dan RRT menyambut inisiatif untuk melakukan *upgrading* ACFTA. Adapun latar belakang dari *upgrading* tersebut adalah agar ACFTA dapat merespons perkembangan arsitektur ekonomi dunia. Sebagai upaya *upgrading*, Menteri Ekonomi ASEAN dan RRT telah menandatangani *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements Thereunder* di Kuala Lumpur pada 22 November 2015.

Protokol ini meliputi beberapa elemen penting dalam kerja sama ekonomi kedua pihak yaitu perdagangan barang (kepabeanan dan fasilitasi perdagangan), jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi teknik. Protokol ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan menyeimbangkan neraca perdagangan kedua pihak. Hal ini terutama karena telah disepakatinya pelonggaran persyaratan asal barang (ROO) oleh RRT bagi

sejumlah produk ekspor unggulan ASEAN seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, furnitur, kertas, dan produk kertas, produk kimia dasar dan hilir, biji besi, pupuk, plastik dan produk plastik, besi baja, produk logam, otomotif, pesawat, dan alas kaki.

Indonesia mendorong realisasi target perdagangan dua arah sebesar US$ 1 triliun dan target total investasi sebesar US$ 150 miliar pada tahun 2020, dengan fokus utama penyeimbangan neraca perdagangan baik antara RRT-ASEAN maupun RRT dengan masing-masing negara anggota ASEAN.

c. ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA)

Perundingan ASEAN-*Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA) bergulir sebagai pelaksanaan dari amanat pemimpin ASEAN pada KTT ke-23 (Oktober 2013). Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Hong Kong, RRT menandatangani AHKFTA di Manila pada 12 November 2017. Indonesia saat ini masih dalam proses ratifikasi agar kesepakatan AHKFTA dapat dimanfaatkan.

Kesepakatan AHKFTA bertujuan untuk menghapus/mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan fasilitasi perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan Hong Kong, RRT melalui, antara lain: (i) Penghapusan progresif dan penurunan hambatan tarif dan non tarif secara substansial dalam seluruh perdagangan barang, (ii) Liberalisasi perdagangan jasa secara progresif dengan jangkauan sektoral substansial, (iii) Promosi dan peningkatan peluang-peluang penanaman modal, serta (iv) Peningkatan berbagai kerja sama ekonomi yang menunjang peningkatan arus perdagangan kedua pihak.

d. ASEAN-India FTA (AIFTA)

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN *and India* ditandatangani para Pemimpin ASEAN dan India pada bulan Oktober 2003. Kerja sama ini dilanjutkan dengan penandatanganan AIFTA *Trade in Goods* (TIG) *Agreement* pada Agustus 2009, dan efektif berlaku pada tahun 2010. Total nilai perdagangan ASEAN dengan India mengalami peningkatan yang signifikan dari US$ 56.7 miliar di tahun 2010 menjadi US$ 84,9 miliar di tahun 2018.

e. ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP)

Kerja sama ekonomi ASEAN-Jepang dilakukan dalam kerangka *Agreement on Comprehensive Economic Partnership Among ASEAN Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* (AJCEP) yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN dan Jepang pada pada bulan Maret dan April 2008 secara *ad-referendum*. Perjanjian tersebut telah berlaku efektif sejak 1 Desember 2008. AJCEP merupakan perjanjian ekonomi antara ASEAN dan Jepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdagangan barang, jasa, investasi, *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan kerja sama ekonomi. Indonesia telah meratifikasi perjanjian AJCEP melalui Perpres No. 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antarnegara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.

f. ASEAN-Korea FTA (AKFTA)

Pembentukan ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA) disepakati pada KTT ASEAN di Bali, Oktober 2003. Negosiasi AKFTA dimulai pada awal 2005 dan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* antara ASEAN-ROK ditandatangani pada 13 Desember 2005. Perjanjian tersebut disepakati untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas melalui mekanisme menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun nontarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerja sama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak AKFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan Korea.

Tujuan AKFTA antara lain memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota, meliberalisasi secara progresif, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem yang transparan, serta untuk mempermudah investasi, menggali bidang-bidang kerja sama yang baru, dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam-CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara Negara Anggota ASEAN. Implementasi nyata AKFTA diharapkan dapat mendorong pencapaian target perdagangan dua arah sebesar US$ 200 miliar pada tahun 2020.

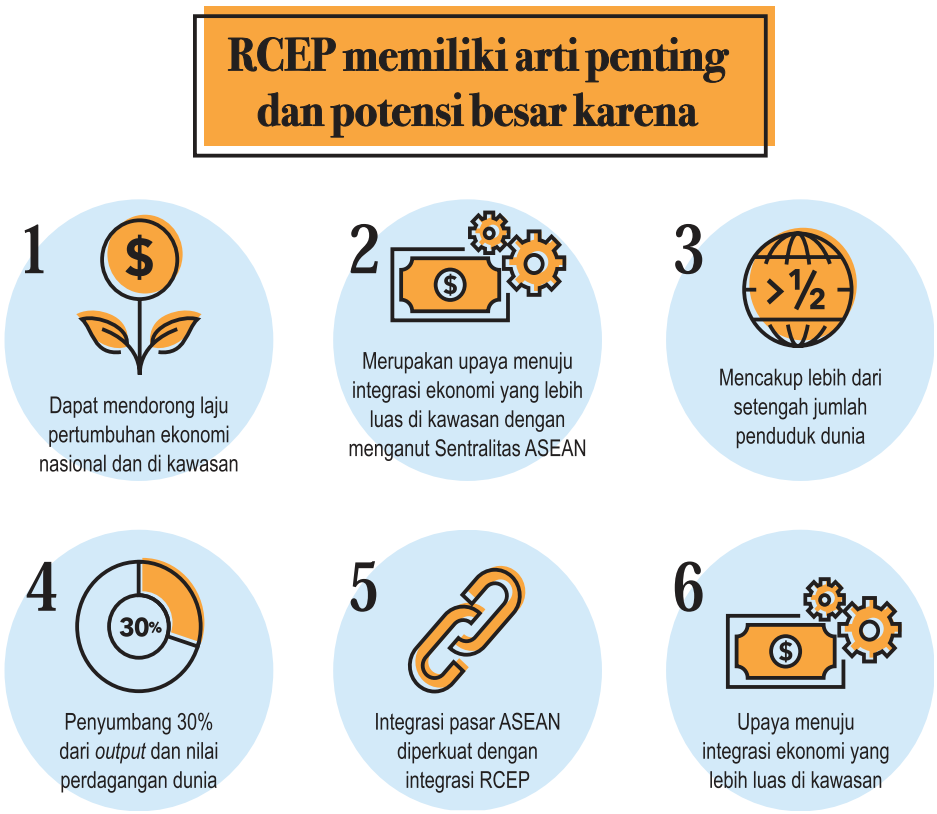
g. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Indonesia menginisiasi terbentuknya *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) pada saat keketuaan ASEAN tahun 2011 di KTT ASEAN ke-19, Bali. RCEP dibentuk untuk mengurangi tumpang tindih di antara berbagai *Free Trade Agreement* (FTA) dan mengonsolidasikan berbagai perjanjian ASEAN + 1 FTA. Tujuan pembentukan RCEP adalah untuk mewujudkan perjanjian ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas, menguntungkan semua pihak, dan membentuk *regional value chain*. Usulan pembentukan RCEP disambut baik oleh mitra FTA dan diluncurkan di sela-sela KTT ke-21 ASEAN di Kamboja tahun 2012.

RCEP memiliki arti penting dan potensi besar karena: dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan di kawasan, merupakan upaya menuju integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan dengan menganut Sentralitas ASEAN, mencakup lebih dari setengah jumlah penduduk dunia, penyumbang 30% dari output dan nilai perdagangan dunia, integrasi pasar ASEAN diperkuat dengan integrasi RCEP, upaya menuju integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan.

Perundingan dimulai pada tahun 2013 dan diharapkan dapat tercapainya *substantial conclusion* pada akhir tahun 2019 sesuai dengan mandat Kepala Negara/Pemerintahan pada KTT RCEP ke-2 tanggal 14 November 2018.

Pada KTT RCEP ke-3 tanggal 4 November 2019 telah merampungkan perundingan substansi perjanjian RCEP yang terdiri dari 20 *chapter* dan 16 *annex*.



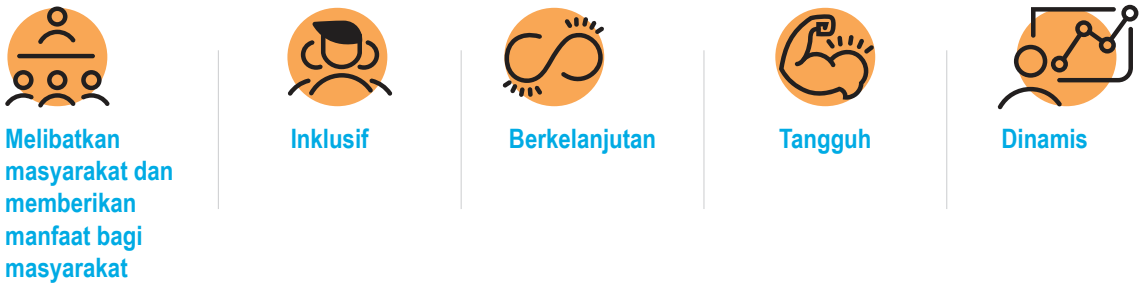
Gambar 2.31. Pentingnya RCEP dan potensi yang dimiliki

3. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN

Pada KTT ASEAN ke-27 tahun 2015, telah disahkan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yang mempunyai karakteristik dan elemen-elemen sebagai berikut:

a) Masyarakat yang berkomitmen, partisipatif, dan bertanggung jawab secara sosial melalui suatu mekanisme yang akuntabel dan inklusif bagi kepentingan rakyat kami, yang dilandasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b) Masyarakat inklusif yang memajukan kualitas hidup tinggi, akses terhadap peluang yang sama bagi semua orang dan memajukan serta melindungi hak asasi perempuan, anak-anak, pemuda, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan.



Gambar 2.32. Karakteristik dan elemen Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025

c) Masyarakat yang berkelanjutan, yang memajukan kemajuan sosial dan lingkungan hidup, melalui mekanisme efektif guna memenuhi kebutuhan rakyat ASEAN di masa kini dan mendatang.

d) Masyarakat yang tangguh dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi untuk menyesuaikan diri dan menyikapi kerentanan ekonomi serta sosial, bencana, perubahan iklim, serta ancaman dan tantangan yang muncul.

e) Masyarakat dinamis dan harmonis yang sadar dan bangga terhadap identitas, budaya dan warisannya, dengan kemampuan kuat untuk berinovasi dan berkontribusi secara proaktif terhadap masyarakat global.

Melalui visi ASEAN 2025, diharapkan masyarakat ASEAN dapat tinggal di kawasan yang aman, damai, dan sejahtera, terintegrasi dan mampu mempertahankan mekanisme ASEAN serta peranan ASEAN sebagai *driving force*. Beberapa area kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN adalah sebagai berikut.

a. Kerja Sama Perempuan

Kerja sama perempuan di ASEAN dibahas dalam pertemuan ASEAN *Ministerial Meeting on Women* (AMMW) dan ASEAN *Committee on Women* (ACW). Berdasarkan ACW *Work Plan* 2016--2020, prioritas kerja sama perempuan ASEAN adalah sebagai berikut:



Gambar 2.33. Kerja sama terkait pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak

Kerja sama terkait pemajuan dan perlindungan hak anak secara khusus dibahas dalam pertemuan ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC). Tiap-tiap Negara Anggota ASEAN memiliki wakil ACWC untuk hak perempuan dan wakil ACWC untuk hak anak, yang dipilih oleh masing-masing negara sebagai wakil dalam ACWC selama periode tiga tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 kali lagi untuk periode tiga tahun berikutnya. Berdasarkan ACWC *Work Plan 2016--2020*, beberapa isu yang menjadi prioritas kerja sama ASEAN dalam memajukan dan melindungi hak perempuan dan anak adalah:



Berdasarkan ACWC Work Plan 2016-2020,

beberapa isu yang menjadi prioritas kerja sama ASEAN dalam memajukan dan melindungi hak perempuan dan anak, yaitu:

- Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Memperjuangkan hak anak
- Menanggulangi perdagangan perempuan dan anak
- Memajukan dan melindungi hak perempuan dan anak dengan disabilitas
- Mendorong implementasi instrumen ASEAN, internasional, dan lain-lain terkait hak perempuan dan anak
- Hak anak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan usia dini yang berkualitas
- Meningkatkan sistem perlindungan anak yang komprehensif pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus (korban kekerasan, penelantaran, perdagangan, buruh anak, anak migran tanpa dokumen resmi, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, konflik, serta anak yang terkena kasus hukum)
- Kesetaraan gender pada pendidikan
- Dampak sosial perubahan iklim bagi perempuan dan anak
- Memperkuat hak ekonomi perempuan (hak perempuan terhadap properti dan tanah)
- Kesehatan mental dan fisik
- Pernikahan usia dini
- Partisipasi perempuan dalam politik, pemerintahan, demokrasi dan proses pengambilan keputusan
- Pengarusutamaan gender
- Perspektif gender dalam kebijakan, strategi dan program bagi pekerja migran

Gambar 2.34. ACWC Work Plan 2016--2020

b. Kerja Sama Kepemudaan

ASEAN memberikan perhatian lebih terhadap kemajuan pemuda yang akan menjadi generasi penerus di masa depan. Negara anggota ASEAN menyepakati bahwa pemuda adalah populasi penduduk dengan rentang usia 18--35 tahun. Kerja sama kepemudaan di ASEAN dibahas pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Senior Officials Meeting on Youth* (SOMY).

Kerja Sama Kepemudaan

Berdasarkan *ASEAN Work Plan on Youth 2016-2020*, terdapat beberapa prioritas kerja sama kepemudaan ASEAN, yaitu:



Meningkatkan jiwa wirausaha pada pemuda melalui program pembangunan kapasitas dan *mentoring*;

Meningkatkan keterampilan kerja pemuda (*youth employability*);





Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Masyarakat ASEAN di kalangan pemuda melalui program pertukaran pemuda;

Memperkuat keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam membangun Masyarakat ASEAN melalui kegiatan sukarela (*volunteerism*) dan program kepemimpinan;





Meningkatkan kompetensi dan ketangguhan pemuda melalui teknologi canggih dan kemampuan manajerial.

Gambar 2.35. Kerja sama kepemudaan

Pada pertemuan AMMY X tahun 2017 di Jakarta, ASEAN telah meluncurkan *the First ASEAN Youth Development Index* (ASEAN YDI) *Report*. Indonesia merupakan penanggung jawab proses penyusunan ASEAN YDI *Phase I* dimaksud.



Gambar 2.36. ASEAN Youth Development Index (YDI)

ASEAN YDI ditujukan sebagai sarana untuk mengevaluasi hasil dan efektifitas berbagai kegiatan terkait kepemudaan di ASEAN serta membantu negara anggota ASEAN dalam merencanakan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pembangunan pemuda di kawasan.

c. Kerja Sama Aparatur Sipil Negara

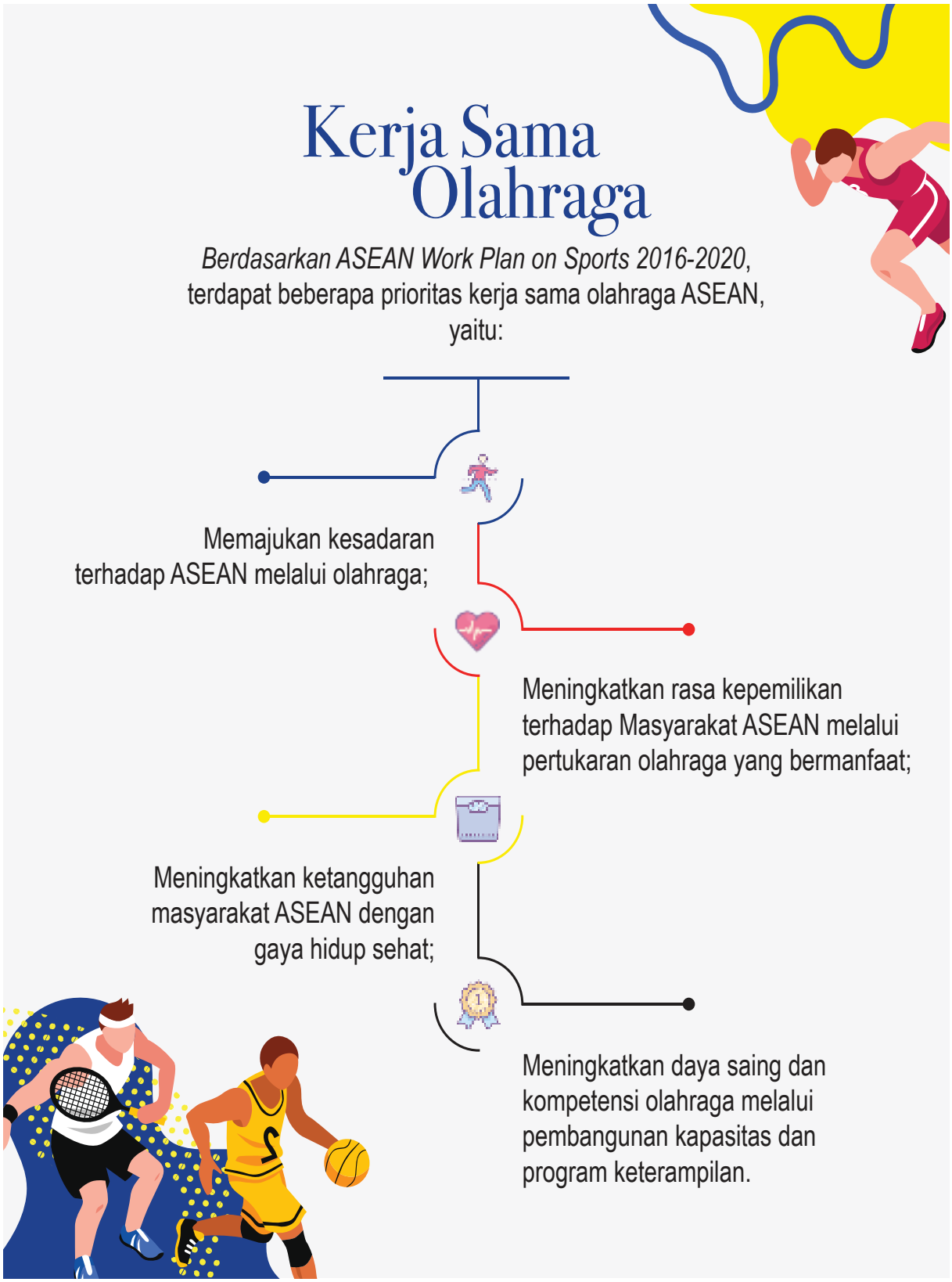
Kerja sama ASEAN di bidang aparatur sipil negara dibahas dalam pertemuan *ASEAN Conference on Civil Service Matters* (ACCSM).



Gambar 2.37. Kerja sama Aparatur Sipil Negara

d. Kerja Sama Olahraga

Kerja sama olahraga di ASEAN dibahas pada Petemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Sports* (AMMS) dan *ASEAN Senior Officials Meeting on Sports* (SOMS).



Gambar 2.38. Kerja sama olahraga

e. Kerja Sama Pengendalian Penyebaran Narkoba

Kerja sama pengendalian penyebaran narkoba ASEAN dibahas pada Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, yaitu pada pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) dan *ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters* (ASOD). Dalam pengendalian penyebaran narkoba, terdapat hal yang harus dikoordinasikan di antara Pilar Politik dan Keamanan ASEAN dan Pilar Sosial Budaya ASEAN karena saling terkait satu sama lain. Hal terkait penegakan hukum menjadi ranah Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, sementara hal terkait pendidikan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, serta pembangunan alternatif dikoordinasikan juga dengan Pilar Sosial Budaya ASEAN.

Kerja Sama Pengendalian Penyebaran Narkoba

Berdasarkan *ASEAN Work Plan on Securing Communities Againts Illicit Drugs 2016-2025*, terdapat beberapa prioritas kerja sama pengendalian penyebaran narkoba yang terkait dengan Pilar Sosial Budaya ASEAN, yaitu:



Gambar 2.39. Kerja sama pengendalian penyebaran narkoba

f. Kerja Sama Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang kerja sama yang menjadi perhatian khusus negara anggota ASEAN. Indonesia dan juga seluruh negara anggota ASEAN lainnya turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di ASEAN dan juga daya saing SDM ASEAN, melalui mekanisme kerja sama badan sektoral ASEAN *Senior Officials Meeting on Education* (SOM-ED) dan ASEAN *Education Ministers Meeting* (ASED). Kemajuan kerja sama ASEAN di bidang pendidikan, antara lain ditandai dengan disepakatinya deklarasi penguatan kerja sama bidang pendidikan melalui *Cha-Am Hua Hin Declaration on Strengthening Cooperation on Education to Achieve an ASEAN Caring and Sharing Community* pada KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand tanggal 23--25 Oktober 2009.

Selain itu, seiring dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, ASEAN juga memberikan prioritas terhadap peningkatan kerja sama terkait Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan/*Technical and Vocational Education Training* (TVET) dalam *ASEAN Work Plan on Education* 2016-2020. Kerja sama bidang pendidikan pada dasarnya harus lebih diintensifkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat regional maupun global. ASEAN *Work Plan on Education 2021-2025* adalah meningkatkan kesadaran tentang ASEAN (ASEAN *awareness*) yang dijelaskan dalam infografis sebagai berikut:



Gambar 2.40. Kerja sama pendidikan

Saat ini, ASEAN telah memiliki beberapa kerja sama terkait program pemberian beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi dengan skema yang bervariasi dan bekerja sama juga dengan beberapa mitra wicara ASEAN, antara lain:

1. *ASEAN University Network* (AUN) merupakan jejaring 30 perguruan tinggi dari 10 negara ASEAN dan *ASEAN University Network Plus Three* (AUN+3) yang bekerja sama dengan 21 perguruan tinggi dari 3 (tiga) negara mitra, yaitu RRT, Jepang, dan Korea Selatan. Melalui program ini, tercatat setidaknya terdapat 1.262 penerima beasiswa.
2. Kerja sama pemberian beasiswa dengan negara mitra, yaitu dengan Uni Eropa; Kanada; Hungaria; Amerika Serikat; RRT; Jepang; Korea Selatan; Australia; dan Selandia Baru.

ASEAN *Curriculum Sourcebook*

sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan di negara-negara anggota ASEAN untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai ASEAN di kalangan pelajar. Secara umum, beberapa inisiatif yang diimplementasikan oleh Pemerintah RI dalam kerja sama pendidikan ASEAN, antara lain:



Gambar 2.41. ASEAN *Curriculum Sourcebook*

g. Kerja Sama Kebudayaan dan Seni

Salah satu tujuan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN adalah untuk meningkatkan solidaritas dan persatuan ASEAN dengan membangun sebuah identitas bersama yang dapat mendukung pemahaman dan rasa saling menghormati yang lebih tinggi di tengah Masyarakat ASEAN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dalam mewujudkan tujuan tersebut, kerja sama kebudayaan ASEAN sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan persatuan di tengah perbedaan (*unity in diversity*), serta memperdalam rasa saling pengertian (*mutual understanding*) di antara Negara Anggota ASEAN dan masyarakatnya. Kerja sama kebudayaan ASEAN dibahas pada badan sektoral khusus, yaitu ASEAN *Ministers Responsible for Culture and Arts* (AMCA) dan ASEAN *Senior Officials Meeting on Culture and Arts* (SOMCA).

Kerja Sama Kebudayaan dan Seni

Kerja sama kebudayaan ASEAN sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan persatuan di tengah perbedaan (*unity in diversity*), serta memperdalam rasa saling pengertian (*mutual understanding*) di antara negara anggota ASEAN dan masyarakatnya.

Berdasarkan *ASEAN Strategic Plan for Culture and Arts 2016-2025*, terdapat beberapa prioritas kerja sama kebudayaan, yaitu:

- Mendorong pendekatan multi-sektor dalam memajukan identitas ASEAN untuk meningkatkan apresiasi terhadap sejarah, budaya, tradisi serta nilai-nilai dalam Masyarakat ASEAN;
- Memajukan hak berbudaya pada seluruh masyarakat ASEAN di mana budaya bersifat inklusif dan dapat membantu pembangunan berkelanjutan;
- Melibatkan pembuat kebijakan, kalangan profesional, praktisi dan institusi terkait kebudayaan dan seni untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan warisan budaya;
- Memajukan keberagaman budaya ASEAN yang terfokus pada upaya meningkatkan pemahaman antar budaya sebagai upaya untuk memerangi ekstrimisme, yang bersumber dari kurangnya pemahaman antar budaya;
- Meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap kemajuan inovasi dan pembangunan ekonomi di ASEAN;
- Memajukan peran budaya guna mendukung ASEAN menjadi lebih proaktif dalam dinamika masyarakat global.



Gambar 2.42. Kerja sama kebudayaan dan seni



Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam memajukan kerja sama kebudayaan ASEAN, antara lain:

1

Pada KTT ASEAN ke-37 tanggal 12 November 2020, *ASEAN Leaders* telah mengadopsi *the Narrative of ASEAN Identity* (NAI) yang merupakan inisiatif Indonesia pada keketuaan *ASEAN Ministers' Responsible for Culture and Arts* (AMCA) dan *Senior Officials' Meeting for Culture and Arts* (SOMCA) periode 2018-2020.

2

NAI menjadi dokumen resmi pertama ASEAN yang mencakup penjelasan mengenai identitas ASEAN. Melalui dokumen ini, diharapkan dapat semakin mempertegas relevansi ASEAN, memperkuat Komunitas ASEAN serta memupuk rasa saling memiliki dan *we-feeling* diantara masyarakat ASEAN. Guna mencapai tujuan tersebut, NAI diharapkan dapat diintegrasikan dengan *Work Plan* seluruh badan sektoral pada ketiga Pilar Kerja Sama ASEAN.

3

Adapun, terdapat 3 (tiga) parameter dalam mengukur kesuksesan NAI, yaitu:

- ***ASEAN Awareness:*** Presentase masyarakat ASEAN yang dapat mengasosiasikan dirinya sebagai bagian dari ASEAN.
- ***ASEAN Relevance:*** Pemahaman terkait manfaat ASEAN.
- ***ASEAN Appreciation:*** Tingkat apresiasi masyarakat ASEAN menjadi bagian dari ASEAN dan pengakuan pihak eksternal terkait persatuan dan sentralitas ASEAN.

Gambar 2.43. Inisiatif Pemerintah Indonesia untuk memajukan kerja sama kebudayaan ASEAN

h. Kerja Sama Informasi

Seiring dengan semakin berkembangnya kerja sama di bawah Masyarakat ASEAN, kerja sama dalam bidang informasi dan media tentu menjadi bagian penting dalam mengomunikasikan berbagai kemajuan ASEAN dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran ASEAN kepada masyarakatnya. Selain itu, kerja sama informasi di ASEAN juga dilakukan sebagai peningkatan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan tingkat literasi digital kepada masyarakat ASEAN. Kerja sama informasi ASEAN dibahas pada badan sektoral khusus, yaitu *ASEAN Ministers Responsible for Information* (AMRI) dan *ASEAN Senior Officials Responsible for Information* (SOMRI).

Kerja Sama Informasi

Berdasarkan *ASEAN Strategic Plan for Information and Media 2016-2025*, terdapat beberapa prioritas kerja sama informasi ASEAN, yaitu:



Gambar 2.44. Kerja sama informasi

i. Kerja Sama Lingkungan Hidup

Kerja sama di bidang lingkungan hidup berada di bawah ASEAN *Senior Officials on the Environment* (ASOEN) yang melakukan pertemuan sekali dalam setahun. ASOEN melaporkan perkembangan kerja sama lingkungan pada ASEAN *Ministerial Meeting on Environment* (AMME) yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. ASOEN terdiri dari 7 (tujuh) *working groups* yaitu ASEAN *Working Group on Climate Change* (AWGCC), *Nature Conservation and Biodiversity* (AWGNCB), *Coastal and Marine* (AWGCM), *Environmental Education* (AWGEE), *Environmentally Sustainable Cities* (AWGESC), *Water Resources Management* (AWGWRM), dan *Chemical and Waste* (AWGCW).

Kerja Sama Lingkungan Hidup

Tiga isu yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup adalah



Masalah pencemaran kabut asap (*haze*)

Dalam menangani isu pencemaran kabut asap, Indonesia telah meratifikasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) melalui **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)**. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mengintensifkan kerja sama penanggulangan asap lintas batas dalam kerangka ASEAN.

Konservasi keanekaragaman hayati

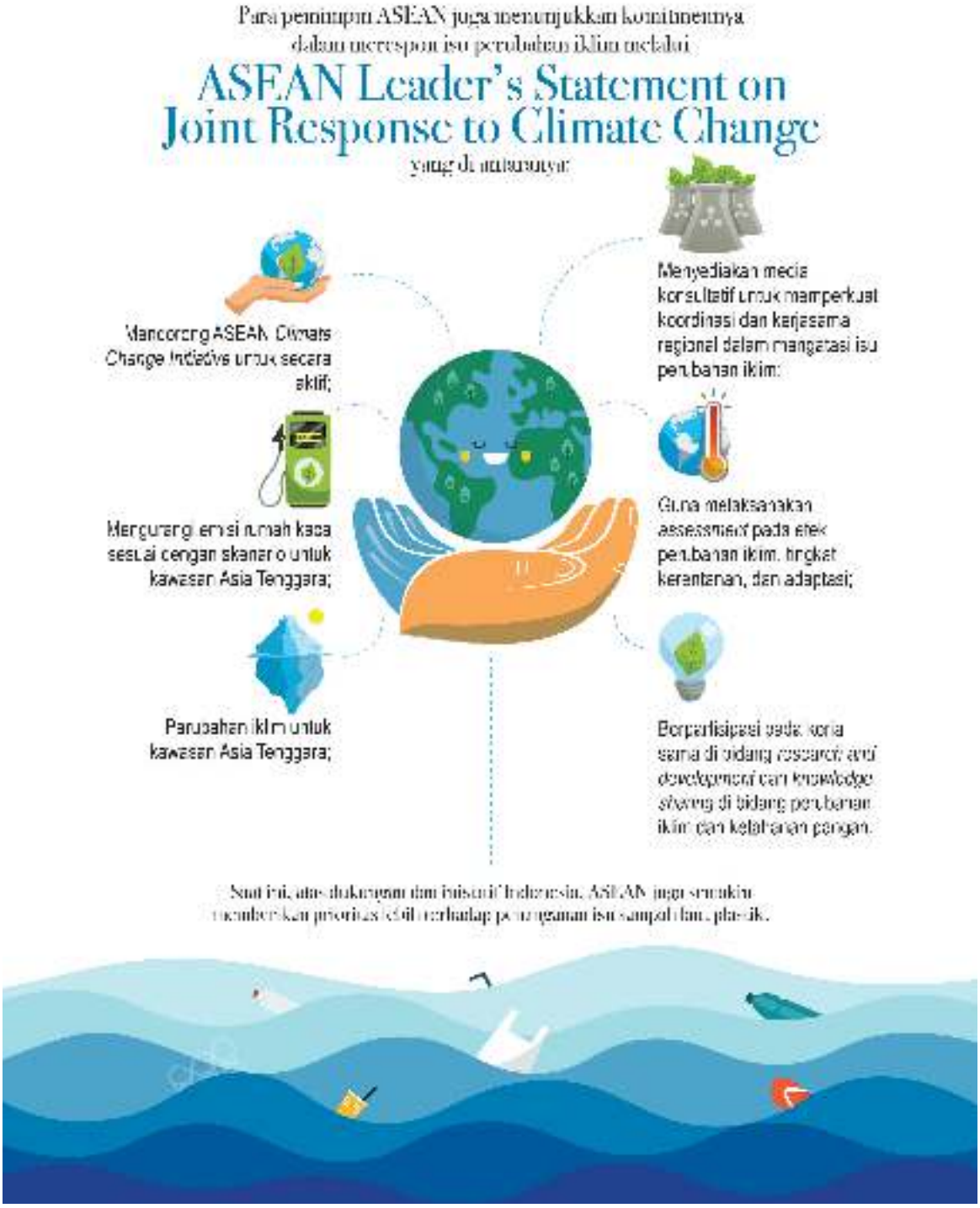
Pada tanggal 8 November 2017, Indonesia telah meratifikasi perjanjian pendirian *ASEAN Center for Biodiversity* (ACB) melalui **Perpres Nomor 100 tahun 2017**. Dengan ratifikasi ini, Indonesia telah menjadi pihak dalam lembaga ACB, sehingga memungkinkan pemanfaatan sumber daya ASEAN maupun Negara Mitra Wicara dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Masalah perubahan iklim

Indonesia secara khusus telah berkomitmen untuk **mengurangi tingkat efek gas rumah kaca sampai 26% pada tahun 2020**.

Gambar 2.45. Kerja sama lingkungan hidup

Di bidang perubahan iklim, sebagai kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim, ASEAN melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia secara khusus telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat efek gas rumah kaca sampai 26% pada tahun 2020. Para pemimpin ASEAN juga menunjukkan komitmennya dalam merespon isu perubahan iklim melalui ASEAN *Leaders' Statement on Joint Response to Climate Change* yang di antaranya:



Gambar 2.46. Pernyataan para Pimpinan ASEAN mengenai isu perubahan iklim

j. Kerja Sama Penanggulangan Bencana

Kerja sama ASEAN di bidang penanggulangan bencana dibahas pada pertemuan ASEAN *Ministerial Meeting on Disaster Management* (AMMDM) dan ASEAN *Committee on Disaster Management* (ACDM). Pada 26 Juli 2005 para Menlu ASEAN menandatangani ASEAN *Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER) yang berisikan kesepakatan menyeluruh mengenai berbagai aspek dalam penanggulangan bencana sebagai respon terjadinya tsunami Samudera Hindia. AADMER berlaku secara efektif pada tanggal 24 Desember 2009. Indonesia meratifikasi AADMER melalui Perpres No. 32 Tahun 2008 pada tanggal 15 Mei 2008.

Kerja Sama Penanggulangan Bencana

Salah satu bentuk komitmen ASEAN untuk memperkuat kapabilitas ASEAN dalam respon tanggap bencana adalah dengan dibentuknya AHA *Centre* (ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management*) pada tanggal 17 November 2011 melalui penandatanganan *Agreement on the Establishment of* AHA *Centre* oleh Para Menlu ASEAN pada KTT ke-19 ASEAN di Bali, Indonesia. AHA *Centre* berkedudukan di Jakarta, Indonesia.



Gambar 2.47. Kerja sama penanggulangan bencana

Kerja Sama Penanggulangan Bencana ASEAN juga menunjukkan perhatiannya pada penguatan mekanisme penanggulangan bencana melalui ASEAN *Declaration on One* ASEAN, *One Response*: ASEAN *Responding to Disasters as One in the Region and Outside the Region* yang telah ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-28 ASEAN tanggal 6 September 2016 di Vientiane, Laos. Deklarasi ini bertujuan untuk mencapai respons yang lebih cepat, memobilisasi sumber daya yang lebih besar, dan membangun koordinasi yang lebih kuat guna memastikan respon kolektif ASEAN terhadap bencana.

k. **Kerja Sama Ketenagakerjaan**

Berdasarkan data Organisasi Pekerja Migran Internasional (ILO), terdapat kurang lebih 14 juta pekerja migran di ASEAN. Besarnya angka tenaga kerja di ASEAN membuat ASEAN memandang penting peningkatan daya saing bagi Masyarakat ASEAN, perluasan kesempatan kerja dan menyediakan *social security* pada pekerja. Kerja sama ASEAN terkait ketenagakerjaan dibahas oleh para Menteri Ketenagakerjaan ASEAN pada pertemuan dua tahunan *ASEAN Labour Ministers Meeting* (ALMM). Dalam upaya untuk menyelesaikan isu pekerja migran tanpa dokumen dan pemajuan serta perlindungan hak pekerja migran beserta keluarganya, ASEAN membentuk sebuah komite khusus yaitu *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* (ACMW) pada tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari pembentukan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak- Hak Pekerja Migran pada tahun 2007.



Gambar 2.48. Kerja sama ketenagakerjaan

Indonesia berhasil mendorong penandatanganan dokumen *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* oleh para Kepala Negara ASEAN pada KTT ke-31 ASEAN bulan November 2017 di Manila. ASEAN Consensus ini merupakan wujud konkret komitmen negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu instrumen ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran di ASEAN, yang antara lain mencakup hak-hak fundamental pekerja migran dan anggota keluarganya, hak-hak khusus pekerja migran seperti akses informasi terkait kontrak kerja dan *fair treatment* di lingkungan kerja, kewajiban negara pengirim dan penerima, serta komitmen ASEAN ke depannya. ASEAN Consensus akan melengkapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) yang disahkan DPR pada 25 Oktober 2017. Sebagai tindak lanjut ASEAN Consensus, telah disusun pula rencana aksi untuk implementasi dokumen ASEAN Consensus yang disebut *Action Plan to Implement the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers.*

I. Kerja Sama Kesehatan

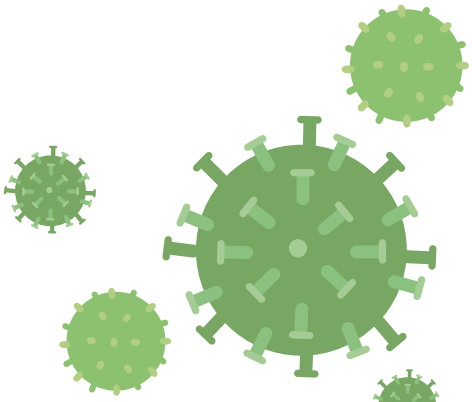
Kerja sama ASEAN di bidang kesehatan telah dimulai sejak tahun 1980 dengan dibentuknya *Senior Officials' Meeting on Health Development* (SOMHD) yang dilaksanakan setiap tahun dan pertemuan dua tahunan tingkat Menteri Kesehatan ASEAN yaitu *ASEAN Health Minister's Meeting*. Kerja sama Kesehatan ASEAN mengacu pada dokumen *ASEAN Post-2015 Health Development Agenda* (HDA) di mana kerja sama kesehatan ASEAN dibagi dalam 4 klaster utama (dengan total 20 Health Priorities), yaitu:

- *ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle* yang tugas utamanya mempromosikan gaya hidup sehat;
- *ASEAN Health Cluster 2: Responding to All Hazards and Emerging Threats* yang tugas utamanya merespon bahaya kesehatan dan ancaman-ancaman terkait kesehatan yang berkembang;
- *ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care* yang fungsi utamanya memperkuat sistem Kesehatan dan akses untuk perawatan kesehatan di ASEAN; dan
- *ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety* yang tujuan utamanya menjamin keamanan pangan di ASEAN.

Sejak merebaknya COVID-19 di awal tahun 2020, sektor Kesehatan ASEAN bersama sektor-sektor terkait lainnya senantiasa aktif melaksanakan kerja sama melalui pertukaran informasi dan berbagi pengalaman penanganan COVID-19 antara negara anggota maupun dengan negara mitra wicara ASEAN.

Keterbatasan pergerakan akibat COVID-19 mengharuskan pertemuan pembahasan kerja sama ASEAN dilakukan secara daring, mulai dari pertemuan tenaga ahli bahkan hingga ke pertemuan tingkat Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN untuk menentukan langkah-langkah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya.

Beberapa langkah konkret yang saat ini ditempuh ASEAN dalam menghadapi COVID-19 adalah dengan pembentukan dana khusus bagi penanganan COVID-19. ASEAN juga terus mengupayakan pembangunan cadangan untuk pasokan medis kawasan ASEAN dan tengah menyusun *Standard Operating Procedure* untuk tanggap darurat kesehatan masyarakat ASEAN di masa mendatang.



Gambar 2.49. Virus COVID-19

Mengingat pandemi COVID-19 juga berdampak besar pada sektor perekonomian, maka ASEAN juga berkomitmen tetap membuka pasar dan memastikan mata rantai untuk barang kebutuhan pokok dan alat kesehatan tidak terhambat. ASEAN juga berupaya mengembangkan panduan komprehensif untuk mempercepat pemulihan ASEAN dari dampak COVID-19 yang dituangkan pada dokumen *ASEAN Comprehensive Recovery Framework*.

Pandemi COVID-19 juga menyadarkan pentingnya kerja sama khusus untuk menghadapi situasi darurat kesehatan akibat perkembangan penyakit di masa mendatang sehingga saat ini ASEAN secara intensif membahas rencana pembangunan Pusat ASEAN untuk penanganan kedaruratan kesehatan masyarakat dan ancaman penyakit yang berkembang yang disebut *ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases*.

m. Kerja Sama Pembangunan Desa dan Pengentasan Kemiskinan

Kerja sama ASEAN di bidang pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri yang menangani bidang tersebut yaitu *ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (AMRDPE). Para pejabat senior ASEAN juga rutin mengadakan pertemuan tahunan *ASEAN Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (SOMRDPE) dalam rangka implementasi rencana aksi bidang kerja sama pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam *ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2016-2020*.



Gambar 2.50. Kerja sama pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan

n. Kerja Sama Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan ASEAN

Kerja sama kesejahteraan sosial dan pembangunan ASEAN dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN yaitu A*SEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development* (AMMSWD) dan pertemuan pejabat tinggi ASEAN yaitu *ASEAN Senior Officials' Meeting on Social Welfare and Development* (SOMSWD). Kerja sama bidang ini mengacu pada Deklarasi ASEAN untuk Penguatan Perlindungan Sosial (*ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection*) yang disahkan Para Kepala Negara ASEAN pada tahun 2013 di Brunei Darussalam yang berisi prinsip, strategi dan mekanisme penguatan pelindungan sosial di ASEAN. SOMSWD juga memiliki program kerja lima tahunan yang tertuang dalam *SOMSWD Work Plan 2016-2020* dan saat ini tengah dibahas program kerja lanjutannya hingga periode tahun 2025.

Kerja Sama Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan ASEAN

Sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, kerja sama ASEAN bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas dan kaum lanjut usia.



Gambar 2.51. Kerja sama kesejahteraan sosial dan pembangunan

Pada KTT ke-33 tahun 2018, para Kepala Negara ASEAN telah menandatangani dokumen *ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities*. Dokumen ini merupakan komitmen bersama ASEAN yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari ASEAN dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan menjadi kewajiban bersama. Dokumen ini merupakan rencana aksi regional pertama ASEAN untuk pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas dan memiliki 76 prioritas aksi yang mencakup partisipasi inklusif disabilitas dalam Masyarakat Politik dan Keamanan, Masyarakat Ekonomi, serta Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

E. Kerja sama ASEAN dengan Negara-negara lain dan Organisasi Internasional

1. Prinsip Umum

ASEAN telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa sejak tahun 1974. Prinsip-prinsip pelaksanaan kerja sama ini diatur dalam Bab XII Pasal 41 Piagam ASEAN mengenai Hubungan Eksternal, yaitu:

a. ASEAN perlu mengembangkan hubungan bersahabat, dialog, kerja sama, dan kemitraan saling menguntungkan dengan berbagai negara serta organisasi internasional dan regional.
b. Hubungan dengan pihak eksternal harus menjunjung tujuan dan prinsip Piagam ASEAN.
c. ASEAN wajib menjadi kekuatan penggerak utama dalam tatanan hubungan di kawasan dan wajib mempertahankan sentralitasnya dalam kerja sama dengan pihak eksternal.
d. Negara Anggota ASEAN wajib menjaga persatuan dan solidaritas serta mengoordinasikan posisi dan tindakan bersama dalam kerja sama dengan pihak eksternal.
e. Kebijakan strategis hubungan eksternal ditentukan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dengan memperhatikan rekomendasi para Menteri Luar Negeri.
f. Para Menteri Luar Negeri ASEAN harus menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan hubungan eksternal.
g. ASEAN dapat menandatangani perjanjian dengan berbagai negara serta organisasi internasional dan regional.

Dalam menerima suatu negara sebagai Mitra Wicara, ASEAN menerapkan sejumlah pertimbangan terhadap calon mitra, yaitu:

a. Harus menerima prinsip dan norma: Deklarasi Bangkok, Deklarasi TAC *(Treaty of Amity and Cooperation),* Deklarasi ZOPFAN *(Zone of Peace, Freedom, and Neutrality)* dan Deklarasi SEANWFZ *(South East Asian Nuclear Weapon Free Zone)*.
b. Harus memiliki perwakilan diplomatik di semua Negara Anggota ASEAN, memiliki kerja sama politik dan keamanan dengan Negara Anggota ASEAN, serta memiliki potensi menjadi aktor utama di kawasan (pertimbangan politis).
c. Harus dapat memberi bantuan teknis dan/atau pembangunan serta memiliki perjanjian ekonomi dan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi yang baik dengan Negara Anggota ASEAN (pertimbangan ekonomi).
d. Harus memiliki hubungan sosial budaya dengan Negara Anggota ASEAN selama lima tahun terakhir, seperti pertukaran budaya, kerja sama riset dan iptek, kerja sama antarorganisasi non-pemerintah, serta ada warga negara ASEAN yang bekerja/belajar di negara calon mitra dan sebaliknya (pertimbangan sosial budaya).

2. Bentuk Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional

Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama ASEAN dengan Pihak Eksternal *(Guidelines for ASEAN's External Relations)* yang disahkan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 10 Mei 2014, bentuk kerja sama ASEAN dengan Pihak Eksternal terdiri atas:

Kerja Sama sebagai Mitra Wicara *(Dialogue Partner)*

Kerja sama ini dilaksanakan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang mendukung pembentukan Masyarakat ASEAN dan memiliki kriteria:

a. Merupakan negara berdaulat sesuai konvensi hukum internasional atau organisasi internasional yang sah dan berkedudukan hukum sesuai konvensi hukum internasional.
b. Telah memiliki hubungan yang substantif di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan seluruh negara anggota ASEAN; dan
c. Menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk menjalin hubungan kerja sama dan kemitraan dengan ASEAN.

Hingga saat ini, ASEAN telah melaksanakan kerja sama sebagai Mitra Wicara *(Dialogue Partner)* dengan 9 negara (Australia, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, Rusia dan Amerika Serikat), 1 konfederasi negara (Uni Eropa) dan 1 organisasi internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB).



Gambar 2.52. Ilustrasi 10 Mitra Wicara (Dialogue Partners) ASEAN
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

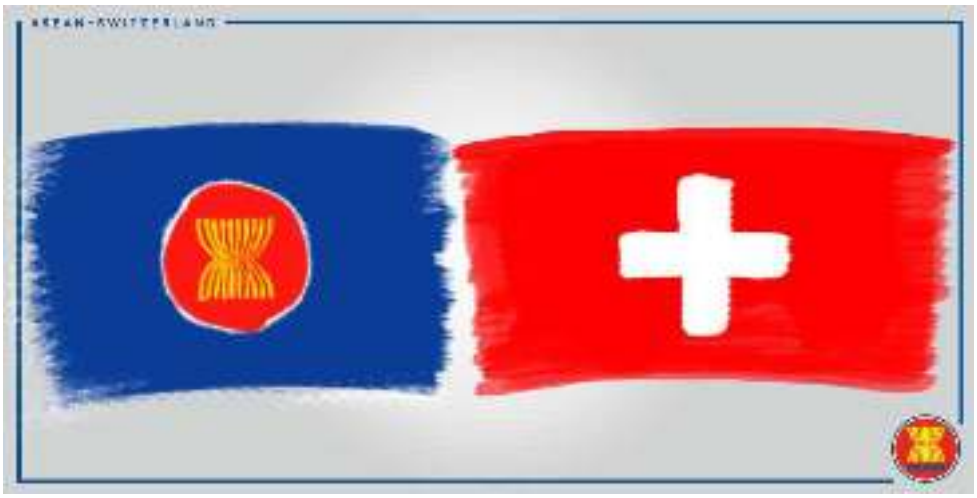
Sejak tahun 1999, ASEAN memberlakukan moratorium untuk hubungan kemitraan baru *(Dialogue Partnership)* hingga waktu yang tidak ditentukan agar ASEAN dapat mengintensifkan dan mengonsolidasikan hubungannya dengan Mitra Wicara yang telah ada. Selain itu juga dimaksudkan agar ASEAN dapat memfokuskan upaya integrasi kawasan serta adanya keterbatasan sumber daya ASEAN dalam menjalankan mekanisme dengan Mitra Wicara yang lebih banyak.

Kerja Sama sebagai Mitra Wicara Sektoral *(Sectoral Dialogue Partner)*

Kerja sama ini dilaksanakan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang telah menjalin hubungan dengan dua atau lebih badan sektoral ASEAN dan memiliki kriteria sebagai berikut.

a. Merupakan negara berdaulat sesuai konvensi hukum internasional atau organisasi internasional yang sah dan berkedudukan hukum sesuai konvensi hukum internasional.
b. Telah memiliki hubungan yang baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan seluruh negara anggota ASEAN.

Hingga saat ini, ASEAN telah melaksanakan kerja sama sebagai Mitra Wicara Sektoral *(Sectoral Dialogue Partner)* dengan 4 negara (Pakistan, Norwegia, Swiss, dan Turki).



Gambar 2.53. Ilustrasi Mitra Wicara Sektoral (Sectoral Dialogue Partner) ASEAN-Swiss
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

Kerja Sama sebagai Mitra Pembangunan (*Development Partner*)

Kerja sama ini dilaksanakan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang telah menjalin kerja sama pembangunan dalam rangka mendukung pembentukan Masyarakat ASEAN dan memiliki kriteria:

a. merupakan negara berdaulat sesuai konvensi hukum internasional atau organisasi internasional yang sah dan berkedudukan hukum sesuai konvensi hukum internasional;
b. telah memiliki hubungan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan seluruh negara anggota ASEAN; dan
c. menunjukkan kesiapan dan kemampuan untuk menjalin hubungan kerja sama pembangunan dan kemitraan dengan ASEAN.

Hingga saat ini, ASEAN telah melaksanakan kerja sama sebagai Mitra Pembangunan *(Development Partner)* dengan 2 negara (Jerman dan Chile).



Gambar 2.54. Ilustrasi Mitra Pembangunan (Development Partner) ASEAN-Jerman
Sumber: Kementerian Luar Negeri RI

Kerja Sama sebagai Pengamat Khusus *(Special Observer)*

Kerja sama ini dilaksanakan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang memiliki asosiasi dengan ASEAN. Melalui pelaksanaan kerja sama ini, pihak eksternal yang berstatus sebagai pengamat khusus dapat diundang untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan Pertemuan ASEAN *Foreign Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference* yang reguler.

Kerja Sama sebagai Tamu *(Guest)*

Kerja sama ini dilaksanakan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang tengah menjajaki untuk melaksanakan hubungan kerja sama lebih lanjut dengan ASEAN dalam bentuk Mitra Pembangunan *(Development Partner)*, dengan kriteria:

a. merupakan negara berdaulat sesuai konvensi hukum internasional atau organisasi internasional yang sah dan berkedudukan hukum sesuai konvensi hukum internasional;
b. negara/organisasi internasional dimaksud tengah dalam proses untuk menjalin hubungan kerja sama dengan ASEAN dan telah mengajukan permintaan untuk meninjau AMM/PMC;
c. ASEAN ingin menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal dimaksud dan memandang perlu kehadirannya dalam pertemuan ASEAN; dan
d. ASEAN memandang adanya keuntungan politik/ekonomi dengan memberikan status Tamu kepada Pihak Eksternal tertentu.

Melalui kewenangan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN *(ASEAN Foreign Ministerial Meeting)*, ASEAN dapat mengundang Pihak Eksternal, yang telah menunjukkan ketertarikannya dalam menjalin hubungan dengan ASEAN, untuk menghadiri acara pembukaan dan penutupan annual *ASEAN Foreign Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference*. Penentuan Pihak Eksternal sebagai tamu pada pertemuan dimaksud dilakukan secara selektif dan dipertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi.

Kerja Sama Lainnya

Di samping berbagai kerja sama tersebut di atas, terdapat juga kerja sama eksternal lain, yaitu kerja sama *ASEAN Plus Three* (APT), kerja sama *East Asia Summit* (EAS), dan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

Kerja Sama *ASEAN Plus Three* (APT)

ASEAN Plus Three (APT) adalah mekanisme kerja sama yang dikembangkan oleh ASEAN dengan tiga negara Mitra Wicaranya, yaitu RRT, Jepang dan ROK. Dalam APT dilakukan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, alih teknologi, industri, pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pariwisata, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 2.55. Para Menteri Luar Negeri *ASEAN Plus Three* dalam Pertemuan Tingkat Menlu di Singapura Tahun 2018
Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI

Kerja Sama *East Asia Summit* (EAS)

East Asia Summit (EAS) merupakan suatu forum regional terbuka yang dibentuk pada 14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, dalam rangkaian KTT ke-11 ASEAN dan merupakan forum *leaders-led summit* dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak dalam kemitraan dengan negara-negara anggota lainnya, khususnya yang berada di kawasan Asia Timur. EAS bersifat terbuka, inklusif, transparan, dan *outward-looking* dengan format *retreat* berupa diskusi strategis mengenai berbagai tema aktual di kawasan. Peserta *East Asia Summit* ialah 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN ditambah 8 (delapan) negara Mitra Wicara *(Dialogue Partner)* ASEAN, yaitu: Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Republik Rakyat Tiongkok, dan Rusia.

Terdapat 9 sektor/area prioritas kerja sama EAS sesuai dengan dokumen kesepakatan *Manila Plan of Action to Advance the Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative* (2018--2022), yaitu:

1. Lingkungan hidup dan energi;
2. Pendidikan;
3. Keuangan;
4. Isu-isu kesehatan global dan penyakit pandemik;
5. Penanganan bencana alam;
6. Konektivitas ASEAN;
7. Perdagangan dan ekonomi;
8. Ketahanan pangan;
9. Kerja sama maritim.



Gambar 2.56. Para Kepala Negara/Pemerintahan dalam KTT *East Asia Summit* di Singapura Tahun 2018
Sumber Foto: Kementerian Luar Negeri RI

Kerja Sama dengan Organisasi Internasional Lainnya

ASEAN juga menjalin kerja sama dengan 6 organisasi regional, yaitu *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC), *Economic Cooperation Organisation* (ECO), *Gulf Cooperation Council (*GCC), *Mercado Comun del Sur/Common Market of the South* (MERCOSUR), *Pacific Alliance* (PA), serta *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC). Selain itu, ASEAN menjalin kerja sama antarsekretariat dengan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) serta mendapat bantuan keahlian dan pendanaan proyek dari *Asian Development Bank* (ADB).

3. Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dan Pertemuan ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional

ASEAN menerapkan pembagian tugas di antara negara anggota untuk menjadi koordinator kerja sama dengan masing-masing Mitra Wicara secara bergilir tiap tiga tahun, sebagai contoh: Indonesia menjadi koordinator kerja sama ASEAN-Korea (2012--2015), ASEAN-Selandia Baru (2015--2018), dan ASEAN-Rusia (2018--2021). Sementara itu, untuk pelaksanaan tugas sebagai koordinator kerja sama ASEAN dengan dengan PBB, Mitra Wicara Sektoral dan Mitra Pembangunan dipegang oleh Sekretariat ASEAN.
Pertemuan ASEAN dengan Mitra Wicara dilakukan melalui berbagai tingkatan pertemuan, yaitu:

a. Tingkat Kepala Negara, dilakukan melalui KTT ASEAN, KTT APT, KTT EAS, dan *Commemorative Summit, Regular Summit, Special Summit* maupun *Stand Alone Summit* dengan Mitra Wicara;

b. Tingkat Menteri, dilakukan melalui pertemuan para Menlu Negara Anggota ASEAN *(ASEAN Ministerial Meeting*/AMM), pertemuan Menlu Negara Anggota ASEAN dengan Menlu negara Mitra Wicara (*Post Ministerial Conference*/PMC), dan pertemuan para Menlu negara anggota ARF. Khusus dengan UE, pertemuan ini diberi nama ASEAN-EU *Ministerial Meeting* (AEMM);

c. Tingkat Menteri Sektoral, dilakukan melalui pertemuan ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) dan *ADMM-Plus*, ASEAN *Finance Ministers Meeting* (AFMM), ASEAN *Transport Ministers Meeting* (ATM), dan ASEAN *Economic Ministers Meeting* (AEM);

d. Tingkat Pejabat Tinggi/Direktur Jenderal, dilakukan melalui *Senior Officials Meeting* (SOM), *Senior Officials Consultations* (SOC), serta *Forum* dan *Dialogue antar-Senior Officials;*

e. Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral, dilakukan melalui *Senior Officials Meeting on Transnational Crimes* (SOM-TC), *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM), *Senior Labor Officials Meeting* (SLOM), A*SEAN Senior Transport Officials Meeting* (STOM), *Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication* (SOMRDPE), dan *ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development* (SOMSWD);

f. Tingkat Komite Wakil Tetap (*Committee of Permanent Representatives*/CPR), dilakukan melalui *Joint Cooperation Committee* (JCC) dengan Mitra Wicara dan *Joint Sectoral Cooperation Committee* (JSCC) dengan Mitra Wicara Sektoral;

g. Tingkat Direktur, dilakukan melalui *Working Group*/WG.

4. Pelaksanaan Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara *(Dialogue Partner)*

a. ASEAN–Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan RRT dimulai secara informal pada tahun 1991. RRT kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(full Dialogue Partner)* pada tahun 1996. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-RRT kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada bulan Oktober 2003.

Pada bulan September 2012, secara resmi RRT membuka kantor Misi RRT untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan RRT memperingati 25 tahun pelaksanaan pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2017.

RRT adalah mitra dagang ASEAN terbesar dengan total nilai perdagangan mencapai USD 469,10 miliar (2018) atau sebesar 17 persen dari seluruh nilai total perdagangan barang ASEAN. RRT juga merupakan investor asing ke-3 terbesar ASEAN dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai investasi sebesar USD 10,2 miliar (2018) yang merupakan 6,6 persen dari total seluruh investasi asing di ASEAN.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama, antara lain untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), penanganan keamanan nontradisional, penanganan kejahatan transnasional, pertahanan, kejahatan lintas negara, kerja sama kelautan dan keamanan khususnya di Laut China Selatan, penanggulangan terorisme dan ekstremisme, keamanan siber *(cyber security),* dan konektivitas maritim.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama, antara lain dalam perdagangan bebas; ketahanan pangan, pertanian, dan kehutanan, kerja sama maritim, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), iptek dan inovasi, kerja sama luar angkasa *(outer space)*, transportasi, pariwisata, kerja sama energi dan mineral, *quality inspection*, bea cukai/kepabeanan, hak kekayaan intelektual, UMKM, dan kerja sama industri.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan RRT sepakat bekerja sama di bidang kesehatan publik, pendidikan, pelestarian budaya, pengembangan sumber daya manusia (SDM), perlindungan sosial *(social protection),* pengentasan kemiskinan *(poverty reduction),* konservasi lingkungan hidup, media, penanganan bencana, peningkatan interaksi orang-perseorangan, dan kerja sama antarpemerintah daerah.

b. ASEAN–Jepang

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Jepang diawali dengan dialog yang secara tidak resmi pertama kali dibentuk pada tahun 1973. Jepang kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(Full Dialogue Partner)* pada bulan Maret tahun 1977 lewat penyelenggaraan *ASEAN-Japan Forum.*

Pada 26 Mei 2011, secara resmi Jepang membuka kantor Misi Jepang untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan Jepang telah memperingati 45 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2018.

Jepang merupakan mitra dagang ASEAN terbesar keempat dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 219,2 miliar (2018). Jepang juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar kedua dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai USD 13,4 miliar (2018).

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Jepang sepakat bekerja sama, antara lain dalam kejahatan transnasional termasuk terorisme, pemberantasan ekstremisme, keamanan siber, kerja sama pertahanan, HAM, hukum, operasi perdamaian, penyebaran obat-obatan terlarang, keamanan maritim dan stabilitas kawasan Laut China Selatan, pelucutan senjata dan nonproliferasi.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Jepang sepakat bekerja sama antara lain dalam perdagangan dan investasi, keuangan, pembangunan infrastruktur, kepabeanan, konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), energi dan mineral, pengelolaan air dan air limbah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan, perikanan dan kehutanan, transportasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), inovasi dan transfer teknologi, dan pengembangan industri baru, serta ekonomi digital dan *e-commerce*.

Di bidang sosial dan budaya, ASEAN dan Jepang sepakat bekerja sama, antara lain: pertukaran masyarakat dan kebudayaan, pertukaran pemuda dan akademisi/pelajar, olah raga, pariwisata, *public outreach*, pengembangan SDM (pendidikan, vokasi, dan keterampilan), ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan termasuk bidang farmasi, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan perubahan iklim termasuk pencapaian *low carbon growth*, upaya pencapaian *Sustanainable Development Goals*/SDGs, penanggulangan *marine plastic debris*, pembangunan berkelanjutan, kerja sama penanganan bencana, tanggap darurat, dan bantuan kemanusiaan.

ASEAN-Jepang menaruh perhatian besar pada kerja sama pertukaran masyarakat dan kebudayaan, khususnya antara anak muda dan kalangan akademisi/pelajar dengan tujuan membentuk rasa kekeluargaan, rasa hormat antarsesama dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengenai tradisi dan nilai-nilai yang dianut. Salah satu program kunci yang diinisiasi oleh Jepang untuk mempersiapkan fondasi solidaritas yang baik yang melibatkan ASEAN, Jepang, dan kawasan lain adalah *The Japan East-Asia Network of Exchange for Students and Youths* (JENESYS). JENESYS dibentuk untuk meningkatkan pemahaman bersama antara kaum muda, mempererat tali persahabatan, dan memperkuat kerja sama masa kini maupun mendatang antara keduanya. Area yang menjadi fokus utama adalah komunitas dan kebudayaan, teknologi, olahraga, dan lainnya. Aktivitasnya mencakup kunjungan ke tempat-tempat edukatif dan institusi, *home-stay*, perkuliahan dan diskusi dan aktivitas grup lainnya.

ASEAN-Jepang juga mempromosikan pertukaran antar-universitas dengan mengedepankan kualitas melalui *"Re-inventing Japan Project"* yang bertujuan untuk mempererat jaringan universitas-universitas di Negara Anggota ASEAN dan untuk memperkuat pertukaran pelajar. Selain itu terdapat *ASIA KAKEHASHI Project (Asian High School Students' Studying Program in Japan),* program pendidikan dari pemerintah Jepang yang telah memberikan beasiswa pertukaran kepada banyak pelajar ASEAN. Pemberian beasiswa pertukaran ini ditargetkan mencapai seribu pelajar pada tahun 2022. Terkait Sakura *Science Plan (Japan-Asia Youth Exchange Program in Science)* untuk TA 2019, terdapat 2.400 beasiswa yang akan diberikan kepada pelajar ASEAN.

Di bidang lain, Jepang secara aktif mendukung ASEAN melalui Proyek "WA" yang ditujukan untuk membangun dan memperluas perdamaian dan harmonisasi di kawasan Asia untuk kedepannya serta program *Sport for Tomorrow* yang dipelopori oleh Pemerintah Jepang bertujuan untuk memajukan olahraga kepada lebih dari sepuluh juta orang hingga tahun 2020.

c. ASEAN–Republik Korea (ROK)

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan ROK dimulai pada bulan November 1989. ROK kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(Full Dialogue Partner)* pada tahun 1991. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-ROK kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada tahun 2010.

Pada bulan September 2012, Misi ROK untuk ASEAN di Jakarta secara resmi dibuka dan pada tanggal 29 Oktober 2012 Baek Seong Taek menjabat sebagai Duta Besar pertama ROK untuk ASEAN. ASEAN dan ROK memperingati 30 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2019.

ROK merupakan mitra dagang ASEAN terbesar kelima dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 160,5 miliar. ROK juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar kelima dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai USD 6,6 miliar (2018).

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan ROK sepakat bekerja sama, antara lain nonproliferasi, denuklirisasi, keamanan maritim dan kerja sama maritim, termasuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, kerja sama untuk menangani permasalahan keamanan nontradisional seperti: kejahatan lintas negara, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan di laut, pencucian uang, perdagangan narkotika, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan siber *(cybercrime),* serta pelaksanaan *good governance*, demokrasi, HAM, dan memajukan pemikiran moderasi.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan ROK sepakat bekerja sama, antara lain pada perdagangan dan investasi, *regional trade agreements,* keuangan, kepabeanan, UMKM, energi terbarukan, energi alternatif, infrastruktur, transportasi, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, *rural development*, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan ROK sepakat bekerja sama, antara lain: manajemen bencana, lingkungan, perubahan iklim, teknologi ramah lingkungan termasuk *low-carbon green growth*, pengelolaan hutan berkelanjutan dan rehabilitasi hutan, perdagangan flora dan fauna, kesehatan, pendidikan, informasi dan media massa, budaya dan seni, pemuda dan pertukaran orang, kerja sama konsuler, olahraga, pelayan publik, tenaga kerja dan pekerja migran, kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial.

d. ASEAN–India

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan India dimulai pada tahun 1992 melalui bentuk Mitra Wicara Sektoral. India kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(Full Dialogue Partner)* pada Desember 1995. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-India kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada 20 Desember 2012.

Pada 23 April 2015, secara resmi India membuka kantor Misi India untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan India memperingati 20 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2012.

India merupakan mitra dagang ASEAN terbesar keenam dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 79,8 miliar (2018). India juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar keenam dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai USD 1,7 miliar (2018). ASEAN dan India berkomitmen meningkatkan kerja sama bidang perdagangan dan investasi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), iptek, teknologi informasi, dan hubungan antar masyarakat.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan India sepakat bekerja sama, antara lain dalam HAM dan tata kelola pemerintahan yang baik, promosi moderasi, kerja sama maritim, pemberantasan kejahatan transnasional dan kontraterorisme.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan India sepakat bekerja sama, antara lain dalam perdagangan dan investasi, keuangan, energi, transportasi, pangan, pertanian dan kehutanan, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata, pertambangan dan manajemen sumber daya alam, iptek dan inovasi.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan India sepakat bekerja sama, antara lain dalam penanggulangan bencana dan kedaruratan, lingkungan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, kesehatan, kesiapsiagaan dan respons pandemik, pendidikan, kepemudaan, budaya, pertukaran orang, dan perlindungan sosial.

Selain tiga pilar tersebut, ASEAN-India juga memiliki kerja sama lintas bidang, yaitu dalam kerangka *Initiative for ASEAN Integration (IAI) and Narrowing Development Gap* (NDG) dan konektivitas.

e. ASEAN–Australia

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Australia dimulai pada tahun 1974 dalam bentuk Mitra Wicara Penuh *(Full Dialogue Partner)* melalui pembentukan *ASEAN-Australia Consultative Meeting* (AACM). Hal ini menjadikan Australia sebagai Mitra Wicara *(Dialogue Partner)* pertama ASEAN. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Australia kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada tahun 2014.

Pada September 2013, secara resmi Australia membuka kantor Misi Australia untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan Australia memperingati 40 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada 13 November 2014.

Australia merupakan mitra dagang ASEAN terbesar ketujuh jika dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya, dengan nilai perdagangan sebesar USD 67,8 miliar (2018). Australia juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar ketujuh jika dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya, dengan nilai USD 1,596 miliar (2018).

Fokus kerja sama ASEAN-Australia adalah bidang politik, keamanan, perdagangan, investasi, pendidikan dan pelatihan, industri, teknologi, lingkungan hidup dan kebudayaan.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Australia sepakat bekerja sama, antara lain dalam pemberantasan kejahatan transnasional, korupsi, penyelundupan manusia dan penangkapan ikan secara ilegal, pemajuan HAM, penanggulangan bencana, *disarmament, arms control* dan *non-proliferation of Weapons of Mass Destruction*.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Australia sepakat bekerja sama, antara lain dalam perdagangan bebas, integrasi ekonomi kawasan, keuangan, teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi digital, energi dan sumber daya, pertanian dan kehutanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di bidang sosial-budaya, *flagship* area kerja sama ASEAN dan Australia adalah pada sektor pendidikan melalui program *New Colombo Plan* dan *Australia Awards*, serta *Endeavour Scholarships. New Colombo Plan* menjadi platform kerja sama pendidikan yang paling utama sejak tahun 2014. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelajar Australia untuk belajar di ASEAN dan kawasan Asia-Pasifik lainnya. Program *Australian Awards* juga telah memberikan lebih dari seribu beasiswa per tahun kepada pelajar/mahasiswa ASEAN untuk belajar di Australia. Selain itu, ASEAN-Australia juga telah mendirikan *Australia-ASEAN Council* (AAC) di Canberra pada tahun 2015 untuk memperkuat hubungan *people-to-people* dan kelembagaan dengan ASEAN.

Selain tiga pilar tersebut, ASEAN-Australia juga memiliki kerja sama lintas bidang yaitu dalam kerangka *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) *and Narrowing Development Gap* (NDG) dan konektivitas.

f. ASEAN–Selandia Baru

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Selandia Baru dimulai pada tahun 1975 dalam bentuk Mitra Wicara Penuh *(Full Dialogue Partner).* Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada tahun 2015.

Pada Oktober 2015, secara resmi Selandia Baru membuka Kantor Misi Selandia Baru untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan Selandia Baru memperingati 40 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada 22 November 2015.

Selandia Baru merupakan mitra dagang ASEAN terbesar kesepuluh dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 10,3 miliar (2018). Selandia Baru juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar kesembilan dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya, dengan nilai USD 546 juta (2018). Fokus kerja sama ASEAN-Selandia Baru antara lain di bidang penanggulangan bencana, pendidikan dan kepemimpinan, energi terbarukan, dan kontraterorisme dan pencegahan kekerasan ekstrim.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Selandia Baru sepakat bekerja sama, antara lain kontraterorisme, penguatan perdamaian dan stabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik dan HAM, maritim, dan promosi moderasi.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Selandia Baru sepakat bekerja sama, antara lain perdagangan bebas, integrasi dan ketahanan ekonomi, pertanian, energi, dan pariwisata.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan Selandia Baru sepakat bekerja sama, antara lain pendidikan dan kepemimpinan, *SDGs*, penanggulangan bencana, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim, seni, budaya, dan olahraga.

Selain tiga pilar tersebut, ASEAN-Selandia Baru juga memiliki kerja sama lintas bidang, yaitu dalam kerangka *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) *and Narrowing Development Gap* (NDG) dan konektivitas.

g. ASEAN–Amerika Serikat

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1977 dalam bentuk Mitra Wicara Penuh *(Full Dialogue Partner)*. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Amerika Serikat kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada 21 November 2015.

Pada tahun 2010, secara resmi Amerika Serikat membuka kantor Misi Amerika Serikat untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan Amerika Serikat memperingati 40 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2017.

Amerika Serikat merupakan mitra dagang ASEAN terbesar ketiga dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 259,2 miliar (2018). Amerika Serikat juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar keempat dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai investasi sebesar USD 8,1 miliar (2018).

Fokus kerja sama ASEAN-Amerika Serikat adalah bidang *counter-terrorism*, maritim termasuk pemberantasan IUU *Fishing, wildlife trafficking*, perubahan iklim, penanggulangan bencana, energi, pendidikan UMKM, ekonomi digital dan *people-to-people ties*. Berbagai area kerja sama yang tertera pada *Plan of Action* (POA) *to Implement the ASEAN-U.S. Strategic Partnership* 2016--2020 juga telah dirampungkan seluruhnya sebelum berakhirnya periode kerangka kerja sama tersebut yang membuktikan komitmen yang kuat dalam kerja sama dari kedua belah pihak.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Amerika Serikat sepakat bekerja sama, antara lain: mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan, mendukung sentralitas ASEAN, memberantas terorisme, TPPO dan *transnational crimes* lainnya, memperkuat keamanan siber di kawasan, dan meningkatkan kerja sama maritim. Amerika Serikat menginisiasi kerja sama dalam memperkuat kapasitas keamanan siber di wilayah ASEAN melalui kemitraan dalam *Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership* (DCCP), *U.S.-ASEAN Smart Cities Partnership*, dan program bantuan *the U.S.-Singapore Cybersecurity Technical Assistance Programme for ASEAN Member States*. Kedua pihak juga sepakat membina kerja sama dalam pencapaian pemerintahan yang baik dan transparansi birokrasi, hingga kerja sama maritim dengan melaksanakan pelatihan maritim ASEAN-Amerika Serikat pertama kali pada September 2019 di Thailand.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Amerika Serikat sepakat bekerja sama, antara lain dalam meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), teknologi informatika dan ekonomi digital. Amerika Serikat juga mendukung kerangka kerja sama di ASEAN dalam pengembangan smart *cities*. Selain itu juga terdapat kerja sama di bidang energi melalui implementasi kerja sama yang tercantum dalam *ASEAN-U.S. Energy Cooperation Work Plan* 2016--2020.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan Amerika Serikat sepakat bekerja sama, antara lain: pendidikan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kewirausahaan dan inovasi. ASEAN dan AS berkomitmen untuk mengintensifkan *people-to-people exchanges* dan kerja sama di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui berbagai program, seperti *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI) dan *YSEALI Women's Leadership Academy, Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholars Program, Fulbright ASEAN Research Program, U.S.-ASEAN Internship Program*, dan *ASEAN*

Youth Volunteer Program. ASEAN mendorong kerja sama pendidikan dan pelatihan kejuruan (vokasi) untuk mempersiapkan ASEAN menghadapi Revolusi Industri ke-4.

h. ASEAN-Rusia

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Rusia dimulai sejak tahun 1991. Rusia kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(Full Dialogue Partner)* pada tahun 1996. Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia kemudian ditingkatkan kapasitasnya sebagai Mitra Wicara Strategis *(Strategic Partnership)* pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-Russia, November 2018 di Singapura.

Pada tahun 2009 secara resmi Rusia membuka kantor Misi Rusia untuk ASEAN, yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan Rusia memperingati 20 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2016.

Rusia merupakan mitra dagang ASEAN terbesar kedelapan dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 19,8 miliar (2018). Nilai investasi Rusia di ASEAN mencapai USD 58,02 juta pada 2018.

Fokus kerja sama ASEAN-Rusia adalah bidang pembangunan, Sumber Daya Manusia (SDM), lingkungan hidup, pariwisata, kebudayaan, peningkatan *people-to-people contact, counter-terrorism*, maritim, penanganan bencana, kejahatan lintas batas, ekonomi, perdagangan dan investasi, energi, perhubungan, iptek, konektivitas, pendidikan, pemuda.

Indonesia menjadi Koordinator Pelaksanaan Kemitraan ASEAN-Rusia untuk periode 2018--2021. Selama menjadi Koordinator, Indonesia berupaya mendorong kerja sama di kerangka ASEAN–Rusia, khususnya di bidang kontraterorisme, keamanan siber, dan penanggulangan bencana.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Rusia sepakat bekerja sama, antara lain kerja sama peningkatan keamanan dan perdamaian kawasan, kerja sama pemberantasan terorisme dan penanganan isu tradisional maupun nontradisional seperti *cybercrime*, keamanan siber, melalui mekanisme yang sudah ada, peningkatan kapasitas, *joint-research* dan juga program pelatihan, konferensi, serta *workshop* untuk aparat penegak hukum ASEAN dan Rusia.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Rusia sepakat bekerja sama, antara lain: kerja sama perdagangan untuk mewujudkan aspirasi perdagangan dua arah senilai USD 100 miliar pada tahun 2025.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan Rusia sepakat bekerja sama, antara lain: kerja sama pendidikan; kerja sama untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama dan pertukaran dalam bidang musik, teater, arsip, perpustakaan, museum, warisan budaya, tarian, seni visual, film, hak cipta, hasil kerajinan, seni dekorasi dan seni terapan, sirkus, dan bentuk seni lainnya.

i. ASEAN–Kanada

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan Kanada dimulai pada Februari 1977 dengan pertemuan formal pertama ASEAN-Kanada. Kanada kemudian menjadi Mitra Wicara Penuh ASEAN *(Full Dialogue Partner)* pada tahun 1977. Pada tahun 2016, secara resmi Kanada membuka kantor Misi Kanada untuk ASEAN, yang berkedudukan di Jakarta.

ASEAN dan Kanada memperingati 40 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara melalui penyelenggaraan *ASEAN-Canada Commemorative Summit* di Manila pada 14 November 2017.

Kanada merupakan mitra dagang ASEAN terbesar kesembilan dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai perdagangan sebesar USD 15 miliar (2018). Kanada juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar kedelapan dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya dengan nilai USD 0,3 miliar (2018).

Fokus kerja sama ASEAN-Kanada mencakup berbagai area yang tertuang dalam *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-Canada Enhanced Partnership* 2016--2020, yaitu: bidang politik, keamanan, hak asasi manusia, penanggulangan terorisme, perdagangan dan investasi.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan Kanada sepakat bekerja sama, antara lain kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional, peningkatan kerja sama di bidang keamanan siber dan pengembangan ekonomi digital.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan Kanada sepakat bekerja sama, antara lain kerja sama untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui peningkatan akses pembiayaan dan pendanaan lain dan kerja sama perdagangan.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan Kanada sepakat bekerja sama, antara lain kerja sama perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, kerja sama kerja sama di bidang pembanguan berkelanjutan, kerja sama manajemen bencana, kerja sama untuk membantu negara-negara ASEAN transisi ke arah kegiatan ekonomi rendah karbon dan ramah lingkungan.

j. ASEAN–Uni Eropa (UE)

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan UE dimulai secara informal pada 1977 saat UE masih bernama Masyarakat Ekonomi Eropa. Kerja sama ini kemudian diformalkan pada Maret 1980 melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ASEAN-Masyarakat Ekonomi Eropa *(ASEAN-EEC Cooperation Agreement).* Hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-UE kemudian meningkat pada tahun 2007 melalui diadopsinya *Nuremberg Declaration on an ASEAN-EU Enhanced Partnership*.

Pada tahun 2016, secara resmi UE membuka kantor Misi UE untuk ASEAN, yang berkedudukan di Jakarta. ASEAN dan UE memperingati 40 tahun pelaksanaan kemitraan sebagai Mitra Wicara pada tahun 2017.

UE merupakan mitra dagang ASEAN terbesar kedua dibandingkan dengan Mitra Wicara lainnya, dengan nilai perdagangan sebesar USD 287,9 miliar (2018). UE juga menjadi sumber investasi asing ASEAN terbesar dengan nilai investasi sebesar USD 21,96 miliar pada 2018. Kerja sama kemitraan ASEAN-UE memiliki 4 prioritas, yaitu penguatan konektivitas, peningkatan perdagangan dan investasi, penguatan kerja sama bidang iklim, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan kerja sama maritim dan penanggulangan kejahatan transnasional.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan UE sepakat bekerja sama, antara lain: kerja sama untuk berkontribusi pada perdamaian, keamanan dan stabilitas di tingkat kawasan dan global, kerja sama untuk menjawab tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional khususnya di bidang keamanan siber, penanganan isu-isu perbatasan, kejahatan transnasional, penanggulangan radikalisasi dan *violent extremism* hingga keamanan maritim, dan kerja sama pengembangan *cyberspace* yang aman dan tangguh guna mendukung kegiatan ekonomi digital yang baik di kawasan ASEAN.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan UE sepakat bekerja sama, antara lain: penyelesaian isu kelapa sawit, penjajakan pengaturan kerja sama perdagangan bebas dan transportasi udara antara ASEAN-EU, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), kerja sama ekonomi digital melalui pertukaran lebih lanjut tentang kerangka kerja kebijakan dan peraturan tentang ekonomi digital, dan pengembangan *smart cities*.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan UE sepakat bekerja sama, antara lain kerja sama penanggulangan bencana, penanganan perubahan iklim *(climate change),* pembangunan berkelanjutan, pengembangan pemuda, migrasi, peningkatan pendidikan, dan penanganan dan pengelolaan sampah laut.

k. ASEAN–Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)

Kerja sama kemitraan antara ASEAN dan PBB dimulai dengan kerja sama antara ASEAN dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada awal tahun 1970-an dalam bentuk pemberian bantuan teknis keahlian dan pengembangan kapasitas dari UNDP kepada ASEAN di bidang pembangunan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, jasa-jasa moneter dan asuransi. Pada tahun 1977, kerja sama ini diformalkan dengan peluncuran *ASEAN-UNDP Sub-Regional Programme*. Sejumlah badan khusus PBB seperti UNESCO, UNESCAP, UNAIDS, WHO, ILO, UNICEF, UNHCR dan OCHA kemudian juga melakukan kerja sama dengan ASEAN tanpa terstruktur.

Kerja sama ASEAN dan PBB semakin berkembang sejak KTT ASEAN-PBB tahun 2000 di Bangkok. Saat itu, Sekjen PBB menyatakan bahwa ASEAN merupakan mitra PBB terpercaya di bidang pembangunan. Kerja sama ASEAN-PBB semakin kuat dengan diselenggarakannya KTT ASEAN-PBB ke-4 tahun 2011 di Bali, Indonesia yang menyepakati peningkatan status kerja sama PBB dari kerja sama menjadi kerja sama komprehensif. Hingga saat ini, ASEAN-PBB telah melaksanakan KTT sebanyak 9 Kali.

Ruang lingkup kerja sama ASEAN-PBB meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan penekanan pada penguatan kerja sama institusional untuk: mencapai *the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* (SDGs 2030), mengurangi kesenjangan pembangunan, mengatasi ancaman perubahan iklim, pertukaran informasi dan keahlian, kolaborasi dalam penanganan bencana alam dan konektivitas regional. Bentuk kerja sama ASEAN-PBB lebih kepada pembangunan kapasitas dari tenaga ahli PBB kepada pemangku kepentingan di ASEAN.

Di bidang politik-keamanan, ASEAN dan PBB sepakat bekerja sama, antara lain di bidang perdamaian dan keamanan, *preventive diplomacy*, memerangi terorisme dan *violent extremism*, mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, mendorong peran aktif ASEAN dalam pasukan perdamaian PBB, termasuk pasukan perempuan dan penyelesaian masalah Palestina.

Di bidang ekonomi, ASEAN dan PBB sepakat bekerja sama, antara lain dalam mendorong integrasi ekonomi di kawasan, mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendukung ASEAN mencapai ketahanan pangan melalui kerja sama di bidang pertanian dan kehutanan, dan ketahanan energi.

Di bidang sosial-budaya, ASEAN dan PBB sepakat bekerja sama, antara lain dalam meningkatkan ketahanan ASEAN dalam menghadapi bencana alam, pengurangan dampak dari perubahan iklim, meningkatkan kerja sama pendidikan dan sosial budaya, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan serta kesehatan publik terutama di bidang penyakit pandemik.

Tabel 2.2. Matriks Informasi Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara

	RRT	Jepang	Korea Selatan	India	Australia	Selandia Baru	Amerika Serikat	Rusia	Kanada	Uni Eropa
Kemitraan Strategis	√	√	√	√	√	√	√	√		
Peringkat Perdagangan Dua Arah (2018)	$469,10 miliar Ke-1	$219,2 miliar Ke-4	$160,5 miliar Ke-5	$79,8 miliar Ke-6	$67,8 miliar Ke-7	$10,3 miliar Ke-10	$259,2 miliar Ke-3	$ 19,8 miliar Ke-8	$15 miliar Ke-9	$ 287,9 miliar Ke-2
Peringkat Investasi di ASEAN (2018)	$10,2 miliar Ke-3	$13,4 miliar Ke-2	$6,6 miliar Ke-5	$1,7 miliar Ke-6	$1,596 miliar Ke-7	$546 juta Ke-9	$8,1 miliar Ke-4	$58,02 juta Ke-10	$0,3 miliar Ke-8	$21,96 miliar Ke-1
Potensi kerja sama Bidang Politik Keamanan	Penanganan kejahatan transnasional	Penanganan kejahatan transnasional	Non-proliferasi, denuklirisasi, kejahatan lintas negara	Kemaritiman	Penanganan kejahatan transnasional	Penanganan kejahatan transnasional, kontraterorisme	Kontra-terorisme, maritim,	Pemberan-tasan terorisme, keamanan siber, manajemen bencana	Pemberdayaan perempuan dalam perdamaian, perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran	Penanganan kejahatan transnasional
Potensi kerja sama Bidang Ekonomi	Perdagangan bebas, infrastruktur, iptek dan inovasi, pariwisata, kesehatan publik, pendidikan	Perdagangan dan investasi, konektivitas, infrastruktur, pembangunan ekonomi berkelanjutan, TIK, pendidikan, pertukaran masyarakat /budaya, kesehatan, pertanian	Perdagangan dan investasi, iptek dan inovasi, UMKM, teknologi ramah lingkungan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan rehabilitasi hutan	Perdagangan dan investasi, konektivitas, pengembangan SDM, pendidikan, TIK, hubungan antarmasyarakat	Perdagangan bebas, TIK, promosi UMKM, pendidikan dan pemuda	Perdagangan bebas, pertanian dan peternakan, pencapaian *SDGs*, penanganan bencana	Kewirausa-haan, ekonomi digital, TIK, pendidikan, pertukaran masyarakat dan pemuda, penanganan bencana	-	Pemberdayaan perempuan (dalam ekonomi UMKM)	Konektivitas, perdagangan dan investasi, maritim

Sumber: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

Potensi kerja sama Bid. Sosial Budaya	Iptek dan inova-si, pariwisata Kesehatan publik, pendidikan	TIK Pendidikan, pertukaran masyarakat /budaya, kesehatan, pertanian	Iptek dan inovasi, UMKM Teknologi ramah lingkungan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan rehabilitasi hutan	Pengembangan SDM, pendidikan, TIK, hubungan antar masyarakat	TIK, promosi UMKM, Pendidikan dan pemuda	Pencapaian SDGs, penanganan bencana	TIK, Pendidikan, pertukaran masyarakat dan pemuda, penanganan bencana	-	Pemberdayaan perempuan, pendidikan perlindung-an dan pemajuan hak-hak pekerja migran	Perubahan iklim, lingkungan hidup, penanganan bencana, pembangunan berkelanjutan

Tabel 2.3. Mitra Wicara Sektoral dan Mitra Pembangunan

	Pakistan	Norwegia	Swiss	Turki	Jerman	Chile
Status	Mitra Wicara Sektoral				Mitra Pembangunan	
Permulaan kemitraan	1993	2015	2016	2017	2016	2019
Peringkat Perdagangan Dua Arah (2018)	$8,2 miliar	$2,73 miliar	$17,59 miliar	$8,727 miliar	$65,439 miliar	$6,227 miliar
Peringkat Investasi di ASEAN (2018)	$12,68 juta	$-863 juta	$1,22 juta	$35,03 juta	$2,27 miliar	$0,71 juta
Potensi kerja sama	Perdagangan dan investasi, iptek, pengembangan SDM	Promosi perdamaian dan hak asasi manusia Energi, kelautan dan kemaritiman Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pelestarian lingkungan hidup, *people-to-people exchange*, termasuk pendidikan dan budaya, pengembangan UMKM	Hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, perdamaian dan rekonsiliasi Pangan, pertanian, ketahanan pangan dan perhutanan sosial Pembangunan manusia dan pendidikan termasuk pendidikan vokasi, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	Kontraterorisme, penanggulangan kejahatan trans-nasional, pemajuan hak asasi manusia perdagangan dan investasi, Public Private Partnership (PPP), pemajuan UMKM, pariwisata penanggulangan bencana, pembangunan berkelanjutan, kebudayaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembangunan pemuda.	Kontraterorisme, ekstremisme dengan kekerasan, dan pemberantasan kejahatan transnasional, maritim, perdamai-an, tata kelola pemerintahan, dan hak asasi manusia. pembangunan infrastruktur, penguatan institusi dan pengembangan kapasitas, lingkungan hidup perubahan iklim, pertanian dan perhutanan berkelanjutan, ketahanan pangan, energi, pendidikan tinggi, *Technical and Vocational Education Training* (TVET)	Sedang dalam pembahasan

Sumber: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

Tabel 2.4. ASEAN Plus Three dan East Asia Summit

	ASEAN Plus Three	East Asia Summit
Permulaan kemitraan	**1997**	**2015**
Potensi kerja sama	Perdagangan, investasi, keuangan dan perbankan, alih teknologi, industri, pertanian, pemajuan UMKM, pariwisata, jejaring dunia usaha, serta ilmu pengetahuan dan teknologi	Sembilan prioritas kerja sama: 1. Lingkungan hidup dan energi; 2. Pendidikan; 3. Keuangan; 4. Isu-isu kesehatan global dan penyakit pandemik; 5. Penanganan bencana alam; 6. Konektivitas ASEAN; 7. Perdagangan dan ekonomi; 8. Ketahanan pangan; 9. Kerja sama maritim.

Sumber: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri

Bab III Implementasi Kurikulum ASEAN di Pendidikan Menengah

Materi Bab I dan Bab II merupakan materi pengayaan dan referensi bagi guru dalam melaksanakan penguatan pembelajaran tentang ASEAN. Guru diharapkan dapat membuat bahan ajar sesuai dengan kebutuhan penggunaan materi yang terdapat dalam Bab I dan Bab II. Materi Bab III merupakan sumber inspirasi bagi guru dalam mengembangkan dan melaksanakan penguatan pembelajaran tentang ASEAN.

Pembelajaran materi tentang ASEAN pada jenjang SMA dalam Kurikulum 2013 dilakukan melalui kegiatan kurikuler yang terdapat pada kompetensi dasar (KD) mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas XII. Materi tentang ASEAN tidak dibahas secara lengkap sehingga hadirnya modul ASEAN ini dapat dijadikan sebagai suplemen dan referensi bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran tentang ASEAN yang lebih mendalam. Selain melalui kegiatan kurikuler, pembelajaran tentang ASEAN pada jenjang SMA dapat dilakukan melalui pengayaan dan penguatan materi, yaitu melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, literasi sekolah, dan pembiasaan. Penguatan tersebut diperlukan untuk menyukseskan visi dan tujuan ASEAN serta kerja sama antarnegara anggota ASEAN.

Kegiatan kokurikuler dilakukan melalui penugasan, kegiatan ekstrakurikuler dilakukan melalui pengintegrasian materi ASEAN dalam kegiatan yang relevan, literasi sekolah dilakukan melalui aktivitas siswa membaca buku-buku tentang ASEAN, serta pembiasaan dilakukan melalui peringatan hari lahirnya ASEAN dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan negara-negara ASEAN. Pengayaan dan penguatan materi ASEAN pada jenjang SMA ini dilakukan dalam rangka memutakhirkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai arti penting dan manfaat ASEAN bagi masyarakat Indonesia.

1. Kompetensi Dasar Muatan ASEAN

Dalam Kurikulum 2013 jenjang SMA, pembahasan ASEAN terdapat pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII sebagai berikut:

3.8 Mengevaluasi peran Bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting.

4.8 Menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting serta menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

Muatan materi Kompetensi Dasar 3.8 dan 4.8 dalam kelas XII yang berkaitan dengan Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia adalah sebagai berikut:

1) KAA (Konferensi Asia Afrika)
2) Misi Garuda
3) Deklarasi Djuanda
4) Gerakan Non Blok
5) ASEAN
6) OKI
7) *Jakarta Informal Meeting*

2. Pemetaan Integrasi Kurikulum

Materi ASEAN dibahas dengan lengkap dan terperinci dalam Bab II yang meliputi materi Sejarah ASEAN, Arah dan Tujuan ASEAN, Profil dan Keanggotaan ASEAN, Masyarakat ASEAN, Isu-Isu Politik dan Keamanan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, dan Kerja Sama ASEAN dengan negara-negara lain dan Organisasi Internasional, serta Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia melalui ASEAN.

Materi-materi yang terdapat dalam Bab II umumnya disampaikan melalui kegiatan pembelajaran kurikuler oleh guru sejarah di kelas, sedangkan materi-materi kontekstual dan materi-materi yang tidak ada di modul disampaikan melalui kegiatan kokurikuler dan diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Materi-materi yang dijadikan tugas kokurikuler dan diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:

a. **Isu-Isu Politik dan Keamanan di ASEAN**

Dalam Isu-Isu Politik dan Keamanan di ASEAN ini, materi yang dibahas meliputi Keamanan Kawasan, Kerja Sama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, Kerja Sama Keamanan Maritim, serta Hukum dan Hak Asasi Manusia di ASEAN. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang diharapkan dari materi ini adalah siswa mampu mengidentifikasi isu-isu politik dan keamanan di ASEAN hingga sekarang ini.

b. Kerja Sama ASEAN di Berbagai Bidang

Dalam Kerja Sama ASEAN di Berbagai Bidang, materi yang dibahas adalah Perempuan, Kepemudaan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Lingkungan Hidup.

c. Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Melalui ASEAN

Berkaitan dengan Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Melalui ASEAN, materi yang dibahas, antara lain, Penyelesaian Bangsa Moro di Filipina, Perdamaian di Kamboja, *Bali Concord*, dan *Rakhine State* di Myanmar. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dari pembahasan materi ini adalah siswa mampu mengevaluasi peran Indonesia dalam memengaruhi proses perdamaian dunia melalui kerja sama ASEAN.

d. Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional

Dalam Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional, materi yang dibahas meliputi pengenalan dasar tentang kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, Mitra Pembangunan, ASEAN *Plus Three, East Asia Summit*, dan kerja sama lainnya. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang diharapkan dari materi ini adalah siswa mampu menyajikan hasil telaah tentang kerja sama ASEAN dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang menjadi Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, dan Mitra Pembangunan dalam upaya turut serta menciptakan perdamaian dunia melalui ASEAN.

3. Daftar Tugas Kokurikuler

Berdasarkan pemetaan materi, guru dapat menyusun tugas kokurikuler sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Tugas Kokurikuler

No.	Materi	Contoh Tugas
1.	Isu-Isu Politik dan Keamanan ASEAN	Menganalisis penayangan video yang dapat diakses melalui tautan https://www.youtube.com/watch?v=25UqxKrechU Skenario: a. Guru membagi siswa menjadi sepuluh kelompok sesuai dengan keanggotaan negara ASEAN. b. Guru memberikan pengantar materi dan menayangkan video tentang isu-isu politik dan keamanan ASEAN. c. Guru mempersilakan siswa untuk bertanya tentang materi pengantar dan guru menyiapkan lembar aktivitas yang akan dikerjakan oleh siswa setelah penayangan video. d. Guru menyiapkan siswa untuk menganalisis tayangan video yang disajikan, kemudian menayangkan cuplikan video tentang Laut China Selatan. e. Setelah penayangan video selesai, guru mempersilakan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya sesuai dengan persepsi negara yang diperankannya, kemudian kelompok negara lain menanggapi. Aktivitas itu dilakukan seterusnya hingga semua kelompok tampil. f. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi.

2.	Kerja Sama ASEAN di Berbagai Bidang	Menggunakan metode pembelajaran jigsaw untuk menganalisis kerja sama ASEAN dalam berbagai bidang berikut: a. Perempuan b. Kepemudaan c. Pendidikan d. Ketenagakerjaan e. Lingkungan Hidup Penyampaian materi dapat disampaikan melalui pemutaran video. Skenario: a. Guru menayangkan video tentang bentuk-bentuk kerja sama ASEAN di berbagai bidang. b. Siswa mengajukan pertanyaan tentang keterkaitan materi dalam penayangan video tersebut. c. Guru membagi kelompok yang beranggotakan enam orang. d. Guru memberikan topik-topik diskusi. Setiap anak yang memiliki topik yang sama berkumpul membentuk kelompok ahli. e. Siswa berdiskusi di dalam kelompok ahli. f. Siswa kembali ke kelompok asal. g. Siswa berdiskusi di dalam kelompok asal. h. Guru bersama siswa membuat simpulan hasil diskusi.
3.	Peranan Indonesia dalam Perdamaian Dunia	Menggunakan model simulasi tokoh tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Skenario: a. Guru membagi siswa dalam empat kelompok. b. Setiap siswa mengambil nomor undian kelompok berikut: 1. *Bali Concord I* 2. Perdamaian Kamboja 3. Sengketa Laut China Selatan 4. *Rakhine State,* Myanmar c. Setiap kelompok mengeksplorasi materi masing-masing yang berkaitan dengan peran salah satu tokoh Indonesia yang dominan dalam upaya perdamaian dunia.

		d. Guru mempersilakan perwakilan kelompok untuk menampilkan dialog pembicaraan tokoh utama tersebut selama minimal 10 menit. e. Perwakilan kelompok tampil dan kelompok lain mengisi lembar aktivitas yang dibagikan guru. Aktivitas itu dilakukan seterusnya hingga semua kelompok selesai tampil. f. Guru bersama siswa membuat simpulan.
4.	Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional	Menggunakan model simulasi sidang atau pertemuan ASEAN yang dilakukan dengan negara-negara lain dan organisasi internasional yang menjadi Mitra Wicara, Mitra Wicara Sektoral, Mitra Pembangunan, *ASEAN Plus Three,* dan *East Asia Summit.* Melalui simulasi sidang atau pertemuan ini, para siswa diharapkan dapat memahami mekanisme pengembangan dan pembahasan berbagai kerja sama yang dilakukan ASEAN dengan mitranya. Dalam pelaksanaan simulasi, sekolah dapat mengundang Kementerian Luar Negeri, c.q. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN sebagai fasilitator. Skenario (menggunakan model pertemuan *East Asia Summit*): a. Guru membagi siswa menjadi 19 kelompok sesuai dengan jumlah peserta pertemuan *East Asia Summit* (10 negara anggota ASEAN, 8 negara peserta *East Asia Summit*, dan 1 Sekretariat ASEAN). b. Guru memberikan pengantar materi tentang kerja sama ASEAN dengan negara-negara lain melalui *East Asia Summit* dan pertemuan formal yang dilaksanakan. c. Guru mempersilakan siswa untuk bertanya tentang materi pengantar serta menyiapkan dan membagikan panduan simulasi sidang yang akan dipraktikkan oleh siswa. d. Siswa menyiapkan materi masing-masing sesuai dengan perannya sebagai wakil negara tertentu dalam pertemuan.

		e. Setelah materi disiapkan, simulasi sidang dapat dilaksanakan. Pengaturan ruangan dapat disesuaikan mendekati kondisi sebenarnya. Seluruh kelompok tampil menyampaikan pandangannya. f. Guru bersama siswa membuat simpulan.

4. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran tentang ASEAN. Tabel berikut menyajikan identifikasi kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diperkaya dengan muatan materi ASEAN.

Tabel 3.2
Contoh Kegiatan Ekstrakurikuler yang Terintegrasi dengan Muatan Materi ASEAN

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Deskripsi Kegiatan
1.	Pramuka	Menggali informasi tentang kedudukan dan kegiatan kepramukaan di sekolah-sekolah negara anggota ASEAN.
2.	KIR (karya ilmiah remaja)	Mengembangkan keterampilan dalam penelitian tentang tema peranan Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam menciptakan perdamaian dunia.
3.	Jurnalistik	Mengembangkan keterampilan menulis berita dengan mengacu pada tema, antara lain, pendidikan, budaya, destinasi wisata, sosial, politik, hukum, dan keamanan di kawasan ASEAN.
4.	Sanggar seni rupa	Mengembangkan kreativitas seni dalam bentuk gambar, baik manual maupun digital yang menghasilkan produk berupa, antara lain, lukisan, komik, atau ragam hias batik yang mengadaptasi corak ragam hias negara anggota ASEAN.
5.	Teater	Melakukan pergelaran teater dengan mengambil tema cerita, legenda, atau kisah yang dimiliki negara anggota ASEAN.

6.	Sanggar tari	Mengembangkan kreativitas seni dalam bentuk tarian tradisional dan modern dengan mengenalkan tarian tradisional dari negara anggota ASEAN.
7.	Olahraga	Mengenalkan cabang olahraga khas dari beberapa negara anggota ASEAN, misalnya silat dan sepak takraw.
8	PMR (palang merah remaja)	Menggali informasi tentang kedudukan dan peran PMR di sekolah-sekolah negara anggota ASEAN.
9	Pencinta alam	Membahas ragam ketampakan alam yang dimiliki negara anggota ASEAN dan menjalin kerja sama dengan kelompok siswa pencinta alam dari negara anggota ASEAN.
10	Sanggar musik/Paduan suara	Mengembangkan kreativitas seni dalam bentuk musik / suara dengan membawakan / menyanyikan lagu-lagu nasional negara anggota ASEAN.

5. Gerakan Literasi Sekolah

Penguatan pembelajaran tentang ASEAN dapat dilakukan melalui gerakan literasi sekolah. Kegiatan ini menjadi program rutin yang harus dilaksanakan di setiap sekolah dalam rangka meningkatkan minat membaca siswa Indonesia. Beberapa kegiatan pembiasaan berikut dapat diintegrasikan dengan muatan materi ASEAN.

a. Penyediaan Bahan Bacaan yang Berkaitan dengan ASEAN

Dalam penyediaan bahan bacaan (baik bentuk cetak maupun digital atau elektronik), jenis bahan bacaan harus sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan psikologis siswa. Jenis bahan bacaan meliputi karya fiksi dan nonfiksi. Genre yang direkomendasikan untuk pemilihan bahan bacaan, antara lain, tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Contoh Genre Bahan Bacaan

Fiksi	Nonfiksi
Karya fiksi dapat berupa cerpen, novel, atau komik dengan genre berikut: 1) Petualangan 2) Fantasi 3) Misteri dan/atau detektif 4) Cerita klasik 5) Humor	Karya nonfiksi dapat berupa genre atau mengangkat tema berikut: 1) Cerita kehidupan sehari-hari 2) Kisah sejarah 3) Karya ilmiah populer 4) Majalah dan/atau surat kabar 5) Ilmu pengetahuan 6) Olahraga 7) Seni 8) Biografi dan/atau otobiografi 9) Motivasi
Keterangan: Karya mengandung tema yang berkaitan dengan ASEAN dan/atau negara anggota ASEAN	

b. Pembiasaan membaca

Selaras dengan penumbuhan budaya membaca, pembiasaan berupa kegiatan membaca selama 15 menit setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dapat didesain dengan membaca bahan bacaan bertema ASEAN.

c. Peringatan Hari-Hari Besar

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan membangun toleransi terhadap keragaman budaya di ASEAN, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan peringatan hari jadi ASEAN setiap tanggal 8 Agustus. Bentuk perayaan yang dapat dilakukan, seperti penyelenggaraan kegiatan Festival ASEAN. Beberapa contoh kegiatan dalam festival ASEAN, antara lain:

1) mementaskan drama sejarah pembentukan ASEAN;
2) mengadakan pertunjukan seni tari, seni musik, permainan tradisional, dan peragaan busana (*fashion show*) yang menampilkan kekhasan setiap negara anggota ASEAN;
3) mengadakan lomba memasak makanan khas dari negara anggota ASEAN;
4) mengadakan simulasi sidang atau pertemuan ASEAN; serta
5) mengadakan diskusi buku bertema ASEAN.

d. Kebermanfaatan Modul Untuk Mata Pelajaran Lainnya

Buku Bahan Pengajaran ASEAN Bagi Pendidikan Menengah dirancang untuk memperkaya wawasan guru ketika mengajarkan mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas XII. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan modul ini memberi kebermanfaatan untuk mata pelajaran dan kelas yang lain. Bila dirasa sesuai, guru mata pelajaran lainnya dapat juga memanfaatkan berbagai informasi dalam modul ini sebagai suplemen dan referensi. Sebagai contoh, pada mata pelajaran Ekonomi kelas XI yang memiliki Kompetensi Dasar 3.8 dan 4.8 tentang "Kerjasama Ekonomi Internasional" serta Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 tentang "Kebijakan Perdagangan Internasional", guru dapat menggunakan informasi tentang kondisi dan perkembangan ekonomi negara-negara ASEAN yang tersaji di dalam modul ini.

LEMBAR AKTIVITAS SISWA

ISU-ISU POLITIK KEAMANAN ASEAN

PETUNJUK SISWA

1. Identitas
   a. Mata pelajaran : Sejarah Indonesia
   b. Kelas/semester : XII/ 2
   c. Materi pokok : Laut China Selatan

2. Peta Konsep



3. Aktivitas Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari materi Isu-Isu Politik Keamanan Kawasan ASEAN, ada salah satu isu yang melibatkan kawasan maritim negara anggota ASEAN, yaitu Laut China Selatan. Apakah kamu sering mendengarnya? Laut yang dikelilingi oleh sejumlah negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ini merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis dan menyimpan cadangan minyak bumi yang cukup besar. Nilai perdagangan di jalur ini diperkirakan lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun. Cadangan minyak bumi yang tersimpan sebesar 11 miliar barel dan gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik.

Tak heran jika wilayah perairan ini terus-menerus dilanda ketegangan antarnegara di sekelilingnya. RRT dan sejumlah negara anggota ASEAN melakukan saling klaim sejumlah wilayah di Laut China Selatan, seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Bedah Kasus

Kapal berbendera RRT dilaporkan memasuki wilayah perairan di sekitar Kepulauan Spratly di Laut China Selatan yang masih disengketakan oleh RRT dan sejumlah negara anggota ASEAN yang mengeklaim (*claimant states*). Kapal itu melakukan sejumlah aktivitas seperti survei kelautan. Sebagai respons atas laporan tersebut, negara-negara yang mengeklaim (*claimant states*) melakukan tindakan protes, termasuk menyiapkan armada militer.

Soal/Pertanyaan

Bagaimanakah pendapatmu tentang kejadian tersebut? Sebagai negara yang tidak termasuk negara-negara yang mengklaim (*non-claimant states)*, mengapa Indonesia perlu berperan untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut antara *claimant states* (RRT dan sejumlah negara anggota ASEAN) pada kasus di atas? Bagaimana Indonesia dapat berperan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan?

Jawaban

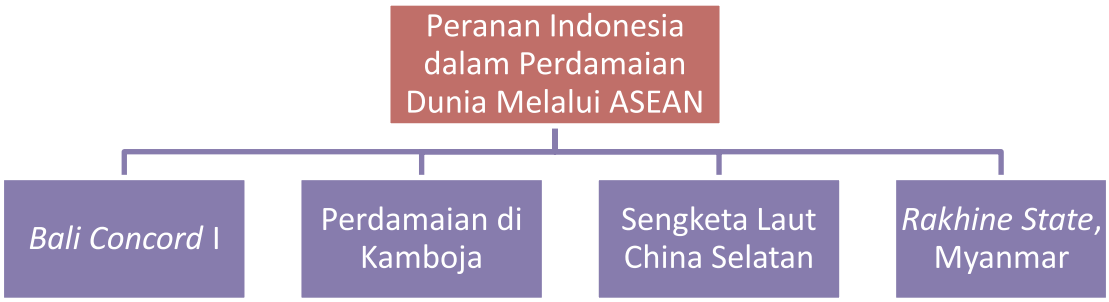
LEMBAR AKTIVITAS SISWA

PERANAN INDONESIA DALAM MEMELIHARA PERDAMAIAN DUNIA MELALUI ASEAN

PETUNJUK SISWA

1. Identitas
   a. Mata pelajaran : Sejarah Indonesia
   b. Kelas/semester : XII/ 2
   c. Materi pokok : Proses Perdamaian di Kamboja

2. Peta Konsep



3. Aktivitas Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari materi Peranan Indonesia dalam Perdamaian Dunia Melalui ASEAN, topik yang menarik untuk kamu bahas adalah tentang upaya perdamaian Kamboja melalui pelaksanaan *Jakarta International Meeting* (JIM). Apakah kamu pernah mendengarnya? Ternyata upaya Indonesia ini penuh dengan tantangan untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai faksi yang bertikai di Kamboja.

Coba kamu eksplorasi data tentang berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya melaksanakan perdamaian di Kamboja. Bagaimanakah respons internasional lainnya terhadap keterlibatan Indonesia sebagai perantara dalam perdamaian di Kamboja tersebut?

Uraikan datamu dengan menyebutkan sumber.

Berbagai kendala yang dihadapi Indonesia dalam upaya perdamaian Kamboja:

Respons internasional terhadap peran Indonesia dalam upaya perdamaian Kamboja:

LEMBAR AKTIVITAS SISWA

KERJA SAMA ASEAN DI BERBAGAI BIDANG

PETUNJUK SISWA

1. Identitas
   a. Mata pelajaran : Sejarah Indonesia
   b. Kelas/semester : XII/ 2
   c. Materi pokok : Kerja Sama Ketenagakerjaan

2. Peta Konsep



3. Aktivitas Pembelajaran

Indonesia merupakan negara pengirim pekerja migran terbesar di ASEAN sehingga memiliki kepentingan dan peran yang besar dalam penyusunan *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers* yang ditandatangani oleh para pemimpin negara anggota ASEAN pada November 2017. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak kasus pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan prosedur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga berpotensi menimbulkan masalah pada kemudian hari.

Jika kamu mengetahui ada teman, tetangga, atau anggota keluargamu yang ingin bekerja di luar negeri, tetapi mereka tidak melalui prosedur yang benar, saran apa yang akan kamu berikan (dengan menyebutkan rujukan)?

Hasil Diskusi

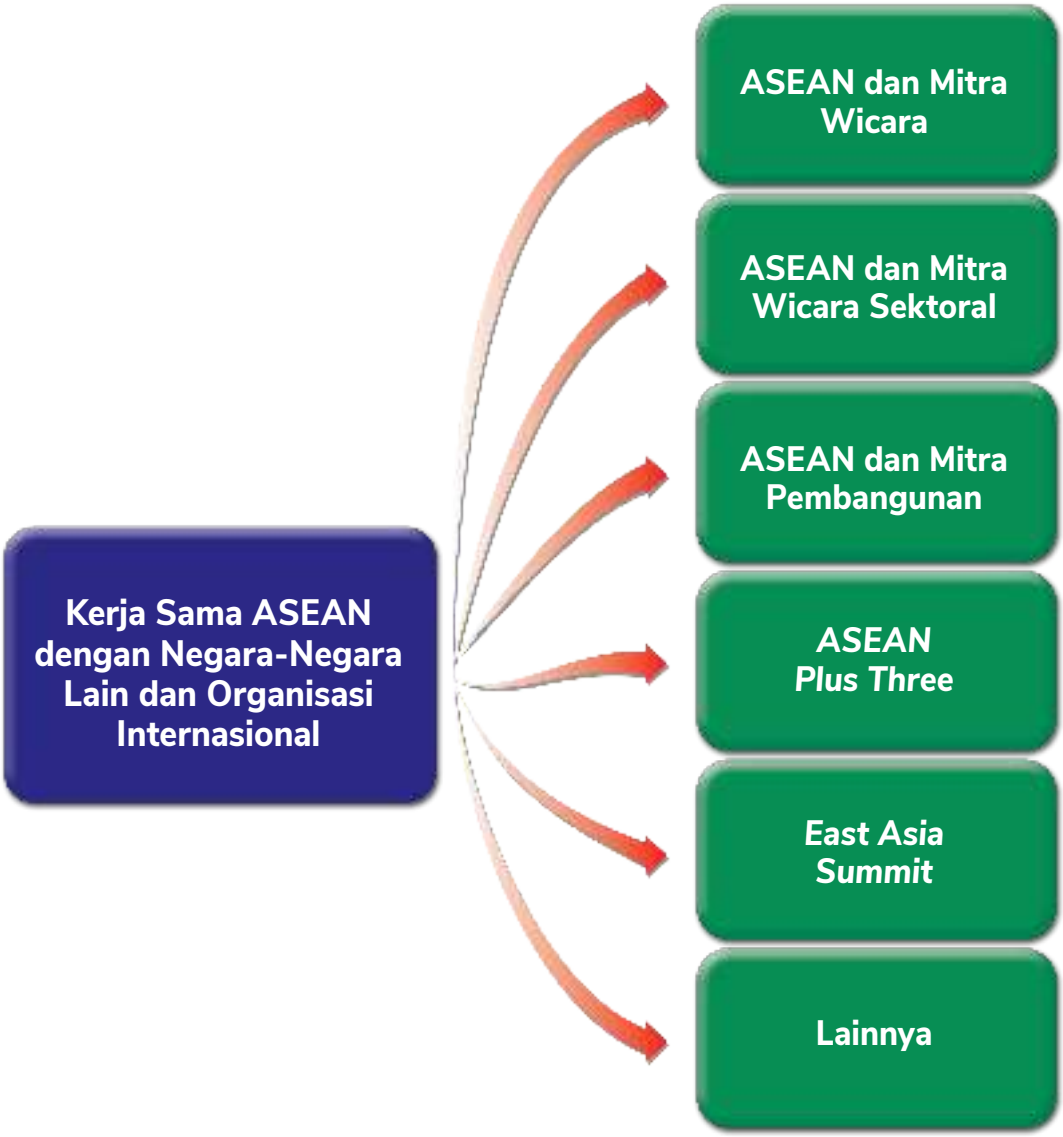
LEMBAR AKTIVITAS SISWA

KERJA SAMA ASEAN DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

PETUNJUK SISWA

1. Identitas
   a. Mata pelajaran : Sejarah Indonesia
   b. Kelas/semester : XII/ 2
   c. Materi pokok : Simulasi Pertemuan East Asia Summit

2. Peta Konsep



3. Aktivitas Pembelajaran

Setelah kamu mempelajari materi Kerja Sama ASEAN dengan Negara-Negara Lain dan Organisasi Internasional, kamu mengetahui bahwa ASEAN bertekad maju dengan menggandeng negara-negara mitra dan mendapatkan banyak manfaat dari kemitraan tersebut. ASEAN juga menjadi mitra sejajar negara-negara di dunia untuk memajukan perdamaian dan kemakmuran.

Salah satu bentuk kerja sama ASEAN dan negara-negara lain adalah *East Asia Summit* yang pesertanya terdiri atas sepuluh negara anggota ASEAN dan delapan mitra wicara, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, Rusia, dan Selandia Baru. *East Asia Summit* merupakan forum yang menyatukan ASEAN dengan negara mitra untuk membahas isu-isu strategis di kawasan dan di dunia internasional.

Pertemuan *East Asia Summit* dilakukan setahun sekali pada tingkat kepala negara/pemerintahan. Selain itu, terdapat pula pertemuan pada tingkat menteri dan pejabat tinggi negara dalam berbagai bidang.

Bagaimanakah pertemuan internasional pada *East Asia Summit* dilaksanakan? Bagaimana pembahasan isu-isu strategis oleh pemerintah dalam pertemuan internasional? Mari kita lakukan simulasi pertemuan internasional pada *East Asia Summit* dengan berperan sebagai wakil negara peserta *East Asia Summit.*

Panduan Simulasi Sidang *East Asia Summit* (EAS)
Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi Negara (*Senior Officials' Meeting*/SOM)
Jakarta, Indonesia, ...*

Pendahuluan

1. Pertemuan EAS SOM diselenggarakan Jakarta, Indonesia, tanggal ....*

2. Pertemuan dipimpin Ketua ASEAN tahun 2020* yaitu Vietnam*. Pertemuan dihadiri oleh para pejabat tinggi negara (Ketua SOM) dan yang mewakili dari seluruh negara peserta EAS serta Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Bidang Politik dan Keamanan. Delegasi yang hadir adalah sebagai berikut.

   1. Brunei Darussalam
   2. Kamboja
   3. Indonesia
   4. Laos
   5. Malaysia
   6. Myanmar
   7. Filipina
   8. Singapura
   9. Thailand
   10. Vietnam
   11. Amerika Serikat
   12. Australia
   13. India
   14. Jepang
   15. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
   16. Republik Korea
   17. Rusia
   18. Selandia Baru
   19. Sekretariat ASEAN

   Setiap delegasi diwakili oleh ketua delegasi yang akan menyampaikan pidato dan didampingi oleh anggota delegasi (apabila jumlah siswa lebih dari 19 orang).

3. Pertemuan EAS SOM kali ini membahas sejumlah agenda berikut:

   a. Inisiatif Baru EAS 2020: Rencana Aksi di Kawasan tentang Penanganan Sampah Plastik di Lautan 2021—2025 (*Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris 2021—2025*).

   b. Persiapan Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi EAS di Hanoi*, November 2020* (*Preparation for the EAS Summit in Hanoi, November 2020*).

Tata Cara Pertemuan:

1. Vietnam akan mendahului dengan membuka pertemuan, kemudian menyerahkan kepada Indonesia untuk memberikan penjelasannya pada agenda Inisiatif Baru EAS 2020.

2. Indonesia akan memimpin pembahasan pada agenda "Inisiatif Baru EAS: Rencana Aksi di Kawasan tentang Penanganan Sampah Plastik di Lautan 2021—2025". Semua delegasi pertemuan akan membahas (menyampaikan tanggapan dan pendapat) atas rancangan yang diusulkan Indonesia tersebut.

(Pidato setiap negara dalam pertemuan EAS dikembangkan oleh setiap kelompok)

4. Pada agenda "Persiapan Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi EAS di Hanoi", Vietnam sebagai Ketua ASEAN tahun 2020 menyampaikan bahwa pertemuan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2020 dan akan tetap menggunakan format seperti tahun lalu.

   a. Ketua Delegasi Australia menyampaikan komitmen perdana menterinya untuk hadir pada pertemuan EAS yang dimaksud.

   b. Hal serupa juga disampaikan oleh Jepang, RRT, Republik Korea, India, dan Selandia Baru.

   (PIdato setiap negara dalam pertemuan EAS dikembangkan oleh setiap kelompok)

5. Dalam pidato penutupan Vietnam mewakili peserta EAS mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerja sama delegasi EAS serta secara khusus untuk pengaturan yang baik oleh Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan di Jakarta sehingga pertemuan telah berjalan lancar.

Keterangan:

* Dapat disesuaikan



Gambar 1. Suasana Pertemuan ASEAN
Sumber Foto: Dokumentasi Kementerian Luar Negeri RI

Coba kamu eksplorasi data tentang berbagai pelaksanaan pertemuan antarnegara anggota ASEAN dan pertemuan ASEAN dengan negara-negara mitranya. Susunlah pidato setiap kelompok (durasi 2—3 menit) yang didukung dengan data mengenai isu yang dibahas, yaitu gagasan Indonesia mengenai pembentukan Rencana Aksi di Kawasan tentang Penanganan Sampah Plastik di Lautan 2021—2025. Usulan Indonesia pada halaman berikut:

Pidatomu dapat berisi hal-hal seperti berikut:

1. Setuju atau tidak setuju atas gagasan Indonesia, beserta alasannya.
2. Usulan-usulan baru yang perlu dimasukkan di dalam rancangan rencana aksi, misalnya prioritas/kepentingan nasional masing-masing terkait penanganan sampah plastik, seperti pembatasan penggunaan plastik serta promosi clean-up day di kalangan siswa dan masyarakat.
3. Jangan lupa melengkapi pidato dengan data yang kamu temukan melalui riset.

Usulan Indonesia

Rencana Aksi di Kawasan tentang Penanganan Sampah Plastik di Lautan (2021—2025)

No.	Area Kerja Sama	Aktivitas
1.	Mengurangi sampah plastik di lautan yang bersumber dari daratan dan lautan	a. Mempromosikan dan memonitor kegiatan untuk membersihkan sampah plastik di lautan di setiap negara, termasuk wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. b. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah di setiap negara, termasuk pelabuhan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. c. Memperbaiki inventaris data, mengelola, memantau, dan mengevaluasi mekanisme program-program yang terkait dengan upaya mengurangi sampah plastik dari aktivitas di daratan dan lautan. d. Meningkatkan penyebaran informasi tentang sampah plastik di lautan di antara negara-negara peserta *East Asia Summit.*
2.	Melakukan kampanye penanganan sampah plastik di lautan	a. Mempromosikan kampanye informasi publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan sektor swasta untuk mencegah dan mengurangi sampah plastik di lautan. b. Meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan yang terlibat tentang bahaya sampah plastik di lautan, termasuk dengan memasukkannya ke dalam sistem pendidikan nasional. c. Mendukung kerja sama penelitian mengenai dampak sampah plastik di lautan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. d. Melibatkan lembaga penelitian dan akademik untuk mengubah pengelolaan limbah masa depan.

3.	Memperkuat penegakan hukum	Mempromosikan dialog dan menguatkan pertukaran informasi mengenai penegakan hukum dalam upaya mencegah dan mengurangi sampah plastik di lautan.
4.	**Memperkuat koordinasi**	a. Memperkuat koordinasi di antara negara-negara peserta *East Asia Summit* dalam mencegah dan mengurangi sampah plastik di lautan. b. Memperkuat kerja sama operasional di antara negara-negara peserta *East Asia Summit* yang sesuai dengan hukum nasional dan perjanjian bilateral atau multilateral. c. Mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan dengan forum atau organisasi internasional, regional, dan subregional lain yang relevan, seperti PBB, G-20, APEC, dan mekanisme ASEAN terkait lainnya untuk mencegah dan mengurangi sampah plastik di lautan. d. Membangun kapasitas sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dalam mencegah dan mengurangi sampah plastik di lautan serta mendorong dan meningkatkan koordinasi di antara negara-negara peserta *East Asia Summit.*

Penutup

Buku Bahan Pengajaran ASEAN bagi Guru Pendidikan Menengah ini merupakan buku pengayaan atau buku nonteks yang dapat digunakan oleh guru di jenjang pendidikan menengah dalam mengajarkan materi ASEAN di kelas. Buku ini diharapkan dapat memandu guru dalam menyebarluaskan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membangun sikap dan perilaku positif siswa tentang ASEAN. Melalui modul ini, diharapkan guru dapat memahami secara utuh pengetahuan mengenai ASEAN seraya memperkenalkan manfaat dan arti penting ASEAN sejak dini kepada siswa di jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, agar buku ini dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, buku ini telah dilengkapi dengan pemetaan materi sesuai dengan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013.

Sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, pembahasan ASEAN terdapat pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII sebagai berikut: (3.8) Mengevaluasi peran Bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting. (4.8) Menyajikan hasil telaah tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain, KAA, Misi Garuda, Deklarasi Djuanda, Gerakan Non Blok, ASEAN, OKI, dan Jakarta Informal Meeting serta menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Muatan materi Kompetensi Dasar 3.8 dan 4.8 dalam kelas XII yang berkaitan dengan Peran Indonesia Dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia adalah sebagai berikut: (1) Konferensi Asia Afrika (2) Misi Garuda (3) Deklarasi Djuanda(4) Gerakan Non Blok (5) ASEAN (6) OKI (7) Jakarta Informal Meeting.

Dalam mengimplementasi buku ini, selain dengan adanya pemetaan materi, guru juga diberikan contoh-contoh kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, pengayaan, dan pembiasaan. Melalui buku ini, siswa diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ASEAN agar siswa dapat mengimplementasikan pengetahuan tentang ASEAN bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam masyarakat ASEAN.

Glosarium

aksesi	pengaksesan; tambahan yang dimasukkan dalam suatu kumpulan atau koleksi.
arms control	kontrol senjata
assessment	penilaian
barong tagalog	pakaian nasional dari Filipina berupa kemeja formal dari, busana ini sangat popular dipakai untuk upacara penikahan atau acara-acara kenegaraan
berkelanjutan	berlangsung terus-menerus; berkesinambungan.
claimant states	Negara pengklaim. Dalam konteks sengketa wilayah di Laut China Selatan, istilah ini biasa digunakan untuk merujuk pada negara-negara yang mengklaim yurisdiksi atas sebagian wilayah teritorial di sekitar Laut China Selatan, yaitu: Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Vietnam dan RRT.
co-chair	ketua bersama
code of conduct	dasar tata perilaku yang mengatur hubungan antarnegara atau antar pihak mengenai suatu kondisi atau isu tertentu
counter-terrorism	tindakan yang diambil untuk mencegah segala bentuk tindakan dan kegiatan oleh sekelompok orang maupun individu yang dikategorikan sebagai bentuk terorisme
dekrit	keputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, dan sebagainya
demokrasi	(bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
demokratisasi	pendemokrasian
denuklirisasi	penghapusan penggunaan senjata nuklir
disarmament	perlucutan senjata
diseminasi	penyebarluasan ide, gagasan, informasi, dan sebagainya
driving force	dorongan, kekuatan, atau energi yang menjadi penggerak
equal footing	kondisi dimana setiap orang / kelompok memiliki kesempatan yang sama
flagship area	area unggulan
ASEAN Free Trade Area (AFTA)	suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi mengenai sektor produksi lokal di negara ASEAN.
focal point	pumpunan kegiatan
good governance	tata kelola pemerintahan yang baik
green technology	teknologi yang ramah lingkungan
humaniter	bersifat kemanusiaan

interoperabilitas	kemampuan berbagai jenis komputer, aplikasi, sistem operasi, dan jaringan untuk bertukar informasi dengan cara yang bermanfaat dan bermakna
joint research	penelitian bersama
knowledge sharing	saling berbagi pengetahuan
konsensus	kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara
konstelasi	bangun; bentuk; susunan; kaitan; gambaran; keadaan yang dibayangkan
kontestasi	kontroversi; debat
landmark	markah
leaders-led summit	pertemuan tingkat kepala negara/kepala pemerintahan, dengan agenda yang ditentukan secara konsensus oleh kepala negara/kepala pemerintahan yang bersangkutan.
legal personality	status hukum
low carbon growth	pertumbuhan rendah karbon
mahayana	salah satu aliran dalam agama buddha
marine plastic debris	sampah plastik laut
national assembly	majelis nasional, sejenis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia
non-interference	prinsip untuk tidak ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri/domestik di negara lain
nonproliferasi	pelarangan penyebarluasan senjata
outlook	pandangan
outward looking	berwawasan ke luar
people-centered and people-oriented	berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat
preventive diplomacy	Upaya diplomasi yang berusaha untuk mencegah timbulnya perselisihan antar pihak, mencegah perselisihan yang sudah ada meningkat menjadi konflik, atau membatasi penyebaran konflik jika sudah terjadi.
public outreach	suatu strategi untuk menjangkau kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang karena faktor struktural memiliki hambatan untuk mengakses informasi dan layanan publik yang ada di dalam masyarakat.
Rakhine	suatu wilayah di bagian utara negara Myanmar
ratifikasi	pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional
referendum	penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat)
regionalisme	rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia.
rekonsiliasi	perbuatan memulihkan hubungan persahabatan keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan

repatriasi	pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya)
regional monitoring and surveillance unit	unit pengawasan dan pemantauan kawasan
research and development	penelitian dan pengembangan
ring of fire	cincin api
rural development	pembangunan pedesaan
satwa	hewan, binatang
Schedule of Commitment (SoC)	jadwal komitmen
sentralitas	penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat: penyentralan: pemusatan
stabil	mantap; kukuh; tidak goyah (tentang bangunan, pemerintah, dan sebagainya); tidak berubah-ubah; tetap; tidak naik-turun (tentang harga barang, nilai uang, dan sebagainya).
stabilisasi	usaha atau upaya membuat stabil; penstabilan
social security	ketahanan sosial
subversi	gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang
sustanainable development goals	tujuan pembangunan berkelanjutan
treaty / traktat	perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara dan organisasi internasional.
undocumented migrant worker	pekerja migran tidak berdokumen
unicameral	memiliki/terdiri dari satu bentuk badan legislatif
vokasi	pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian
voluntary	secara sukarela
yurisdiksi	kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan
zero-sum game	konsep menang-kalah

Daftar Singkatan

ASEAN	*Association of Southeast Asian Nations*
4Ps	*Public, Private, and People Partnership*
AAC	*ASEAN-Australia Consultative*
AACM	*ASEAN-Australia Consultative Meeting*
AADMER	*ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency*
AANZFTA	*ASEAN-Australia-New Zealand FTA*
ACB	*ASEAN Center for Biodiversity*
ACCSM	*ASEAN Conference on Civil Service Matters*
ACDM	*ASEAN Committee on Disaster Management*
ACFTA	*ASEAN-China FTA*
ACIA	*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*
ACRCS	*ASEAN Conference on ASEAN Reform of Civil Service*
ACTI	*ASEAN Connectivity for Trade and Investment*
ACTS	*ASEAN Credit Transfer System*
ACW	*ASEAN Committee on Women*
ACWC	*ASEAN Committee on Women and Children*
ADB	*Asian Development Bank*
ADMM	*ASEAN Defence Ministers' Meeting*
AEM	*ASEAN Economic Ministers' Meeting*
AEMM	*ASEAN-EU Ministerial Meeting*
AFAS	*ASEAN Framework Agreement on Services*
AFCF	*ASEAN Fisheries Consultative Forum*
AFMM	*ASEAN Finance Ministers Meeting*
AFPFL	*Anti-Fascist People's Freedom League*
AFTA	*ASEAN Free Trade Area*
AHA Center	*ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management*
AHKFTA	*ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement*
AIA	*ASEAN Investment Area*
AICHR	*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*
AIFTA	*ASEAN-India FTA*
AIPR	*ASEAN Instititute for Peace and Reconciliation*
AJCEP	*ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*
AKFTA	*ASEAN-Korea FTA*
ALMM	*ASEAN Labour Ministers Meeting*

AMF	*ASEAN Maritime Forum*
AMM	*ASEAN Foreign Ministers Meeting*
AMMDM	*ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters*
AMME	*ASEAN Ministerial Meeting on Environment*
AMMRDPE	*ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication*
AMMSWD	*ASEAN Ministers Meeting on Social Welfare and Development*
AMMTC	*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*
AMMY	*ASEAN Ministerial Meeting on Youth*
AMRO	*ASEAN+3 Macroeconomic Research Office*
AOIP	*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*
APAEC	*ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation*
APCN	*ASEAN Peacekeeping Centers' Network*
APSC	*ASEAN Political-Security Community*
APT	*ASEAN Plus Three*
APTERR	*ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement*
ARF	*ASEAN Regional Forum*
ARMAC	*ASEAN Regional Mine Action Center*
AS	*Amerika Serikat*
ASCC	*ASEAN Socio-Cultural Community*
ASOD	*ASEAN Senior Official Meeting on Drugs Matters*
ASOEN	*ASEAN Senior Officials on the Environment*
ASSP	*ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership*
ASW	*ASEAN Single Window*
ASY	*ASEAN Senior Officials Meeting on Youth*
ATIGA	*ASEAN Trade in Goods Agreement*
ATISA	*ASEAN Trade in Services Agreement*
ATM	*ASEAN Transport Ministers Meeting*
ATMS	*ASEAN Tourism Marketing Strategy*
ATPRS	*ASEAN Tourism Professionals Registration System*
ATRC	*ASEAN Telecommunication Regulators' Council*
ATSP	*ASEAN Tourism Strategic Plan*
AWGCC	*ASEAN Working Group on Climate Change*
AWGCM	*ASEAN Working Group on Coastal and Marine*
AWGCW	*ASEAN Working Group on Chemical and Waste*
AWGNCB	*ASEAN Working Group on Nature Conservation and Biodiversity*
AWGWRM	*ASEAN Working Group on Water Resources Management*
BAP	*Brunei Action Plan*
BIS	*Bank for International Settlements*

BT	Bujur Timur
CAYC	*Committee for ASEAN Youth Cooperation*
CBTP	*Cross Border Transport of Passengers*
CCT	*Clean Coal Technology*
CELAC	*Community of Latin American and Caribbean States*
CMIM	*Chiang Mai Initiative Multilateralisation*
CMLV	*Cambodia, Myanmar, Lao PDR, Vietnam*
CNRP	*Cambodian National Rescue Party*
COC	*Code of Conduct*
COCI	*Committee on Culture and Information*
CPP	*Cambodian Peoples Party*
CPR	*Committee of Permanent Representatives*
DOC	*Declaration on Conduct*
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DT	*Drafting Team*
EAMF	*Expanded ASEAN Maritime Forum*
EAS	*East Asia Summit*
EAVG	*East Asia Vision Group*
ECO	*Economic Cooperation Organisation*
ECWP	*Economic Cooperation Work Programme*
ERW	*Explosive Remnants of War*
GCC	*Gulf Cooperation Council*
GIM	*Governance and Implementation Mechanism*
GNB	Gerakan Non Blok
H.E.	*His Excellency*
HAM	Hak Asasi Manusia
HCP	*High Contracting Parties*
HDA	*Health Development Agenda*
IAI	*Initiative for ASEAN Integration*
ILO	*International Labour Organization*
IMF	*International Monetary Fund*
JCC	*Joint Cooperation Committee*
JENESYS	*The Japan East-Asia Network of Exchange for Students and Youths*
JIM	*Jakarta Informal Meeting*
JSCC	*Joint Sectoral Cooperation Committee*

JWG	*Joint Working Group*
KLTSP	*Kuala Lumpur Transport Strategic Plan*
KMM	Kesatuan Melayu Muda
KMS	Kesatuan Melayu Singapura
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LCS	Laut China Selatan
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPRP	*Lao People's Revolutionary Party*
LS	Lintang Selatan
LU	Lintang Utara
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MERCOSUR	*Mercado Comun del Sur/Common Market of the South*
MPAC	*Master Plan on ASEAN Connectivity*
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRA	*Mutual Recognition Arrangement*
NGO	*Non-Governmental Organization*
NWS	*Nuclear Weapon States*
OCHA	*Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*
PA	*Pacific Alliance*
PAP	*People's Action Party*
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PKC	*Peacekeeping Centers*
PM	Perdana Menteri
PMC	*Post Ministerial Conference*
POA	*Plan of Action*
PPPMI	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
RCEP	*Regional Comprehensive Economic Partnership*
RDPE	*Rural Development and Poverty Eradication*
RE	*Renewable Energy*
ROK	*Republic of Korea*
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAARC	*South Asian Association for Regional Cooperation*
SAP	*Strategic Action Plan*
SDGs	*Sustainable Development Goals*
SDM	Sumber Daya Manusia
SEAFDEC	*Southeast Asia Fisheries Development Center*

SEANWFZ	*Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone*
SEOM	*Senior Economic Officials Meeting*
SMED	*SME Development*
SOC	*Senior Officials' Consultations*
SOM	*Senior Officials' Meeting*
SOM-ED	*Senior Officials' Meeting on Education*
SOMHD	*Senior Officials' Meeting on Health Development*
SOMRDPE	*Senior Officials' Meeting on Rural Development and PovertyEradication*
SOMSWD	*ASEAN Senior Officials' Meeting on Social Welfare and Development*
SOM-TC	*Senior Officials' Meeting on Transnational Crimes*
SOMY	*Senior Officials' Meeting on Youth*
SP-FAF	*Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation on Fisheries*
SPS	*Sanitary and Phytosanitary*
STOM	*ASEAN Senior Transport Officials Liberalisation Meeting*
TAC	*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*
TBT	*Technical Barriers to Trade*
TELSOM	*Telecommunications and IT Senior Officials' Meeting*
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UE	Uni Eropa
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNAIDS	*United Nations Programme on HIV/AIDS*
UNDP	*United Nations Development Programme*
UNESCAP	*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*
UNESCO	*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
UNHCR	*United Nations High Commissioner for Refugees*
UNICEF	*United Nations Children's Fund*
UNTAC	*United Nations Transitional Authority in Cambodia*
USD	*United States Dollar*
WCFSL	*Working Committee on ASEAN Financial Service Liberalisation*
WHO	*World Health Organization*
YDI	*Youth Development Index*
YSEALI	*Young Southeast Asian Leaders Initiative*
ZOPFAN	*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*

Daftar Pustaka

Buku

Association of Southeast Asian Nations. (2012). *ASEAN Curriculum Sourcebook.* Jakarta: ASEAN.

Retnaningdyah, Pratiwi, dkk. (2018). *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMP*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP.

Wiedarti, Pangesti, dkk. (2018). *Desain Induk gerakan Literasi Sekolah Edisi II*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku Elektronik

Attorney General Chamber Malaysia. (2010). *"Federal Constitution".* Diakses pada 23 Oktober 2019,darihttp:/ www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20Consti%20(BI%20text).pdf

Badan Pusat Statistik RI. (2018). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018*. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari file:///C:/Users/KEMENLU2019-248/Downloads/ BRSbrsInd-20190206115050.pdf

Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam. (2018). *"Laporan Anggaran Penduduk Pertengahan Tahun"*. diakses pada 23 Oktober 2019, dari http:// www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/POP/2018/Rep_MidYr_2018.pdf.

Department of Economic Planning and Development, Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam. (2019). *Brunei Darussalam International Merchandise Trade Statistics".* Diakses pada 23 Oktober 2019 dari http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/IMTS/2019/IMTS_Jun2019.pdf.

Information Department, Prime Minister's Office Brunei Darussalam. (2013). *"Brunei Darussalam In Brief"*. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.information.gov.bn/Media%20Document%20Library/ Brunei%20Today/brunei%20in%20brief_FINAL%202.pdf

Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. *Naskah "ASEAN 2025: Forging Ahead Together".* Diakses pada Oktober 2019, dari http://setnas-ASEAN.id/site/uploads/document/book/599e3d513d507-ASEAN-2025-melangkah-maju-bersama.pdf

Sekretariat ASEAN. (2018). *"ASEAN Statistical Yearbook"*. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https:// www.ASEANstats.org/wp-content/uploads/2019/01/asyb-2018.pdf.

Sekretariat ASEAN. (2018). *"ASEAN Key Figures"*. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www. ASEANstats.org/wp-content/uploads/2018/12/ASEAN-Key-Figures-2018.pdf.

Sekretariat ASEAN. (2017). *"ASEAN Economic Integration Brief".* No.1/June. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari https://ASEAN.org/storage/2019/06/AEIB_5th_Issue_Released.pdf

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Website

Association of Singapore Attraction. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari www.singapore-attractions.org.sg/index.php/directory/nature-parks

Atlas Dunia. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.worldatlas.com/articles/the-culture-of-vietnam.html

Bank Dunia. (2019). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://data.worldbank.org/country/cambodia

Cambodian Community Day. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.cambodiancommunityday.org/

Countries and Their Culture Forum. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.everyculture.com/Sa-Th/Thailand.html

Department of Statistics Malaysia. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://newss.statistics.gov.my/newss- portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=54916

Department of Statistics Singapura. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.singstat.gov.sg/bukues/infographics/singapore-international-trade

Ensiklopedia Britannica. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.britannica.com/place/Malaysia/Malaya-and-northern-Borneo-under-British-control

Kementerian Perindustrian RI. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://kemenperin.go.id/statistik/peran.php

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata RI. (2019, 14 Agustus). “Desain Arsitektur TIC Promosikan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan KEK Likupang”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-desain-arsitektur-tic-promosikan-10-destinasi-pariwisata-prioritas-dan-kek-likupang

Kementerian Luar Negeri RI. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://kemlu.go.id/ptri-ASEAN/id/pages/sekretaris_jenderal_ASEAN_dan_sekretariat_ASEAN/966/etc-menu

Malaysia Tourism Promotion Board (MTPB). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://ebrochures.malaysia.travel/

Ministry of Hotels and Tourism. Diakses pada 25 Oktober 2019, dari https://tourism.gov.mm

Ministry of Trade and Industry Singapura. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.mti.gov.sg/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2019/Economic-Survey-of-Singapore-Second-Quarter-2019

Naskah Deklarasi Bangkok. (1967). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://agreement.ASEAN.org/media/download/20140117154159.pdf.

Naskah Piagam ASEAN. (2008, Februari). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.ASEAN.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf.

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Kementerian Perdagangan RI. (2019). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://ppei.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia/

Pusat Informasi Pariwisata Brunei Darussalam. (2019). Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://bruneitourism.com/places-to-go/

Pusat Informasi Resmi Pariwisata Laos. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.tourismlaos.org/show.php?Cont_ID=9

Sekretariat ASEAN. Lagu "The ASEAN Way". Diakses pada Oktober 2019, dari www.ASEAN.org/ASEAN/about-ASEAN/ASEAN- anthem.

Sekretariat ASEAN. (2016). "ASEAN Statistical Leaflet: Selected Key Indicators 2016". Diakses pada 25 Oktober 2019, dari http://en.aecvcci.vn/Uploaded/Users/Admin/files/2018/ASEAN_Stats_Leaflet2016_web.pdf

Singapore Tourism Board. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.visitsingapore.com/editorials/singapore-most-iconic-landmarks/#architecture

Trading Economics. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://tradingeconomics.com/myanmar

Sumber Foto dan Gambar

Gambar Struktur Organisasi ASEAN:

Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. (2017). "Tentang ASEAN". Diakses pada 27 Agustus 2019, dari http://setnas-ASEAN.id/tentang-ASEAN

Foto Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi:

Sekretariat ASEAN. (2018) "Secretary-General of ASEAN Dato Lim Jock Hoi". Diakses pada 27 Agustus 2019, dari https://ASEAN.org/?static_post=secretary-general-ASEAN-lim-jock-hoi

Gambar Peta Negara-Negara Anggota ASEAN:

World Economic Forum (2018). "Everything you need to know about the World Economic Forum on ASEAN 2018". Diakses pada 1 November 2019, dari https://www.weforum.org/agenda/2018/08/everything-you-need-to-know-about-the-world-economic-forum-on-ASEAN-2018/

Foto Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Brunei Darussalam:

The Strait Times. (2017). "Brunei Celebrates Golden Jubilee: What to Know About Sultan Hassanal Bolkiah". Diakses pada 1 Oktober 2019, dari https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/brunei-celebrates-golden-jubilee-what-to-know-about-sultan-hassanal-bolkiah

Foto Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam:

Gambar Berbayar di Aplikasi Canva. (2019)." Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque". Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADAmdgJRhs-sultan-omar-ali-saifuddin-mosque/

Foto Kepala Negara Kerajaan Kamboja:

Laman Resmi Raja Norodom Sihamoni, Kerajaan Kamboja. (2019). "His Majesty King Norodom Sihamoni". Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.norodomsihamoni.org/

Foto Kepala Negara Pemerintahan Kamboja:

Kantor Dewan Menteri Kerajaan Kamboja. (2019). "Samdech Akka Moha Sena, Padei Techo Hun Sen". Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/02/Samdech-Techor-Hun-Sen.jpg

Foto Vimean Ekareach, Kamboja:

Gambar Berbayar di Aplikasi Canva. (2019). “Independence Monument, Phnom Penh, Travel Attractions in Cambodia”. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADaq5YPJcI-independence-monument-phnom-penh-travel-attractions-in-cambodia-/

Foto Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). “Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 s.d. 2024”. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/photo/20191016/38473847RI1A2.jpg

Foto Borobudur, Republik Indonesia:

Gambar Berbayar di Aplikasi Canva. (2019). “Buddha Statue in Borobudur Temple, Java Island, Indonesia”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADaFQ5OMbs-buddha-statue-in-borobudur-temple-java-island-indonesia-/

Foto Pha That Luang, Republik Demokratik Rakyat Laos:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Translation: The Famous Pha That Luang of Vientiane”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADI3TMYEfA-translation-the-famous-pha-tat-luang-of-vientiane-one-of-the-landmarks-of-the-cit/

Foto Petronas, Malaysia:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Kuala Lumpur the Petronas Tower at Dusk”. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADaEt1kO-A-kuala-lumpur-the-petronas-towers-at-dusk/

Foto Pagoda Shwedagon, Repblik Uni Myanmar:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Shwedagon Pagoda in Yangon, Myanmar”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADD3N23Ow8-shwedagon-pagoda-in-yangon-myanmar/

Foto Rizal Park, Republik Filipina:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Rizal Park Landscape”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MAB2BxoSUt4-rizal-park-landscape/

Foto Helix Bridge dan Marina Bay, Singapura:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Marina Bay Sands at Night”. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MAC4j751cNE-marina-bay-sands-at-night/

Foto Wat Pho, Kerajaan Thailand:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “The Reclining Buddha at Wat Pho (Pho Temple) in Bangkok, Thailand”. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari https://www.canva.com/photos/MADA6eOF2hk-the-reclining-buddha-at-wat-pho-pho-temple-in-bangkok-thailand/

Foto Danau Hoan Kiem, Republik Sosialis Vietnam:

Gambar Berbayar Aplikasi Canva. (2019). “Hoan Kiem Lake or Sword Lake”. Diakses pada 27 September 2019, dari https://www.canva.com/photos/MACykUzzTyc-hoan-kiem-lake-or-sword-lake/

Haji Hassanal Bolkiah

Prime Minister's Office Brunei Darussalam. (2019). Diakses pada 24 Oktober 2019, dari http://www.pmo.gov.bn/Pages/Prime-Minister.aspx

Norodom Sihamoni

King Norodom Sihamoni Official Website. (2019). Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.norodomsihamoni.org/

Hun Sen

Office of the Council Ministers. (2017). "Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen held a press conference at China World Hotel in Beijing". Diakses pada 25 Oktober 2019, dari https://pressocm.gov.kh/en/archives/5901

Joko Widodo

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Diakses pada 24 Oktober 2019 dari https://setneg.go.id/

Bounnhang Vorachith

Lao News Agency. (2016). "Lao People's Democratic Republic". Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://kpl.gov.la/En/Page/Politic/governmentVIII.aspx

Thongloun Sisoulith

Lao News Agency. (2016). "Lao People's Democratic Republic". Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://kpl.gov.la/En/Page/Politic/governmentVIII.aspx

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah

Portal Resmi Parlimen Malaysia. (2019). "Senarai Yang di-Pertuan Agong". Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.parlimen.gov.my/yda-senarai-yang-di-pertuan-agong.html?uweb=yg&

Muhyiddin Yassin

Official Twitter of Muhyiddin Yassin, Prime Minister of Malaysia. (2021). Diakses pada 1 Februari 2021 dari https://twitter.com/MuhyiddinYassin

Win Myint

The Republic of the Union of Myanmar (2018). "Myanmar New Year Greetings of U Win Myint". Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.president-office.gov.mm/en/?q=briefing-room/news/2018/04/18/id-8680

Rodrigo Roa Duterte

Embassy of The Republic of the Philippines Tokyo, Japan. (2016). "President Rodrigo Roa Duterte" Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://tokyo.philembassy.net/the-philippine-president/president-rodrigo-roa-duterte/#nav-cat

Halimah Yacob

President of The Republic of Singapore. (2017). "President In Office". Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.istana.gov.sg/The-President/President-In-Office

Lee Hsien Loong

Akun Resmi Media Sosial Perdana Menteri Singapura. (2019). Diakses pada 24 Oktober 2019, dari https://www.instagram.com/p/B1VH6wXn_dC/

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun atau Rama ke-10

Royal Thai Embassy, Amman, Jordan. (2016). “HM King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”. Diakses pada 24 Oktober 2019, dari http://www.thaiembassy.org/amman/en/information/6766

Jenderal Prayut Chan-O-Cha

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (2019). Diakses pada 24 Oktober 2019, dari http://www.mfa.go.th

Nguyễn Phú Trọng

Sở Ngoại Vu Phu Tho. (2019). “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc“. Diakses pada 23 Oktober 2019, dari http://www.phuthodfa.gov.vn/tin-tuc/5062/tong-bi-thu--chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-chuc-mung-viet-nam-trung-cu-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc.html

Nguyễn Xuân Phúc

Prime Minister the Socialist Republic of Viet Nam. (2019). “For territorial integrity, Viet Nam never makes concessions, PM affirms”. Diakses pada 24 Oktober 2019 dari http://primeminister.chinhphu.vn/

TIM PENULIS

Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Prof. Ainun Na'im, Ph.D.

Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Gedung C, lt.2
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan
10270
Telepon : 021-5711144 Pes. 2211
Faks : 021-5736367

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri

Sidharto Reza Suryodipuro

Jl. Taman Pejambon No. 6,
Jakarta Pusat
10110
Telepon : 021-3509058
Faks : 021-3509050
Surel : aseandg.indonesia@kemlu.go.id



Buku Bahan Pengajaran

ASEAN

Bagi Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretariat Jenderal
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, 10270

